

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH
DALAM RANGKA REVITALISASI FISIK DAN
KOLEKSI MUSEUM**

**(STUDI PADA MUSEUM KEHUTANAN IR.DJAMALUDIN
SURYOHADIKUSUMO KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

RADEN MUHAMMAD IRFAN PRATAMA

NIM. 175030700111006

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2021

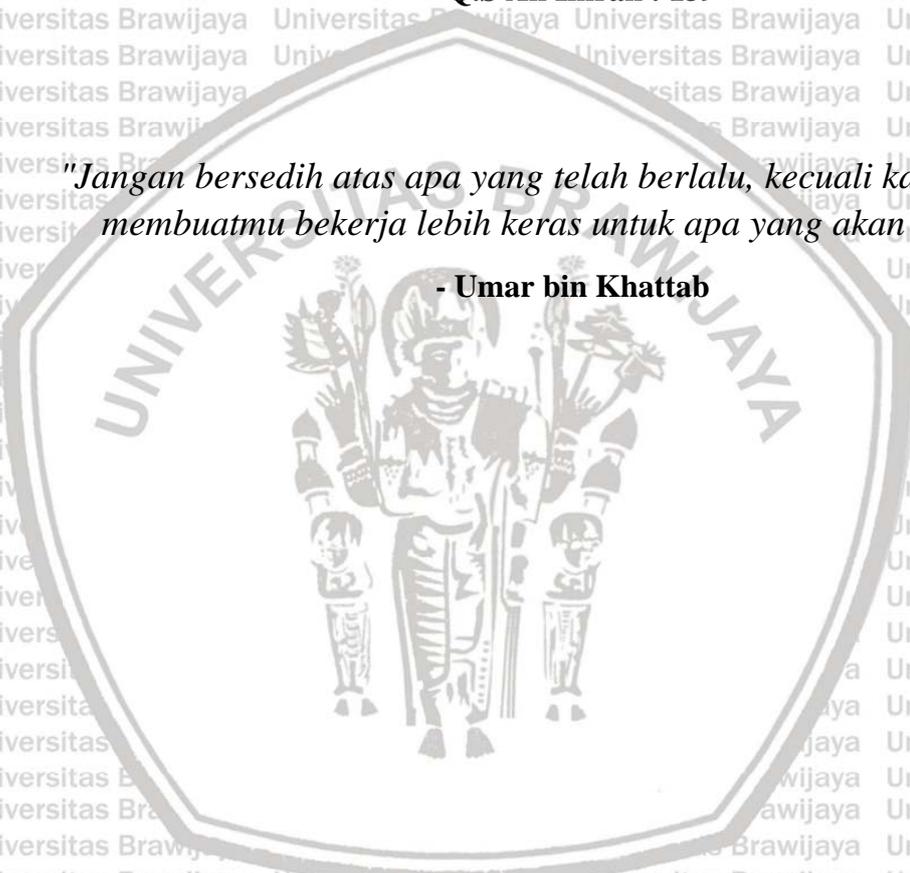
MOTTO

“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman”.

- Q.S Ali Imran : 139

“Jangan bersedih atas apa yang telah berlalu, kecuali kalau itu bisa membuatmu bekerja lebih keras untuk apa yang akan datang”.

- Umar bin Khattab



HALAMAN PERSEMBAHAN

Persembahan Untuk :

Kedua orang tua saya Ayah Firmansyah dan Bunda Irma Suprihandijah,

Adik saya satu-satunya adek Firasya Nur Raudhah

yang telah memberikan dukungan, motivasi, doa, cinta yang luar biasa apapun yang terjadi dan materi yang tak pernah terlambat setiap bulannya.

Putri Saeza Ramadhini yang memberikan telah memberikan waktu, semangat dan doa dalam hal apapun serta selalu ada dan menghibur, menasehati dikala sedang suntuk serta mengajarkan untuk selalu sabar.

Haura Zhafirah HS dan Karlina Dewi Sukarno *partner* kebersamaan dimana pun, kapan pun yang sering *sharing*, mengajarkan untuk selalu tangguh dan sering berdebat namun tetap saling memberi dukungan dan menasehati dalam melewati tantangan yang ada.

Yusa Maliki Santoro dan Maharani Citra yang selalu siap sedia membantu dikala mengalami kesulitan.

Geng Multichat dan Discord yang selalu menghibur tentang cerita kehidupan.

Geng Warung Mangkrak yang selalu menemani dan mendukung selama di dunia per kos-kosan di Malang.

Mba Nabil dan Mba Khansa yang selalu bersedia menjadi mentor serta *sharing* mengenai permasalahan yang sedang dihadapi dan mengajarkan untuk sabar.

Serta tak lupa juga saya ucapkan terima kasih atas banruan, dukungan dan motivasi kepada semua orang yang pernah menjadi bagian dari cerita perjalanan hidup saya.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Rangka Revitalisasi Fisik dan Koleksi Museum (Studi Pada Museum Kehutanan Ir.Djamaluddin Suryohadikusumo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)

Disusun Oleh : Raden Muhammad Irfan Pratama

NIM : 175030700111006

Fakultas : Ilmu Administrasi

Program Studi : Ilmu Perpustakaan

Malang, 27 April 2021

Komisi Pembimbing

Ketua Komisi Pembimbing

Anggota Komisi Pembimbing

Dr. Drs. Mochamad Rozikin, M.AP
NIP. 19630503 1988021 001

Mochamad Chazienuh Ulum, S.Sos, M.AP
NIP. 19740614 2005011 001

**TANDA PENGESAHAN
MAJELIS PENGUJI**

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 20 Mei 2021

Jam : 09.15 WIB

Skripsi Atas Nama : Raden Muhammad Irfan Pratama

Judul : Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Rangka Revitalisasi Fisik dan Koleksi Museum (Studi Pada Museum Kehutanan Ir. Djamaludin Suryohadikusumo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)

Dan dinyatakan

LULUS

Majelis Penguji

Ketua

Anggota

Dr. Drs. Mochammad Rozikin, M.AP

Mochamad Chazienul Ulum, S.Sos., M.AP

NIP. 19630503 198802 1 001

NIP. 19740614 200501 1 001

Anggota

Anggota

Dr. Drs. Sarwono, M.Si

Soejarwoto, S.IP., M.Si., Ph.D.

NIP. 19570909 198403 1 002

NIP. 19750130 200312 1 002



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi yang berjudul **"Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Rangka Revitalisasi Fisik dan Koleksi Museum (Studi Pada Museum Kehutanan Ir.Djamaluddin Suryohadikusumo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)"** ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 27 April 2021

Yang membuat pernyataan



Raden Muhammad Irfan Pratama

NIM.175030700111006

ABSTRAK

Raden Muhammad Irfan Pratama, 2021, **Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Rangka Revitalisasi Fisik dan Koleksi Museum (Studi Pada Museum Kehutanan Ir.Djamaluddin Suryohadikusumo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)**, Dr. Mochamad Rozikin, M.AP., Mochamad Chazienul Ulum, S.Sos, M.AP., 190 hal + xvii

Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai museum khusus yang dimana sebagai pusat informasi dan dokumentasi mengenai kehutanan di Indonesia serta lingkungan hidup untuk sarana informasi, edukasi dan rekreasi harus menjadi museum yang ideal dengan memberikan layanan yang efektif dan efisien. Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan kegiatan suatu kebijakan yang telah ditetapkan dan berfungsi untuk memudahkan tujuan-tujuan kebijakan agar dapat direalisasikan. Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 ini penting agar pengelola museum khususnya Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo mempunyai pedoman kerja bagi pengembangan pengembangan seperti tenaga pengelola museum, mendukung visi dan misi museum, dan ikut membantu dalam mencerdaskan bangsa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis implementasi kebijakan, hasil dari revitalisasi fisik dan koleksi museum beserta dengan faktor pendukung, dan faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 tentang museum dalam rangka revitalisasi fisik dan koleksi museum menggunakan model pendekatan implementasi kebijakan Edward III. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data kualitatif Miles dan Huberman (2014).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo sudah mengimplementasikan 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Di dalam 4 faktor tersebut, terdapat 8 indikator dari 11 indikator yang sudah berhasil di implementasikan untuk mengukur hasil penerapan dan keberhasilan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum dalam rangka revitalisasi fisik dan koleksi museum. Hanya saja terdapat tiga indikator yang belum berhasil diimplementasikan terkait sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan rekrutmen pegawai. Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 dipengaruhi adanya faktor pendukung yaitu SDM yang kompeten, koleksi khusus yang dimiliki, lokasi museum yang strategis, serta fasilitas dan layanan yang dimiliki. Adapun faktor penghambat yaitu dari anggaran, dukungan pimpinan, kerja sama dengan museum atau lembaga lainnya, dan belum adanya pembinaan tenaga pengelola museum.

KATA KUNCI : MUSEUM, REVITALISASI MUSEUM, IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

ABSTRACT

Raden Muhammad Irfan Pratama, 2021, **Implementation of Government Policies in the Context of Physical Revitalization and Museum Collections (Study at the Forestry Museum Ir.Djamaluddin Suryohadikusumo Ministry of Environment and Forestry)**, Dr. Mochamad Rozikin, M.AP., Mochamad Chazienul Ulum, S.Sos, M.AP., 190 pages + xvii

Forestry Museum Ir.Djamaludin Suryohadikusumo Ministry of Environment and Forestry as a special museum which serves as a center for information and documentation on forestry in Indonesia and the environment for information, education and recreation facilities should be an ideal museum by providing effective and efficient services. Policy implementation is the execution of a policy activity that has been determined and functions to facilitate policy objectives in order to be realized. The existence of Government Regulation Number 66 of 2015 is important so that museum managers, especially the Forestry Museum, Ir.Djamaludin Suryohadikusumo, have minimum work guidelines as museum management personnel, support the museum's vision and mission, and help in educating the nation.

This study aims to identify, describe, and analyze the implementation of policies, the results of physical revitalization and museum collections along with supporting factors, and inhibiting factors in the implementation of the Republic of Indonesia Government Regulation Number 66 of 2015 concerning museums in the context of physical revitalization and museum collections using a model approach. Edward III policy implementation. The method used in this research is descriptive with a qualitative approach. The data analysis technique used in this study was qualitative data analysis by Miles and Huberman (2014).

The results of this study indicate that the Forestry Museum Ir.Djamaludin Suryohadikusumo has implemented 4 factors that influence the success or failure of policy implementation. Within these 4 factors, there are 8 indicators out of 11 indicators that have been successfully implemented to measure the results of the implementation and success of the Republic of Indonesia Government Regulation Number 66 of 2015 concerning Museums in the context of physical revitalization and museum collections. It's just that there are three indicators that have not been implemented successfully related to human resources, budget resources and employee recruitment. The implementation of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 66 of 2015 is influenced by the presence of supporting factors, namely competent human resources, special collections owned, strategic location of the museum, as well as the facilities and services they have. As for the inhibiting factors, namely from the budget, leadership support, cooperation with museums or other institutions, and the absence of guidance for museum management personnel.

KEYWORDS : MUSEUM, MUSEUM REVITALIZATION, POLICY IMPLEMENTATION

DAFTAR ISI

MOTTO	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	10
I.3 Tujuan Penelitian	11
I.4 Kontribusi Penelitian.....	11
I.5 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
II.1 Penelitian Terdahulu.....	14
II.2 Kebijakan Publik.....	17
II.2.1 Pengertian Kebijakan Publik	17
II.2.2 Tahap-Tahap Kebijakan Publik.....	19
II.3 Implementasi Kebijakan Publik.....	22
II.3.1 Implementasi Kebijakan Publik	22
II.3.2 Model Implementasi Kebijakan Publik.....	23
II.4 Organisasi Sektor Publik	29
II.4.1 Pengertian Organisasi Sektor Publik.....	29



II.4.2 Karakteristik Organisasi Sektor Publik.....	31
II.5 Museum.....	34
II.5.1 Jenis-Jenis Museum.....	36
II.5.2 Tugas dan Fungsi Museum.....	40
II.6 Revitalisasi Museum.....	43
II.6.1 Pengertian Revitalisasi Museum.....	43
II.6.2 Aspek Revitalisasi Museum.....	44
II.6.3 Standarisasi Museum.....	50
BAB III METODE PENELITIAN.....	56
III.1 Jenis Penelitian.....	56
III.2 Fokus Penelitian.....	56
III.3 Lokasi dan Situs Penelitian.....	58
III.4 Sumber Data.....	59
III.5 Teknik Pengumpulan Data.....	61
III.6 Instrumen Penelitian.....	62
III.7 Metode Analisis Data.....	63
III.8 Keabsahan Data.....	68
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	70
IV.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	70
IV.1.1 Profil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	70
IV.1.2 Tugas dan Fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	71
IV.1.3 Budaya Kerja Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	74
IV.2 Gambaran Umum Situs Penelitian.....	75
IV.2.1 Profil Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo.....	75
IV.2.2 Visi Misi Museum.....	77
IV.2.3 Tujuan dan Fungsi Museum.....	78
IV.2.4 Lokasi dan/atau Bangunan Museum.....	78
IV.2.5 Struktur Organisasi Museum.....	79
IV.2.6 Jenis dan Jumlah Koleksi Museum.....	80
IV.2.7 Pengunjung Museum.....	82
IV.3 Penyajian Data.....	83

IV.3.1 Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum dalam rangka revitalisasi fisik dan koleksi pada Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggunakan model pendekatan implementasi kebijakan Edward III	83
1. Komunikasi	84
a. Dimensi Transmisi	86
b. Dimensi Kejelasan	86
c. Dimensi Konsistensi	87
2. Sumberdaya	89
a. Sumber Daya Manusia	89
b. Sumber Daya Finansial	91
c. Sumber Daya Peralatan	92
d. Sumberdaya Kewenangan	93
3. Disposisi (Sikap Pelaksana)	94
a. Rekrutmen Pegawai/Pengangkatan Birokrat	94
b. Insentif	95
4. Struktur Birokrasi	96
a. Fragmentasi	96
b. <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i>	100
IV.3.2 Hasil, Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dari revitalisasi fisik dan koleksi museum pada Museum Kehutanan Ir.Djamaluddin Suryohadikusumo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	103
1. Hasil Revitalisasi	103
2. Faktor Pendukung	115
3. Faktor Penghambat	117
IV.4. Analisis Data	119
IV.4.1 Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum dalam rangka revitalisasi fisik dan koleksi pada Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggunakan model pendekatan implementasi kebijakan Edward III	119
1. Komunikasi	122
2. Sumberdaya	125
3. Disposisi (Sikap Pelaksana)	129

4. Struktur Birokrasi.....	131
IV.4.2 Analisis Hasil, Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dari revitalisasi fisik dan koleksi museum pada Museum Kehutanan Ir.Djamaluddin Suryohadikusumo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	135
1. Hasil Revitalisasi.....	135
2. Faktor Pendukung.....	138
3. Faktor Penghambat.....	141
BAB V PENUTUP.....	146
V.I Kesimpulan.....	146
V.II Saran	152
DAFTAR PUSTAKA.....	154
LAMPIRAN.....	158

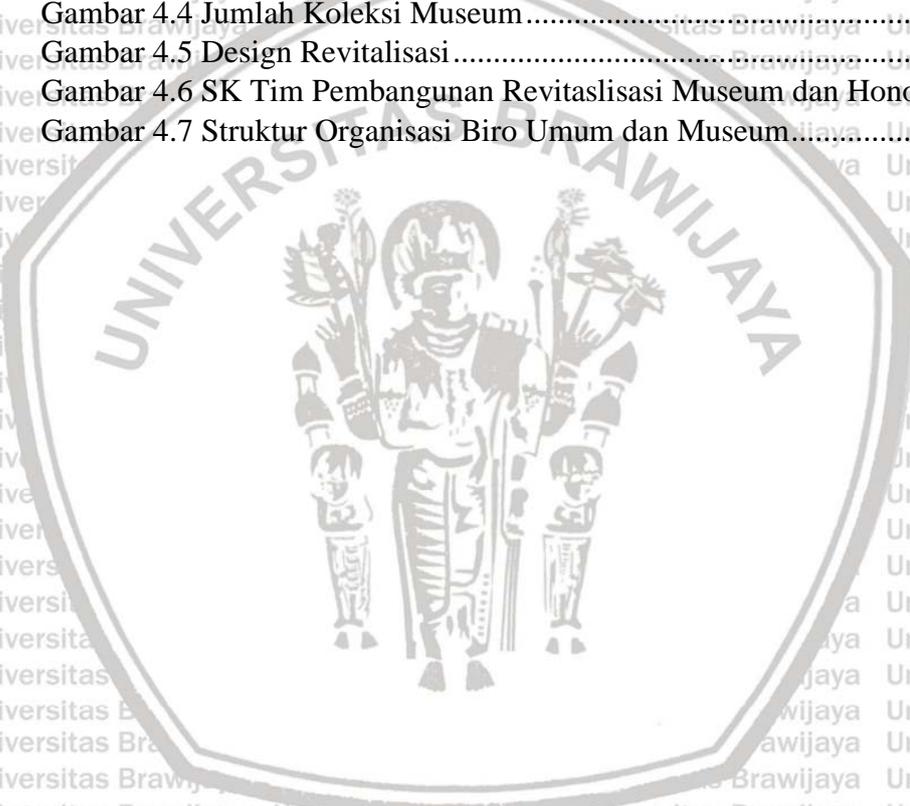


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Museum di Indonesia	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	16
Tabel 4.1 Jumlah Pengunjung Museum 2015-2020	100
Tabel 4.2 Tabel Perbandingan Sebelum dan Sesudah Revitalisasi 1	105
Tabel 4.3 Tabel Perbandingan Sebelum dan Sesudah Revitalisasi 2	106
Tabel 4.4 Tabel Perbandingan Sebelum dan Sesudah Revitalisasi 3	108
Tabel 4.5 Tabel Perbandingan Sebelum dan Sesudah Revitalisasi 4	109
Tabel 4.6 Tabel Perbandingan Sebelum dan Sesudah Revitalisasi 5	110
Tabel 4.7 Tabel Perbandingan Sebelum dan Sesudah Revitalisasi 6	111
Tabel 4.8 Tabel Perbandingan Sebelum dan Sesudah Revitalisasi 7	112
Tabel 4.9 Tabel Perbandingan Sebelum dan Sesudah Revitalisasi 8	113
Tabel 4.10 Tabel Perbandingan Sesudah Revitalisasi 8	114
Tabel 4. 11 Tabel Faktor Pendukung	116
Tabel 4.12 Tabel Faktor Penghambat	118
Tabel 4.13 Tabel Implementasi Faktor Komunikasi	125
Tabel 4.14 Tabel Implementasi Faktor Sumber Daya	129
Tabel 4.15 Tabel Implementasi Faktor Disposisi	131
Tabel 4.16 Tabel Implementasi Faktor Struktur Birokrasi	135

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tahap-Tahap Kebijakan	22
Gambar 2.2 Model Implementasi George C.Edward III.....	27
Gambar 2.3 Model Implementasi Donald Van Metter dan Carl Van Horn.....	29
Gambar 4.1 Lokasi Museum.....	79
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Museum.....	80
Gambar 4.3 Jenis Koleksi Museum	81
Gambar 4.4 Jumlah Koleksi Museum.....	82
Gambar 4.5 Design Revitalisasi.....	88
Gambar 4.6 SK Tim Pembangunan Revitalisasi Museum dan Honorarium.....	88
Gambar 4.7 Struktur Organisasi Biro Umum dan Museum.....	97



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara.....158

Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup.....161

Lampiran 3. Surat Keterangan Riset dari Tempat Riset163

Lampiran 4. Hasil Wawancara.....171

Lampiran 5. Logbook Penelitian178

Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian.....189



BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Mendengar kata museum sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat yang identik dengan benda-benda bersejarah atau kuno dengan suasana yang membosankan. Benda-benda kuno merupakan peninggalan dari suatu peristiwa bersejarah dan memiliki nilai penting bagi bangsa Indonesia. Suasana yang membosankan menggambarkan konsep museum yang tidak menarik, seperti hanya melihat benda dan gambar dengan keterangan yang cukup panjang.

Sejarah awalnya museum didirikan bertujuan sebagai tempat memperlihatkan hasil temuan dan penelitian benda-benda kuno yang dilakukan oleh para arkeolog kepada masyarakat. Menurut Kochhar (2008:387-388), “museum digambarkan sebagai pusat dokumentasi tiga dimensi dunia dan sejarah manusia yang tidak dapat digantikan oleh publikasi lainnya dan menyediakan informasi, pendidikan, dan hiburan”. Koleksi museum dapat menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat yang berkunjung dan dapat melestarikan budaya maupun sejarah.

Sejarah museum tersebut yang lebih dikenal masyarakat sebagai tempat menyimpan benda-benda bersejarah. Di Indonesia, Menurut Pusat Data dan Statistik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dikutip (dalam Imarotul Mufidah, 2019:49) perkembangan museum tidak terjadi dengan pesat, jumlah penduduk tidak sebanding dengan jumlah museum yang ada. Jumlah penduduk Indonesia sekitar 273 juta jiwa dan jumlah museum saat ini 439. Dibandingkan

dengan Amerika yang jumlah penduduknya 331 juta jiwa dan jumlah museum 35 ribu.

Tabel 1.1 Jumlah Museum di Indonesia

Tahun	Jumlah Museum
2011	275
2016	428
2019	439

Sumber: Direktorat Permuseuman, Dirjen Sejarah & Purbakala, Asosiasi Museum Indonesia

Museum Direktorat Museum (2008), di Indonesia lebih sering diberdayakan sebagai tempat kunjungan belajar sekolah bukan sebagai obyek wisata, karena secara umum museum memiliki fungsi sebagai sarana edukasi. Kunjungan belajar sekolah dilakukan dengan melihat pentingnya museum dalam proses pendidikan, yaitu mengenalkan budaya dan sejarah bangsa Indonesia. Selain sebagai sarana pendidikan, museum berfungsi sebagai sarana penelitian, sehingga setiap orang yang datang berkunjung hanya untuk kepentingan tertentu.

Kebiasaan ini menimbulkan anggapan mengenai museum hanya sebagai sarana pendidikan, sehingga masyarakat umum berpendapat bahwa mereka kurang sesuai jika berkunjung ke museum. Seiring perkembangan zaman, museum mengalami perkembangan seperti dalam hal konsep museum agar dapat menarik daya tarik masyarakat. Perkembangan museum ini mengubah anggapan masyarakat mengenai museum yang kuno dan ketinggalan zaman, dan sekarang museum dapat dijadikan sebagai obyek wisata. Hal ini juga mengubah fungsi dan peran museum yang dahulu hanya dijadikan sebagai sarana edukasi, saat ini menjadi museum sebagai lembaga layanan informasi dan obyek wisata.

Menurut Winarni (2013:30), mengatakan bahwa museum mengalami pergeseran atau perubahan paradigma yang semula fokus pada koleksi menjadi kajian publik atau masyarakat. Di Indonesia, museum dianggap tidak menarik, membosankan, koleksinya kuno, dan yang didalamnya kuno maupun lama masih cukup sering terdengar hingga saat ini. Kebanyakan masyarakat hanya mau datang ke museum jika menarik perhatian, unik, dan sangat sedikit yang hanya mau belajar. Hal ini yang menjadi tantangan museum kedepan agar museum lebih menarik dalam menyajikan informasi beserta koleksi, dan sifat masyarakat Indonesia yang cenderung malas membaca informasi yang panjang dan hanya datang ke museum untuk melihat koleksi saja.

Saat ini banyak obyek wisata yang menyediakan berbagai wahana yang menarik dan menyenangkan, yang menyebabkan museum terabaikan oleh masyarakat. Melihat kondisi dan situasi museum di Indonesia yang masyarakatnya terutama kaum muda lebih suka ke tempat-tempat *instragammable*. Tidak heran jika masyarakat umum lebih tertarik pergi ke tempat hiburan dengan wahana bermain yang lebih menyenangkan dibanding berkunjung ke museum.

Cara agar museum tetap ada di lingkungan masyarakat ataupun tidak terabaikan adalah dengan melakukan perubahan yang didorong dengan penerapan kemajuan teknologi. Perkembangan museum dapat dilihat dari semakin banyaknya museum baru yang didirikan bukan hanya menyediakan benda bersejarah melainkan suatu hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia, salah satunya adalah seni. Salah satu museum yang terkenal di Indonesia dengan konsep seni adalah Museum MACAN (*Modern and Contemporary Art in Nusantara*),

namun masih banyak museum yang bersifat sejarah fokus pada koleksi dengan informasi yang lengkap. Berkaca pada konsep museum di luar negeri yang sudah maju yaitu National September 11 Memorial & Museum yang menampilkan informasi dengan konsep yang unik dan wisatawan dapat melihat secara nyata peristiwa yang terjadi pada saat itu. Museum tersebut ramai dikunjungi baik wisatawan lokal maupun mancanegara karena wisatawan antusias melihat koleksi dan informasi yang ada di museum tersebut.

Museum di luar negeri sudah memiliki rancangan dan strategi yang telah direncanakan terlebih dahulu. Museum di luar negeri tidak hanya fokus pada koleksi dan informasi tetapi juga memiliki struktur bangunan yang sangat bagus, megah, unik serta kreativitas tinggi. Salah satu faktor pendorong wisatawan penasaran dan tertarik karena struktur bangunan yang unik dan arsitektur yang berbeda, serta koleksi yang tertata dengan indah dan rapi. Koleksi yang disediakan pun sangat maksimal yaitu sesuai dengan aslinya untuk memuaskan wisatawan.

Dibandingkan dengan museum di Indonesia yang perencanaan dan strateginya masih kurang tersusun dengan baik.

Faktor pendorong tercapainya peran dan fungsi museum yang sesuai dengan tujuan tidak hanya dari pengelola museum, melainkan karakteristik masyarakat lokal. Masyarakat luar negeri memiliki rasa penasaran yang tinggi, literasi informasi yang cukup tinggi, dan menganggap pengetahuan mengenai sejarah, peristiwa maupun budaya sangat penting. Dibandingkan dengan Indonesia yang masyarakatnya kurang mementingkan pengetahuan tersebut dan lebih suka membaca informasi melalui media sosial yang belum pasti akurat.

Secara umum museum di Indonesia terbagi menjadi dua jenis yaitu museum milik pemerintah dan milik swasta. Museum milik pemerintah masih terbilang kuno dan kurangnya perawatan, baik terhadap koleksi maupun bangunan dengan kondisi bangunan yang sudah cukup lama sehingga kebanyakan museum milik pemerintah kurang diminati wisatawan. Museum milik swasta terbilang sudah cukup berkembang dan *modern*. Salah satu perbedaan antara museum pemerintah dengan museum swasta terletak hanya pada tiket masuk di mana biasanya museum pemerintah tidak memungut biaya sedangkan museum swasta memiliki tiket masuk.

Adapun kebijakan yang mendukung tentang adanya perubahan ataupun perkembangan museum dalam hal revitalisasi untuk mengembalikan fungsi museum adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum yang juga menjadi pedoman bagi lembaga tersebut dalam rangka revitalisasi museum. *American Association of Museum* (2008), mengatakan bahwa museum dalam hal *non-profit* sebagai lembaga sumber pendidikan dan sumber informasi yang terpercaya. Menurut pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa museum adalah lembaga *non-profit* yang melayani masyarakat dengan tujuan mengumpulkan, melestarikan, meneliti, mengomunikasikan serta memamerkan bukti berupa benda, manusia dan lingkungannya untuk tujuan penelitian, edukasi, dan rekreasi.

Oleh karena itu, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum diatur didalamnya tentang revitalisasi museum untuk merubah wajah museum milik pemerintah yang tadinya terbilang

kuno dan kurang terawat menjadi lebih *modern* agar tidak kalah dengan museum swasta dalam hal daya tarik pengunjung museum. Salah satu museum milik pemerintah yang telah melakukan revitalisasi adalah Museum Kehutanan Ir.Djamaluddin Suryohadikusumo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Revitalisasi museum ini bukan hanya sekedar mempertahankan eksistensi di tengah masyarakat, tetapi juga menerapkan peran dan fungsi museum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum, perlu dilakukannya implementasi dari kebijakan tersebut.

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Afan, 2009:295). Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang; Menurut Nugroho D

(2004), Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu : (1) langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program, atau (2) melalui formulasi pelaksanaan derivat atau turunan dari pelaksanaan publik tersebut. Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Museum Kehutanan Ir.Djamaluddin Suryohadikusumo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (dahulu Museum Kehutanan Manggala Wanabakti diresmikan pada tanggal 24 Agustus 1983, oleh Presiden RI ke-2, Bapak Soeharto. Luas bangunan museum ini ± 1.466 m² terdiri dari dua lantai. Lantai pertama berisi koleksi artefak dan diorama tentang kehutanan Indonesia, dan lantai kedua berisi pameran foto dan informasi. Pada awalnya, museum ini dikelola oleh yayasan manggala wanabakti. Seiring dengan berjalannya waktu, yayasan manggala wanabakti sudah tidak mampu untuk mengelola museum kehutanan tersebut. Kemudian seiring dengan adanya kebijakan baru oleh Presiden RI ke-7, Bapak Joko Widodo yaitu penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2014, Museum Kehutanan

Ir.Djamaluddin Suryohadikusumo dialihkan ke pemerintah untuk dikelola oleh Kementerian. Pada kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, museum berada dibawah naungan sekretariat jenderal, dibawah di biro umum dan tata kelola kementerian, dan dibagian sub bagian pengelolaan karya cetak, kepustakaan dan museum. Visi dari museum ini adalah sebagai pusat informasi dan dokumentasi lingkungan hidup dan kehutanan di Inndonesi. Koleksi yang terdapat pada museum kehutanan ini adalah sejarah kehutanan Indonesia, peralatan dan transportasi kehutanan, produk hutan kayu dan non kayu, visualisasi dan taman nasional.

Setelah berdirinya museum sejak tahun 1983, museum milik pemerintah ini mengalami revitalisasi yang bertujuan untuk meningkatkan citra museum pemerintah agar tidak kalah bersaing dengan museum swasta. Adanya kebijakan revitalisasi museum di Indonesia, akan berdampak luas dan manfaatnya sangat besar. Museum akan berkembang menjadi lebih baik dan masyarakat semakin kenal dan cinta dengan museumnya. Diharapkan, dengan adanya revitalisasi museum ini, bisa memunculkan kesadaran untuk menempatkan kembali museum bukan sebagai tempat yang ditakuti oleh masyarakat. Museum bisa menjalankan fungsi utamanya sebagai tempat *research*, *education*, dan *entertainment*. Nantinya pelestarian kebudayaan Indonesia melalui museum bisa berjalan dengan baik.

Masyarakat bisa merasakan museum sebagai pilar untuk mencerdaskan bangsa, membangkitkan semangat bangga dan cinta tanah air, mempertahankan kepribadian bangsa, dan memperkokoh ketahanan nasional.

Konsep revitalisasi tidak hanya sekedar menghidupkan kembali apa yang sebelumnya pernah ada, tetapi menyempurnakan strukturnya, mekanisme kerjanya, menyesuaikan dengan kondisi baru, semangat baru dan komitmen baru.

Salah satu sasaran program revitalisasi museum ini adalah penataan kembali penyajian koleksi pada ruang tata pameran. Membuat suatu Konsep Penataan Ruang Pameran Tetap di dalam museum bukan pekerjaan mudah, Karena menata ruang pameran tetap berarti melakukan penataan interior ruang dalam lengkap dengan koleksi museum beserta keseluruhan alat kelengkapan pendukungnya. Secara konsep ruang, penataan ruang pameran tetap tidak lepas dari desain interior di dalam museum terutama desain ruang publik beserta ruang fasilitas penunjangnya.

Desain interior museum tidak dapat dipisahkan dengan penataan eksterior museum. Desain interior dan eksterior erat kaitannya dengan bangunan museum itu sendiri, (dalam lingkup pekerjaan rehabilitasi fisik bangunan museum). Konsep dasar desain interior ruang pameran tetap harus mengacu pada pertimbangan konservasi, keselamatan dan pengamanan benda koleksi pameran, dan kenyamanan pengunjung.

Dalam menjalankan implementasi kebijakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum dalam rangka revitalisasi museum, Museum kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki beberapa kendala ataupun permasalahan. Permasalahan yang pertama adalah tentang belum adanya rencana strategis (renstra) untuk tahun 2020-2024. Permasalahan kedua yaitu tentang anggaran dari kementerian yang kurang terhadap museum. Ketiga yaitu

bangunan tampak fisik luar museum yang masih terbilang kuno dan kurang modern.

Keempat adalah tentang sarana dan prasarana yang terdapat pada museum masih

belum *update* menggunakan teknologi terkini. Kelima masalah yang terdapat pada

museum ini adalah kurangnya promosi di sosial media yang dimana hal tersebut

berkaitan dengan kurangnya jumlah sumberdaya manusia yang ada di museum.

Keenam adalah belum adanya pendigitalisasian koleksi museum. Dan

permasalahan terakhir yaitu belum adanya penambahan koleksi museum yang

hingga saat ini masih sulit untuk ditambahkan kedalam museum sehingga koleksi

museum terkesan monoton dan tidak berganti-ganti.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian tentang revitalisasi. Dengan hal tersebut, Peneliti pun

mengambil judul penelitian yaitu **“Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam**

Rangka Revitalisasi Fisik Dan Koleksi Museum (Studi Pada Museum

Kehutanan Ir.Djamaluddin Suryohadikusumo Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan)”.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang

ditetapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum dalam rangka revitalisasi fisik dan

koleksi museum pada Museum Kehutanan Ir.Djamaluddin Suryohadikusumo

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan?

2. Bagaimana hasil, faktor Pendukung dan faktor Penghambat revitalisasi fisik dan koleksi museum pada Museum Kehutanan Ir.Djamaluddin Suryohadikusumo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yang telah ditetapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 tentang museum yang telah dilakukan oleh museum dalam rangka revitalisasi fisik dan koleksi museum.
2. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis hasil dari revitalisasi fisik dan koleksi museum pada Museum Kehutanan Ir.Djamaluddin Suryohadikusumo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah dilakukan oleh museum dalam rangka revitalisasi fisik dan koleksi museum.

I.4 Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini dapat diharapkan memberikan manfaat, baik secara akademis maupun praktisi tentang implementasi kebijakan pemerintah dalam rangka revitalisasi fisik dan koleksi museum pada Museum Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar dapat menjadi bahan kajian bagi peneliti selanjutnya.

1. Kontribusi Akademis

- a. Memberikan bahan referensi mengenai implementasi kebijakan pemerintah dalam rangka revitalisasi fisik dan koleksi museum.
- b. Memberikan pengetahuan dan sebagai sarana pembelajaran bagi peneliti dan akademisi dalam revitalisasi fisik dan koleksi museum.
- c. Memberikan bahan rujukan bagi pengelola museum untuk menerapkan dan mengembangkan program guna memaksimalkan revitalisasi agar lebih bermanfaat bagi masyarakat.

2. Kontribusi Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi agar museum dapat mengembangkan dan memaksimalkan kebijakan revitalisasi sebagai upaya untuk mengembalikan fungsi museum dan peningkatan citra museum.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan museum yang baik dan bermanfaat.

I.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I ini terdiri dari latar belakang penelitian yang dilakukan. Pada latar belakang terdapat alasan peneliti tertarik melakukan penelitian di Museum Kehutanan Ir. Djamiluddin Suryohadikusumo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menjelaskan secara singkat tentang museum tersebut, serta didukung oleh beberapa

teori menurut beberapa ahli. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan masalah yang selanjutnya menjadikan tujuan penelitian dan manfaat bagi pembaca, baik secara akademis maupun praktis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab II ini menjelaskan beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Teori yang digunakan dapat mendukung dan membantu peneliti dalam menentukan dan menganalisa data yang didapatkan dari lapangan. Teori yang digunakan yaitu, Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, Museum, Organisasi Sektor Publik, Museum dan Revitalisasi Museum.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab III menjelaskan metode apa saja yang digunakan peneliti. Metode penelitian ini terdiri dari jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, analisis data, serta keabsahan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV ini menjelaskan mengenai gambaran umum Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo, memaparkan hasil penelitian serta analisis data berdasarkan metode penelitian yang digunakan. Berdasarkan analisis data, maka akan diketahui hasil implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 di Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo.

BAB V : PENUTUP

Pada Bab V ini terdiri dari atas kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan. Kesimpulan dari hasil analisis data penelitian yang telah dilakukan.

Selain itu juga terdapat saran yang merupakan hasil rekomendasi pertimbangan dan pendapat penulis yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 pada Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan bagi peneliti dalam menyelesaikan penelitian, guna memperkaya teori dan juga berguna untuk membandingkan persamaan dan perbedaan masalah maupun fenomena yang pernah diteliti oleh peneliti. Penelitian terdahulu yang dipakai oleh peneliti sebagai acuan adalah penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Berikut ini peneliti akan mengkaji mengenai penelitian terdahulu dengan memaparkan perbedaan maupun persamaan penelitian terdahulu dengan yang akan dilakukan oleh peneliti:

1. Sofyan Sahuri (2015)

Penelitian ini menguji proses revitalisasi Museum Sonobudoyo Yogyakarta. Proses revitalisasi dalam aspek manajemen, aspek fisik, dan aspek gambar. Penelitian ini juga mengkaji tingkat keberhasilan proses revitalisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan proses dan tingkat keberhasilan dalam melaksanakan program revitalisasi museum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Ini studi count heaveley penelitian lapangan berfokus pada menyeluruh dan sistematis dan didukung oleh literatur penelitian dan data sekunder. Metode pengumpulan data adalah wawancara, observasi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Museum Sonobudoyo telah melakukan revitalisasi museum secara bertahap melalui revitalisasi phsically dan revitalisasi manajemen. Tetapi proses revitalisasi juga mengalami beberapa

hambatan antara lain aspek fisik, revitalisasi terutama perbaikan taman, aspek manajemen keuangan, dan revitalisasi gambar. Hasil penelitian ini juga menunjukkan tingkat keberhasilan revitalisasi Museum Sonobudoyo program pemerintah didukung "Gerakan Nasional Cinta Museum".

2. Irna Trilestari (2019)

Revitalisasi museum adalah upaya meningkatkan kualitas museum dalam melayani masyarakat yang sesuai dengan fungsinya sehingga museum dapat menjadi tujuan yang dirasakan sebagai kebutuhan untuk dikunjungi. Artikel ini menganalisis implementasi program revitalisasi museum di Museum Negeri Provinsi Lampung sebagai studi kasus, dengan fokus pada pengelolaan museum dalam upaya mewujudkan fungsinya sebagai lembaga yang melindungi, memanfaatkan, dan mengkomunikasikan koleksi sejarah kepada masyarakat. Hasil Penelitian studi kualitatif ini menemukan bahwa revitalisasi berhasil memperbaiki penyajian tata pameran tetap dan sistem informasi koleksi museum. Tingginya apresiasi publik dapat dilihat dari meningkatnya jumlah kunjungan ke museum, khususnya pada 2018 yang mencatatkan jumlah tertinggi, yaitu 105.025 kunjungan. Namun, aspek perawatan dan pemeliharaan belum menjadi perhatian utama revitalisasi sehingga masih dapat dilihat tampilan gedung dan tata pameran museum yang belum berubah.

3. Zevera Erinna Simamora (2019)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Museum Musik Dunia, Jatim Park 3, Kota Batu. Peneliti memperoleh data primer melalui hasil wawancara yang berkaitan dengan

rumusan masalah. Sedangkan data sekunder melalui literatur mengenai Museum Musik Dunia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 3 tahap yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan adalah daftar pertanyaan, catatan lapang, alat perekam suara, dan kamera. Peneliti melakukan analisis data dengan 2 teknik yaitu *explanation building* dan *time-series analysis*. Keabsahan data yang digunakan yaitu perpanjangan keikutsertaan.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa implementasi museum sebagai lembaga layanan informasi dan obyek wisata telah diterapkan oleh Museum Musik Dunia baik dalam strategi perencanaan dan pengelolaan. Museum ini memberikan konsep yang berbeda dan menarik di tengah perkembangan jaman dan masyarakat modern. Museum ini menyediakan koleksi di berbagai belahan dunia dan sejarah perkembangan seni musik. Koleksi yang disediakan lengkap dari jenis musik tradisional dan modern, informasi mengenai perkembangan seni musik dan musisi pun disediakan secara singkat, jelas, dan lengkap.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO.	Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Perbedaan
1.	Sofyan Sahuri (2015)	Revitalisasi Museum Sonobudoyo Yogyakarta	Proses revitalisasi Museum Sonobudoyo Yogyakarta dalam aspek manajemen, aspek fisik, dan aspek gambar dan tingkat keberhasilan proses revitalisasi	Jenis penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif	Perbedaan pada fokus dan lokasi penelitian

2.	Irna Trilestari (2019)	Implementasi Program Revitalisasi Museum Pada Museum Negeri Provinsi Lampung	Menganalisis implementasi program revitalisasi museum di Museum Negeri Provinsi Lampung sebagai studi kasus, dengan fokus pada pengelolaan museum dalam upaya mewujudkan fungsinya	Jenis penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Perbedaan lokasi dan fokus penelitian
3.	Zevera Erinna Simamora (2019)	Studi Implementasi Museum Sebagai Lembaga Layanan Informasi dan Obyek Wisata Pada Museum Musik Dunia, Jatim Park 3)	Implementasi museum sebagai lembaga layanan informasi dan obyek wisata	Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif	Perbedaan jenis penelitian, lokasi dan fokus penelitian

Sumber: Hasil olahan peneliti, 2021

II.2 Kebijakan Publik

II.2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya.

Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. Secara

terminologi pengertian kebijakan publik (public policy) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya.

Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah. Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip (dalam Winarno, 2002) mendefinisikan kebijakan public sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah.

Robert Eyestone sebagaimana dikutip (dalam Agustino, 2008) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Menurut , ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

- 1) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;
- 2) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh

Woll sebagaimana dikutip (dalam Tangkilisan & Saputro, 2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

James E. Anderson sebagaimana dikutip (dalam Islamy, 2009:17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

II.2.2 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji

kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip (dalam Winarno, 2002:32-34) adalah sebagai berikut:

a) Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b) Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada.

Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c) Tahap adopsi kebijakan

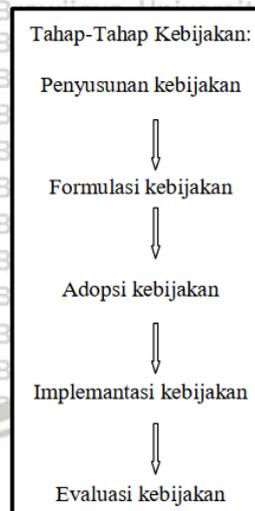
Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan.

d) Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e) Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum. Secara singkat, tahap –tahap kebijakan adalah seperti gambar dibawah ini :



Gambar 2.1 Tahap-Tahap Kebijakan

Sumber: William Dunn sebagaimana dikutip (dalam Winarno, 2002)

II.3 Implementasi Kebijakan Publik

II.3.1 Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Widodo (2009:88) implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan dasar yang berbentuk Undang-Undang atau juga berbentuk perintah atau keputusan yang penting atau keputusan badan peradilan, yang mana keputusan tersebut berguna untuk mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi menentukan tujuan yang ingin dicapai dan mengatur cara untuk proses implementasi. Selaras dengan Widodo, Menurut Mazmanian & Sabatier (1983:20) mengemukakan bahwa implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, tetapi dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting dan keputusan badan peradilan.

Berdasarkan pengertian implementasi diatas dapat disimpulkan implementasi merupakan suatu tindakan atau perbuatan atas suatu kebijakan.

kembali kepada hakikatnya bahwa kebijakan hanyalah sebuah impian atau rencana

dan produk hukum yang dibuat oleh pihak berwenang dengan tujuan dapat mengatur dan menjadi pedoman dalam penyelesaian masalah dilapangan.

Kebijakan yang telah dibuat tidak akan memiliki nilai apabila pihak yang berkaitan tidak mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat.

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang dilakukan setelah dikeluarkan arahan yang sah dari sebuah kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output dan outcome bagi masyarakat. Menurut (Van dan Van Horn, 1974) bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh organisasi pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

Mazmanian & Sabatier (1983) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan bertujuan untuk memahami apa yang terjadi sesudah sesuatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan, yang merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan- kegiatan yang timbul sesudah disahkan pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa.

II.3.2 Model Implementasi Kebijakan Publik

Terdapat beberapa macam model implementasi kebijakan publik yang telah dikemukakan oleh para ahli, diantaranya:

a. Model Implementasi Mazmanian Sabatier (1983)

Model ini disebut sebagai kerangka analisis implementasi. Menurut Subarsono (2011:94) terdapat tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan yakni, sebagai berikut:

1. Karakteristik dari masalah

Indikator karakter dari masalah adalah tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan, tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran, proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi dan cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.

2. Karakteristik kebijakan

Indikator dari karakter kebijakan adalah kejelasan isi kebijakan, seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis, besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut, seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar institusi pelaksana, kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana, dan tingkat komitmen aparat terhadap kebijakan.

3. Variabel Lingkungan

Indikator dari variabel lingkungan adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi, dukungan publik terhadap suatu kebijakan, sikap dari kelompok pemilih dan tingkat komitmen dan keterampilan dari implementor.

b. Model Implementasi George C. Edward III (1980)

Edward III menyatakan dua pertanyaan pokok mengenai implementasi kebijakan publik, yakni:

1. Hal-hal apa saja yang merupakan prasyarat bagi berhasilnya suatu implementasi?
2. Apa saja yang merupakan penghambat terhadap implementasi kebijakan?

Berangkat dari pertanyaan tersebut kemudian Edward III merumuskan empat faktor yang menjadi tolak ukur berhasil tidaknya suatu implementasi kebijakan.

Empat faktor tersebut menurut Edward III (dalam Widodo 2010), yakni:

1. Komunikasi

Komunikasi yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran, sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Didalam komunikasi terdapat tiga dimensi yaitu dimensi transmisi, dimensi kejelasan dan dimensi konsistensi.

2. Sumberdaya

Meskipun kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut

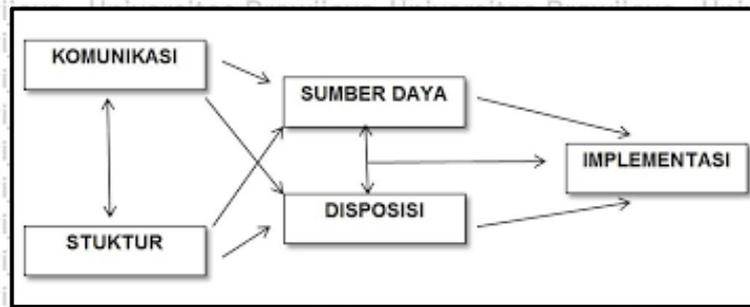
dapat berwujud sumber daya manusia yang berkompeten dibidangnya, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan.

3. Disposisi

Disposisi merupakan watak dan karakter yang dimiliki oleh seorang implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokrasi. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Apabila implementor memiliki sikap atau persepektif yang berbeda dengan pembuatan kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Didalam disposisi sendiri terbagi menjadi dua yaitu rekrutmen pegawai dan insentif.

4. Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Produce* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.



Gambar 2.2 Model Implementasi George C.Edward III

Sumber : (Tjilen et al., 2019)

c. Model Implementasi Donald Van Metter dan Carl Van Horn (1975)

Model implementasi ini berangkat dari argumen yang bahwasannya perbedaan dalam proses implementasi itu akan dipengaruhi oleh kebijakan yang akan dilaksanakan. Menurut Subarsono (2005) model implementasi Van Metter dan Van Horn ini dipengaruhi beberapa faktor yang saling berkaitan yakni sebagai berikut :

1. Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan tidak memiliki arah tujuan, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para implementor. Dengan mengukur kerja implemenasi kebijakan dapat menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para implementor, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

2. Sumber daya

Implementasi kebijakan perlu dukungan dari sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya bukan manusia. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang ada. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan ahli di bidangnya..

Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi.

3. Komunikasi penguatan aktivitas

Dalam implementasi kebijakan perlu dukungan dan kordinasi dengan instansi lain agar tujuan kebijakan dapat tercapai.

4. Karakteristik agen Pelaksana

Mencapai struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya akan mempengaruhi implementasi suatu kebijakan.

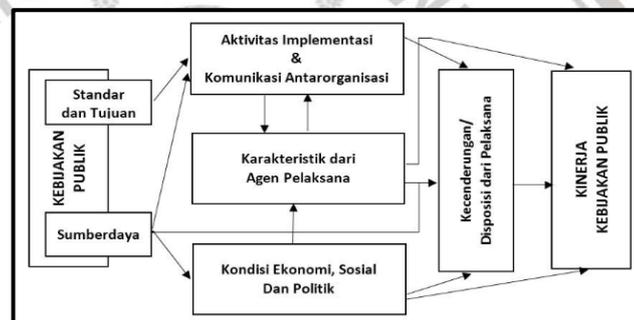
5. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Faktor ini mencakup sumber ekonomi, lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan dapat memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan yakni menolak atau mendukung, bagaimana sifat

opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

6. Disposisi Implementor

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting yakni, (a) respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; (b) kognisi, yaitu pemahamannya terhadap kebijakan; (c) intensitas disposisi implementor, preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.



Gambar 2.3 Model Implementasi Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Sumber : (Tjilen et al., 2019)

II.4 Organisasi Sektor Publik

II.4.1 Pengertian Organisasi Sektor Publik

Organisasi merupakan sekelompok orang yang bekerja sama secara terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu atau sejumlah sasaran yang telah ditetapkan bersama. Setiap organisasi mempunyai tujuan yang spesifik yang hendak dicapai dan memerlukan manajemen yang baik agar bisa mencapai tujuan tersebut. Tujuan organisasi tersebut dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif yang dapat dibagi lagi menjadi tujuan yang bersifat financial maupun *non-financial*.

Secara umum seringkali organisasi hanya dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu *profit organization* dan *non-profit organization*. Walaupun di kenyataan terdapat tipe lain dari organisasi yaitu *quasi-profit organization* dan *quasi-nonprofit*. Hal ini disebabkan karena adanya kesulitan untuk memberi batasan yang tegas antara tipe organisasi *pure-profit organization* dan *quasi-profit organization* dan antara *quasi-non profit organization* dan *pure-nonprofit organization*. Dengan pengelompokan tipe organisasi secara umum tersebut maka organisasi sektor publik merupakan *non-profit organization*.

Jones dan Pendlebury (dalam Ulum, 2008:7) mengemukakan bahwa: Istilah sektor publik dapat dipahami lebih jelas bila dihubungkan dengan istilah akuntan publik. Di Amerika Serikat sendiri istilah ini adalah untuk akuntansi swasta yang berpraktek untuk masyarakat, sedangkan di Inggris (Eropa) istilah sektor publik adalah untuk akuntan yang bekerja di organisasi pemerintah. Dengan demikian, istilah sektor publik yang umum dipahami adalah akuntansi untuk organisasi pemerintah.

Istilah “sektor publik” sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum, dan sosial) memiliki cara pandang dan defenisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Menurut Nordiawan (2009:1) sektor publik merupakan sebuah entitas ekonomi yang memiliki keunikan tersendiri. Disebut sebagai entitas ekonomi karena memiliki sumber daya ekonomi yang tidak kecil. Sektor publik juga melakukan transaksi –transaksi ekonomi dan keuangan, tetapi berbeda dengan entitas ekonomi lain, khususnya perusahaan komersial yang mencari laba, sumber daya ekonomi sektor publik dikelola tidak untuk tujuan mencari laba (nirlaba).

Munculnya sektor publik ini tidak terlepas dari sejarah. Awalnya, sektor publik ini muncul karena ada kebutuhan dari masyarakat secara bersama terhadap barang dan layanan tertentu. Untuk menghindari terjadinya alokasi dan distribusi barang atau layanan umum yang tidak adil maka pengaturan pengalokasian dan pendistribusiannya diserahkan kepada pihak (pengurus) tertentu. Warga masyarakat kemudian membayar sejumlah upeti (pajak) untuk mendukung pengaturan barang atau layanan umum oleh pengurus tersebut (Mahsun et al, 2011:5)

II.4.2 Karakteristik Organisasi Sektor Publik

Menurut Ulum (2008:9) karakteristik organisasi sektor publik atau organisasi yang tidak bertujuan untuk memupuk keuntungan adalah sebagai berikut:

a. Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembalinya atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.

b. Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut.

c. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas.

Sedangkan menurut Christensen et al (2007:6) menguraikan 3 karakteristik utama sektor publik yang intisarinya sebagai berikut :

1. Pemimpin tertinggi organisasi publik seperti Presiden atau Perdana Menteri dipilih melalui pemilu. Sehingga organisasi sektor publik yang ada di masyarakat memiliki tanggung jawab politik. Terlepas dari apakah organisasi publik dekat atau jauh dari kepemimpinan politik terdapat pemimpin politik yang terpilih secara demokratis di atas organisasi yang memiliki akuntabilitas tinggi.

Berbeda dengan perusahaan swasta, yang bertanggung jawab kepada dewan direksi yang dipilih oleh pemegang saham, organisasi publik bertanggung jawab kepada legislatif yang dipilih juga oleh rakyat melalui pemilu. Organisasi publik merupakan bagian dari suatu sistem pemerintahan dan menghadapi tantangan yang berbeda dengan sektor swasta. Sistem pemerintahan dipengaruhi oleh sistem politik masyarakat tidak seperti organisasi swasta yang terbatas pada orang-orang tertentu. Oleh karena itu organisasi sektor publik memiliki tanggungjawab yang lebih besar dan banyak dibandingkan dengan organisasi sektor publik.

2. Model organisasi publik berbeda dari banyak organisasi sektor swasta. Organisasi sektor publik memiliki model organisasi multifungsi. Model Organisasi multifungsi ini membuat organisasi sektor publik sangat rentan terhadap kritik. Ini dikarenakan dalam menjalankan organisasinya memerlukan banyak pertimbangan yang sangat sulit, seperti politik, partisipasi oleh pihak yang terkena dampak, penentuan sumber daya manusia, sensitivitas pengguna, transparansi, publisitas dan wawasan proses pengambilan keputusan, prediktabilitas, perlakuan yang sama, ketidakberpihakan, netralitas, kualitas layanan, kemandirian profesional, loyalitas politik, efisiensi dan efektivitas. Dalam menjalankan fungsinya pemerintahan tidak dapat membuat aturan dengan mudah karena harus sesuai dengan konstitusi dan disetujui oleh rakyat berbeda dengan sektor swasta yang tidak terlalu sulit dalam membuat aturan yang digunakan di organisasinya.

3. Sebagian besar organisasi publik berbeda dari organisasi swasta dalam bahwa mereka tidak beroperasi dalam pasar bebas dan kompetitif. Meskipun ada pembentukan BUMN yang ikut berkompetisi memperlihatkan ciri ini, tetapi hal ini dapat dijelaskan oleh beberapa argumen. Salah satu jenis argumen organisasi publik adalah ide bahwa pasar (sektor swasta) memiliki kapasitas terbatas untuk menangani masalah-masalah sehingga diperlukan intervensi organisasi publik. Selain itu organisasi sektor publik juga memperbaiki atau mengatasi masalah yang diciptakan oleh pasar, dimana pasar tidak mampu menyelesaikannya.

Menurut Nordiawan (2009:2) organisasi publik menjadi berbeda dan unik karena memiliki karakteristik sebagai berikut :

- Dijalankan tidak untuk mencari keuntungan financial

- Dimiliki secara kolektif oleh pihak publik

- Kepemilikan atas sumber daya tidak digambarkan dalam bentuk saham yang diperjualbelikan

- Keputusan-keputusan yang terkait kebijakan operasi didasarkan pada consensus

Dari uraian diatas kita dapat menarik benang merah bahwa organisasi sektor publik memiliki karakteristik yang unik karena organisasi ini melayani dan dimiliki oleh masyarakat luas. Organisasi sektor publik juga tidak mementingkan keuntungan melainkan pelayanan terhadap anggotanya. Sifat organisasi sektor publik yang unik ini menyebabkan sektor publik harus memperhatikan banyak aspek dalam pengambilan keputusan ketika menjalankan kegiatannya. Keputusan yang diambil oleh organisasi ini harus dapat diterima oleh mayoritas anggotanya.

II.5 Museum

II.5.1 Pengertian Museum

Menurut asal katanya, museum berasal dari bahasa Yunani “Mouseion”, yaitu kuil untuk Sembilan Dewi Muze, anak-anak Dewa Zeus yang tugas utamanya adalah menghibur. Dewi Muses melambangkan pengetahuan dan seni. Museum ini biasanya dikaitkan dengan koleksi barang antik atau seni. Museum biasanya memiliki perpustakaan. (Direktorat Museum, 2008). Dalam bahasa Latin museum adalah nama yang digunakan untuk bangunan universitas di jaman Alexandria tahun 1615, kemudian istilah mouseion digunakan sebagai tempat untuk studi dan perpustakaan, sedangkan di Inggris adalah sebagai bangunan untuk menyajikan

atau memamerkan (*display*) obyek, tercatat pertama kali 1683 (Direktorat Museum, 2008).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa museum /mu·se·um/ /muséum/ adalah gedung yang digunakan sebagai tempat untuk pameran tetap benda-benda yang patut mendapat perhatian umum, seperti peninggalan sejarah, seni, dan ilmu; tempat menyimpan barang kuno (KBBI, 2012).

Arti kata yang dipaparkan menurut KBBI ini lebih pada bangunan atau gedung yang digunakan sebagai wadah penyimpanan benda-benda bersejarah atau memiliki nilai sejarah, seni, dan ilmu pengetahuan.

Definisi museum berdasarkan International Council of Museum (ICOM) tahun 2007 adalah sebagai berikut: Museum adalah lembaga yang bersifat tetap yang tidak mencari keuntungan, (*not for profit*), diabdikan untuk kepentingan dan pembangunan masyarakat, serta terbuka untuk umum. Museum mengumpulkan, melestarikan, meneliti, mengkomunikasikan, memamerkan bukti-bukti bendawi manusia, bukan bendawi dan lingkungannya untuk tujuan pengkajian, pendidikan dan kesenangan.

Pengertian Museum menurut Peraturan Pemerintah Nomer 66 tahun (2015) tentang Museum, Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, melestarikan, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. Menurut A.C.Parker sebagaimana dikutip (dalam Trilestari, 2008), museum adalah lembaga yang secara aktif menjelaskan dunia, manusia, dan alam. Menurut Advanced Dictionary sebagaimana dikutip (dalam Trilestari, 2008), dalah sebuah gedung yang

didalamnya dipamerkan benda-benda yang memiliki nilai seni, sejarah, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Menurut Sutaarga (1990) museum adalah lembaga permanen yang memberi layanan untuk kepentingan masyarakat serta kemajuannya, tidak mencari keuntungan, terbuka untuk umum yang meneliti, memelihara, memamerkan, serta komunikasi beberapa benda pembuktian material manusia di dalam lingkungannya demi pendidikan, studi, dan rekreasi

Berdasarkan pengertian dan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa museum adalah tempat atau lembaga yang mengumpulkan, menyimpan dan memamerkan benda-benda yang dapat menjadi sumber pengetahuan seperti warisan sejarah, artistik, seni, sains dan lain-lain yang diperuntukan bagi masyarakat umum. Museum berfungsi mengumpulkan, merawat, dan menyajikan serta melestarikan warisan budaya masyarakat untuk tujuan studi, penelitian dan kesenangan atau hiburan.

Museum berkembang seiring berkembangnya ilmu pengetahuan. Sementara manusia semakin membutuhkan bukti-bukti otentik terkait dengan sejarah. Koleksi museum dapat diperiksa oleh para akademisi, mendokumentasikan keunikan dan sejarah komunitas tertentu, dan mendokumentasikan ide-ide yang berguna untuk masa depan. Benda yang disimpan biasanya berupa karya seni, fosil (sisa-sisa fosil makhluk hidup), artefak (alat produk budaya), manuskrip, dan sebagainya.

II.5.1 Jenis-Jenis Museum

Museum yang berdiri di Indonesia memiliki beberapa jenis yang dibedakan menurut Jenis koleksinya, Kedudukan, Penyelenggaraan dan Kriteria museum.

Jenis-jenis museum menurut Coleman (2012:36) menurut Jenis koleksinya antara lain:

1. Jenis Museum berdasarkan Jenis Koleksinya :

Menurut jenis koleksinya, museum dapat dibagi beberapa jenis, tetapi secara garis besar dapat dibagi dalam 2 bagian besar yaitu:

a. Museum Umum

Museum yang Koleksinya terdiri dari kumpulan bukti material manusia dan lingkungannya yang berkaitan dengan seni, disiplin ilmu dan teknologi. Contoh Museum Umum adalah Museum Mpu Tantular.

b. Museum Khusus

Museum yang Koleksinya terdiri dari kumpulan bukti material manusia dan lingkungannya yang berkaitan dengan salah satu cabang disiplin ilmu dan teknologi. Contoh Museum khusus adalah Museum Kebangkitan Nasional, Museum Wayang dan Museum Bahari.

2. Jenis Museum berdasarkan Kedudukan Museum :

Menurut kedudukannya, museum dapat dibagi menjadi 3 yaitu:

a. Museum Nasional

Museum yang koleksinya terdiri atas kumpulan benda yang berasal dari, mewakili, dan berkaitan dengan bukti material manusia dan lingkungannya dari seluruh wilayah Indonesia yang bernilai nasional.

b. Museum Provinsi

Museum yang koleksinya terdiri atas kumpulan benda yang berasal dari, mewakili, dan berkaitan dengan bukti material manusia dan lingkungannya dari dalam provinsi tertentu atau satu provinsi.

c. Museum Lokal

Museum yang koleksinya terdiri atas kumpulan benda yang berasal dari, mewakili, dan berkaitan dengan bukti material manusia dan lingkungannya dalam satu wilayah kabupaten atau kota madya.

3. Jenis Museum berdasarkan Penyelenggaraan Museum :

Menurut penyelenggaraannya, museum dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Museum Pemerintah

Museum yang diselenggarakan dan dikelola oleh pemerintah pusat atau pemerintah setempat.

b. Museum Swasta

Museum yang diselenggarakan dan dikelola oleh pihak swasta.

4. Jenis Museum berdasarkan Kriteria Museum :

a. Museum Seni

Museum yang memberikan sebuah ruang untuk pameran seni, biasanya merupakan seni visual, dan biasanya terdiri dari lukisan, ilustrasi, dan patung.

Koleksi dari lukisan dan dokumen lama biasanya tidak dipamerkan di dinding, akan tetapi diletakkan di ruang khusus.

b. Museum Sejarah

Museum yang memberikan edukasi terhadap sejarah dan relevansinya terhadap masa sekarang dan masa lalu. Beberapa museum sejarah menyimpan aspek kuratorial tertentu dari sejarah dari daerah lokal tertentu. Museum jenis ini memiliki koleksi yang beragam termasuk dokumen, artefak

c. Museum Maritim

Museum yang menspesialisasi terhadap objek yang berhubungan dengan kapal, perjalanan di laut dan danau.

d. Museum Otomotif

Museum yang memamerkan kendaraan .

e. Museum Open Air

Museum yang mengkoleksi dan membangun kembali bangunan tua di daerah terbuka luar. Biasanya bertujuan untuk menciptakan kembali bangunan dan suasana lansekap masa lalu.

f. Science Museum

Museum yang membahas tentang seputar masalah *scientific*, dan sejarahnya. Untuk menjelaskan penemuan-penemuan yang kompleks, pada umumnya digunakan media visual.

g. Museum Spesialisasi

Museum yang mengkhususkan pada topik tertentu. Contoh museum ini adalah museum musik, museum anak, museum gelas, dsb. Museum ini pada umumnya memberi edukasi dan pengalaman yang berbeda dibandingkan museum lainnya .

h. Museum Virtual

Museum yang berada di dunia maya berupa internet dimana tidak memiliki fisik museum dan isinya hanya berupa data.

II.5.2 Tugas dan Fungsi Museum

Keberadaan museum mempunyai tugas dalam perannya dalam masyarakat.

Tugas-tugas tersebut antara lain, mengadakan, melengkapi, dan mengembangkan objek penelitian ilmiah yang tersedia bagi siapapun yang memerlukan. Selain itu, museum juga mampu menyediakan sarana untuk kegiatan penelitian tersebut, disamping museum juga melakukan kegiatan penelitian sendiri untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan baru yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut. Tugas dan fungsi museum juga dikemukakan oleh Soetjipto (1991), Tugas museum tersebut antara lain :

1) Tugas Pengumpulan

Benda yang disimpan di dalam museum tidak bisa sembarangan. Benda-benda tersebut harus memenuhi syarat untuk dijadikan benda koleksi. Tugas pengumpulan juga tergantung pada jenis koleksi yang ingin disimpan dan dipamerkan di dalam museum.

2) Tugas Pemeliharaan

Dalam tugas ini menyangkut dua segi, yakni segi teknis dan segi administratif. Segi teknis merupakan tugas yang berupaya memelihara dan mengawetkan benda koleksi agar terjaga keawetannya dan tercegah dari segala kemungkinan pemusnahan atau kehilangan.

3) Tugas Pameran

Pameran merupakan pekerjaan yang khas dan paling utama bagi setiap museum. Benda-benda yang dipamerkan kepada pengunjung berfungsi untuk menyalurkan ilmu pengetahuan maupun memberi kenikmatan seni bagi benda-benda koleksi seni rupa.

4) Tugas Penyelidikan

Museum juga dapat berfungsi sebagai pusat penyelidikan ilmu pengetahuan. Benda-benda koleksi yang terdapat di museum dapat berupa perlengkapan prasarana studi dan penelitian, misalnya benda-benda dari zaman peradaban purba atau dari zaman manusia belum mengenal tulisan untuk menyatakan diri atau sejarahnya. Benda dari zaman purba tersebut bertugas untuk menerangkan langsung tentang suatu zaman kehidupan manusia purba.

5) Tugas Penyaluran Ilmu Pengetahuan

Tugas ini lebih bersifat sosio edukatif sehingga lebih banyak memanfaatkan koleksi museum dengan cara memberi penerangan yang dapat diterima oleh bermacam-macam jenis pengunjung. Tugas lain adalah menyelenggarakan acara-acara ceramah, pertunjukan dan pemutaran film-film yang berkaitan dengan benda-benda koleksi museum.

Selain memiliki tugas, museum juga memiliki fungsi, yaitu:

1) Tempat Rekreasi

Museum dengan benda-benda koleksinya yang berupa benda-benda seni budaya mengandung nilai estetika, indah, antik sebagai sumber penawar bagi para pengunjung yang lelah dalam menghadapi kesibukan sehari-hari.

2) Tempat Ilmu Pengetahuan

Benda koleksi museum dapat dimisalkan sebagai orang yang ingin berbicara. Para ahli yang dapat menginterpretasikan arti dari benda-benda tersebut dan dari hal tersebut masyarakat atau pengunjung dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Museum adalah alamat yang tepat bagi masyarakat yang mengadakan penyelidikan atau penelitian.

3) Sumber Informasi

Museum dalam arti modern adalah suatu lembaga yang secara aktif melakukan tugasnya dalam menerangkan dunia manusia dan alam, misalnya Museum Perjuangan yang bertugas menjelaskan alam perjuangan suatu bangsa.

4) Sebagai Pendidikan Kebenaran

Pengunjung bukan hanya sekelompok anak atau mahasiswa, tetapi terdiri dari manusia yang berlainan tingkat kecerdasan, tingkat pendidikan, kebangsaan, dan pandangan hidupnya. Pameran benda-benda di museum menimbulkan bermacam-macam pengaruh positif, diantaranya menimbulkan kesadaran tentang persoalan peristiwa sejarah, kehidupan binatang, pertumbuhan tanaman, perkembangan kebudayaan dan lain-lain. Pada intinya, benda koleksi mengajak pengunjung untuk berpikir logis, konstruktif, dan pragmatis.

Menurut Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dikutip (dalam Ardika, 2007), dipaparkan hasil musyawarah umum ke-11 International Council of Museum (ICOM) mengenai fungsi museum yang dilaksanakan di Denmark pada tanggal 14 Juni 1974. Adapun fungsi-fungsi museum tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan dan pengamanan warisan alam serta budaya.
- 2) Dokumentasi dan penelitian ilmiah.
- 3) Konservasi dan preservasi.
- 4) Penyebaran dan pemerataan ilmu untuk umum.
- 5) Pengenalan dan penghayatan kesenian.
- 6) Pengenalan budaya antardaerah dan antarbangsa.
- 7) Visualisas warisan alam dan budaya.
- 8) Cermin pertumbuhan peradaban umat manusia.
- 9) Pembangkit rasa takwa dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Selain kesembilan fungsi yang telah dikemukakan dalam musyawarah ICOM tersebut, para ahli museum berpendapat bahwa museum mempunyai tiga fungsi utama, yaitu:

- 1) Melaksanakan pelestarian terhadap berbagai benda atau artefak masa lalu yang dianggap penting.
- 2) Menyediakan sarana pendidikan dan ilmu pengetahuan dalam bentuk visual.
- 3) Sebagai tempat rekreasi yang dapat dijadikan tujuan wisata masyarakat.

II.6 Revitalisasi Museum

II.6.1 Pengertian Revitalisasi Museum

Revitalisasi adalah upaya untuk memfungsikan kembali/memvitalkan kembali/membenahi kembali suatu kawasan, bangunan, atau bagian kota yang dahulu pernah vital/hidup, akan tetapi kemudian mengalami kemunduran/degradasi. Skala revitalisasi ada tingkatan makro dan mikro. Menurut Danisworo & Martokusumo (2002) proses revitalisasi sebuah kawasan mencakup

perbaikan aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial. Pendekatan revitalisasi harus mampu mengenali dan memanfaatkan potensi lingkungan (sejarah, makna, keunikan lokasi dan citra tempat). Revitalisasi sendiri bukan sesuatu yang hanya berorientasi pada penyelesaian keindahan fisik saja, tapi juga harus dilengkapi dengan peningkatan ekonomi masyarakatnya serta pengenalan budaya yang ada. Menurut (Laretna, 2002) untuk melaksanakan revitalisasi perlu adanya keterlibatan masyarakat. Keterlibatan yang dimaksud bukan sekedar ikut serta untuk mendukung aspek formalitas yang memerlukan adanya partisipasi masyarakat, selain itu masyarakat yang terlibat tidak hanya masyarakat di lingkungan tersebut saja, tapi masyarakat dalam arti luas. Dalam arti harfiah Revitalisasi yakni “menghidupkan kembali”, maknanya tidak sekedar mengadakan/mengaktifkan kembali apa yang sebelumnya pernah ada, tetapi menyempurnakan strukturnya, mekanisme kerjanya, menyesuaikan dengan kondisi baru, semangatnya dan komitmennya. Kondisi Indonesia telah banyak berubah dan karenanya memerlukan adanya sistem penyuluhan yang “baru”.

II.6.2 Aspek Revitalisasi Museum

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dikutip (dalam Trilestari, 2019) menetapkan enam aspek revitalisasi museum untuk menyegarkan permuseuman Indonesia. Keenam aspek tersebut yaitu fisik, manajemen, program, jejaring, pencitraan, dan kebijakan. Beberapa aspek revitalisasi museum sebagai berikut :

1. Aspek Fisik

Untuk aspek fisik sendiri, paling tidak museum diharapkan bisa mengubah nuansanya menjadi modern agar nyaman dinikmati oleh pengunjung, tidak terasa tua dan seram lagi. Dalam penjelasan mengenai koleksinya, museum sebaiknya memiliki storyline agar pengunjung mendapatkan pengetahuan yang runut pada hal yang akan disampaikan. Luas ruangan yang memadai juga berperan agar pengunjung nyaman, juga dilengkapi dengan penyejuk udara dan cahaya lampu yang bisa membuat suasana menjadi hidup. Selain itu, agar pengunjung tidak mudah bosan serta lebih mudah belajar di museum, perlu ditambahkan teknologi informasi yang dominan, bisa berupa diorama, permainan interaktif, layar sentuh, film dan video, dan lain sebagainya.

Fasilitas yang disediakan oleh museum juga perlu diperhatikan. Minimal, sebuah museum memiliki fasilitas utama berupa ruang pameran tetap dan temporer, ruang administrasi untuk karyawan, toilet, ruang dan peralatan medis, internet, auditorium, alat-alat pengamanan gedung, fasilitas untuk lansia, penyandang disabilitas, serta ruang untuk ibu menyusui dan balita. Sedangkan untuk di luar gedung, paling tidak disediakan fasilitas berupa tempat parkir, pos satpam, taman, sarana ibadah, pagar pengaman, perpustakaan, *souvenir shop* atau *cafe*, panggung terbuka, genset, drainase yang baik, rumah dinas, guest house, kendaraan operasional, dan fasilitas lainnya. Jika memungkinkan, perlu juga menyediakan fasilitas berupa CCTV, ruang loker, pengatur suhu dan

kelembaban, alat komunikasi, sound system, ruang kontrol security, hotspot internet, pintu darurat, dan alat-alat peringatan dini darurat.

2. Aspek Manajemen

Untuk aspek manajemen, paling tidak ada enam revitalisasi manajemen yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah manajemen SDM. Museum perlu memiliki sumber daya manusia yang kompeten.

Selain kuantitas, perlu juga memperhatikan aspek kualitas dari SDM itu sendiri. Ini bisa diperbaiki dengan membuat sistem rekrutmen yang lebih baik, peningkatan standar kompetensi, adanya tunjangan jabatan fungsional atau remunerasi berbasis kinerja, serta penerapan reward and punishment bagi karyawan.

Dalam revitalisasi manajemen koleksi, perlu dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam hal pengadaan koleksi, registrasi, inventarisasi, dokumentasi database, katalogisasi, perawatan, pengamanan, penyimpanan, penelitian dan pengkajian, serta preparasi, penyajian, dan labelling. Sedangkan dalam manajemen pelayanan, museum perlu membuat SOP tentang technical guide, program layanan publik, pelayanan informasi melalui bahan-bahan publikasi, serta pelayanan khusus, misalnya untuk penyandang disabilitas, lansia, atau tamu negara.

Dalam hal keuangan, perlu melakukan manajemen keuangan yang lebih baik dalam bidang ketertiban sumber dana, penyusunan perencanaan anggaran, serta pembuatan laporan dan evaluasi.

Dalam revitalisasi manajemen marketing, museum perlu membuat bahan-bahan publikasi yang lebih modern dan kreatif, misalnya pembuatan brosur, leaflet, buku, spanduk, baliho, iklan, dan lain sebagainya. Museum sendiri harus bisa percaya diri untuk menjadi destinasi wisata yang akan dicari oleh masyarakat. Agar masyarakat lebih mengenal museum kita, perlu juga melakukan promosi program-program museum. Sedangkan untuk manajemen program, museum perlu membuat survei minat pengunjung, membuat program teknis, dan menyusun program sesuai kebutuhan museum dan pengunjung.

3. Program

Untuk aspek program, museum harus lebih kreatif dan inovatif dalam membuat program publik. Caranya bisa dengan mengundang para pengunjung baru agar datang ke museum, atau dengan mendatangi calon-calon pengunjung potensial.

4. Pencitraan

Untuk aspek pencitraan, museum perlu membuat hal-hal baru dan penyebaran informasi tentang perubahan yang lebih baik yang telah dilakukannya. Bisa melalui website, media sosial, maupun media iklan.

5. Kebijakan

Untuk aspek kebijakan, revitalisasi museum perlu melakukan pembenahan dalam status kelembagaan museum serta nomenklatur nya.

Perlu juga regulasi dalam penetapan benda cagar budaya dalam koleksi maupun bangunannya, penetapan standarisasi dan akreditasi museum,

juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis) pendirian museum, serta penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) museum yang diselaraskan dengan ketentuan internasional. Selain itu perlu diperhatikan kebijakan dalam bidang kerjasama, SDM, dan pendanaan.

6. Jaringan

Untuk aspek jaringan, museum perlu membangun koneksi-koneksi baru, baik dengan komunitas, sekolah, juga pihak lain. Jaringan ini penting, karena jika mereka telah mengenal museum kita, mereka akan menyebarkan kabar baik tentang museum kita, bahkan hingga bisa mengedukasi para calon pengunjung museum kita.

Berdasarkan keenam aspek revitalisasi museum, dapat dikatakan Agar revitalisasi museum ini bisa terlaksana dengan baik, perlu peran yang maksimal dari berbagai pihak. Pemerintah bisa membuat kebijakan, memfasilitasi, mengatur, menggerakkan, serta memonitor dan mengevaluasi kegiatan revitalisasi yang dilakukan oleh museum-museum. Badan pelestari atau pengembangan museum bisa memaksimalkan perannya dalam memelihara, menjaga, melakukan perawatan koleksi museum, meningkatkan pengunjung, serta melakukan kegiatan sosialisasi pada masyarakat.

Sebagai pengunjung museum, kita bisa mengambil peran untuk memberikan berbagai kontribusi yang positif bagi museum dan masyarakat, misalnya dengan bisa menjaga keaslian setiap koleksi, yaitu dengan tidak melakukan perusakan terhadap koleksi museum, membantu badan pelestari atau pengembangan museum untuk merawat dan menjaga baik koleksi maupun

museum, serta bisa ikut serta mengembangkannya, misalnya dengan mempublikasikannya pada khalayak umum agar semakin banyak pengunjung yang mendatangi museum.

Sedangkan komunitas bisa mengambil peran untuk terus bersemangat mengumpulkan orang-orang agar beminat mengunjungi museum, bisa membantu pihak museum juga dalam menyukseskan revitalisasi museum dengan menggelar acara positif di museum sehingga museum bisa dikemas menjadi pusat pendidikan, penelitian, dan rekreasi.

Agar revitalisasi museum bisa terlaksana dengan baik, semua pihak seharusnya bisa melaksanakan langkah-langkah strategis dalam menghidupkan kembali museum. Salah satunya adalah membangun paradigma bahwa museum adalah dari kita, oleh kita, dan untuk kita, atau dikenal dengan nama paradigma pengelolaan partisipatoris. Artinya, pengelolaan museum bukan lagi menjadi monopoli sebuah instansi, tetapi juga melibatkan masyarakat.

Langkah selanjutnya, pengelola museum harus mampu menjalin kerja sama yang baik dengan semua pihak, khususnya institusi pendidikan atau lembaga-lembaga yang intens pada kajian sejarah. Kerja sama dengan institusi pendidikan, misalnya, museum menjadi salah-satu sumber belajar sehingga pembelajaran sejarah menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Bisa juga pengelola museum membuat program museum school atau sekolah museum, sehingga semua orang yang ingin memperdalam seluk-beluk sejarah dapat memperoleh informasi yang akurat dan data yang lengkap.

Secara umum, pada dasarnya masyarakat mempunyai anggapan bahwa museum hanyalah tempat penyimpanan benda-benda sejarah dan benda purbakala sebagaimana diibaratkan sebagai lembaga pengembangan budaya dan peradaban manusia. Oleh karena itu melalui pembangunan dan peremajaan museum diharapkan gerakan pengenalan, penguatan dan apresiasi serta kepedulian akan identitas dan perkembangan budaya bangsa Indonesia tidak hanya sebuah cerita pembangunan akan tetapi akan tercermin dari banyaknya minat masyarakat baik secara nasional dan regional bahkan internasional untuk mengunjungi museum

II.6.3 Standarisasi Museum

Dalam artikel yang ditulis Wawan Yogaswara (2011) dalam bukunya “Bagaimana Mendirikan Museum”, menyatakan ada beberapa poin yang harus diperhatikan dalam mendirikan museum. Poin-poin yang dipaparkan oleh wawan ini mencakup lokasi hingga pengelolaan. Adapun persyaratan berdirinya sebuah museum (Yogaswara, 2011) sebagai berikut:

1. Lokasi Museum

Lokasi yang dipilih harus strategis dan sehat. Sehat dalam arti tidak terpolusi baik udara maupun air, dan daerah tersebut bukan daerah yang berlumpur ataupun tanah rawa.

2. Bangunan Museum

Bangunan museum dapat berupa bangunan baru ataupun memanfaatkan Gedung lama. Bangunan tersebut harus memenuhi prinsip-prinsip konservasi, agar koleksi museum tetap lestari. Bangunan museum tersebut minimal dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu, bangunan pokok dan bangunan

penunjang. Bangunan pokok terdiri dari ruang pameran tetap, ruang pameran temporer, auditorium, kantor pengelola, laboratorium konservasi, perpustakaan, bengkel preparasi, dan ruang penyimpanan koleksi. Bangunan penunjang terdiri dari ruang pos keamanan, museum shop, tiket bo, toilet, lobby, dan area parkir.

3. Koleksi

Koleksi merupakan syarat mutlak dan merupakan roh dari sebuah museum, maka koleksi yang akan disimpan dan didisplay harus memiliki kriteria dan batasan. Kriteria dan batasan ini sebagai tolok ukur agar museum tersebut tetap memiliki kualitas. Maka, koleksi museum harus : (1) mempunyai nilai sejarah dan nilai-nilai ilmiah termasuk nilai estetika, (2) harus diterangkan mengenai asal-usul benda tersebut secara historis, geografis dan fungsinya, (3) harus dapat dijadikan monumen jika benda tersebut berbentuk bangunan yang berarti juga mengandung nilai sejarah, (4) dapat diidentifikasi mengenai bentuk, tipe, gaya, fungsi, makna, asal secara historis dan geografis, genus untuk biologis, atau periodenya (dalam geologi, khususnya untuk benda alam), (5) harus dapat dijadikan dokumen, apabila benda itu berbentuk dokumen dan dapat dijadikan bukti bagi penelitian ilmiah, (6) harus merupakan benda yang asli bukan tiruan apabila benda asli sudah tidak layak display atau benda asli mudah rusak benda tiruan atau duplikat bisa dipamerkan, (7) harus merupakan benda yang memiliki nilai keindahan (master piece), dan harus merupakan benda yang unik, yaitu tidak ada duanya.

4. Peralatan museum

Museum harus memiliki sarana dan prasarana museum berkaitan erat dengan kegiatan pelestarian, seperti vitrin, sarana perawatan koleksi AC, dehumidifier, dll, pengamanan CCTV, alarm system, dll, lampu, label, dan lain-lain.

5. Organisasi dan Ketenagakerjaan

Pendirian museum ditetapkan secara hukum yang dimana museum harus memiliki organisasi dan ketenagaan di museum, yang sekurang-kurangnya terdiri dari kepala museum, bagian administrasi, pengelola koleksi kurator, bagian konservasi -perawatan, bagian penyajian preparasi, bagian pelayanan masyarakat dan bimbinganedukasi, serta pengelola perpustakaan.

6. Sumber Dana

Museum harus memiliki sumber dana tetap dalam penyelenggaraan dan pengelolaan museum.

Pendirian museum harus memiliki tujuan yang jelas, dan juga harus memiliki perencanaan (master plan) yang matang. Perencanaan pendirian museum harus menjelaskan beberapa aspek, aspek-aspek perencanaan pendirian museum antara lain (Yogaswara, 2011) :

1. Jenis

Jenis museum ditentukan terlebih dahulu, karena menyangkut tindakan selanjutnya, baik bangunan maupun koleksi yang akan diadakan serta kebijakan lainnya.

2. Koleksi

Koleksi-koleksi yang akan diadakan perlu direncanakan, dan harus juga melakukan pembatasan atau seleksi sesuai dengan tujuan dan kemampuan biaya yang tersedia. Perlu diketahui bahwa koleksi museum selain diadakan secara pembelian (imbalan jasa), dapat juga diadakan dari hibah atau pemberian, dan tukar-menukar.

3. Lokasi

Lokasi yang dipilih bukan untuk kepentingan pendirinya, tetapi untuk masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, ilmuwan, wisatawan, dan masyarakat umum lainnya.

4. Bangunan

Bangunan museum harus berdasarkan persyaratan tertentu, dengan mempertimbangkan beberapa hal, seperti bentuk bangunan, bagian-bagian atau ruangan-ruangan yang akan dibangun, luas bangunan, dan bahan-bahan yang digunakan.

5. Peralatan

Peralatan perlu direncanakan jenis-jenis peralatan yang akan diadakan, baik peralatan teknis (pameran, pemberian informasi, perawatan, dan kegiatan kuratorial), maupun peralatan kantor.

6. Ketenagaan

Faktor ketenagaan merupakan hal penting dari suatu organisasi. Rencana pengadaan tenaga harus ditangani secara baik, museum harus memilih

tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan menguasai masalah teknis permuseuman dan ilmu yang menunjang, dan tenaga manajerial.

Syarat-syarat yang sudah disortir oleh Awan Yogaswara menekankan enam aspek yang menjadi landasan dalam pendirian museum. Aspek-aspek yang menjadi syarat inilah yang akan menjadi acuan dalam perancangan dan perencanaan museum Iklan.



BAB III

METODE PENELITIAN

III.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Denzin dan Lincoln (dalam Moleong, 2007) adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang bersifat umum terhadap kenyataan sosial dari sudut pandang partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, namun diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian dan kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan – kenyataan tersebut Ruslan & Rosady Ruslan SH (2018). Penggunaan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan dan mendapatkan pemahaman mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam rangka Revitalisasi Koleksi Museum pada Museum Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

III.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian sangat penting ada dalam sebuah penelitian, dikarenakan fokus penelitian berguna untuk membatasi masalah penelitian agar tidak melebar kemana – mana. Fokus penelitian menurut Moleong (2007) merupakan segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian peneliti, dalam hal ini mengharuskan data – data yang diperlukan untuk suatu penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang

telah disebutkan pada bab sebelumnya, penelitian Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam rangka Revitalisasi Fisik dan Koleksi Museum pada Museum Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki fokus sebagai berikut:

1. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 tentang museum dalam rangka revitalisasi fisik dan koleksi di Museum Kehutanan Ir.Djamaluddin Suryohadikusumo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggunakan model pendekatan implementasi kebijakan Edward III dilihat dari variabel berikut:

a. Komunikasi

Mencakup transmisi, kejelasan dan konsistensi dalam melaksanakan implementasi kebijakan tersebut.

b. Sumberdaya

Mencakup pelaksana kebijakan yaitu Pejabat Museum Kehutanan serta fasilitas yang disediakan untuk melaksanakan implementasi kebijakan tersebut.

c. Disposisi

Melihat bagaimana sikap pelaksana kebijakan bersikap dan melaksanakan implementasi kebijakan tersebut.

d. Struktur birokrasi



Mencakup *Standart Operating Prosedure* (SOP) dan fragmentasi implementasi kebijakan.

2. Hasil, Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dari revitalisasi fisik dan koleksi museum pada Museum Kehutanan Ir.Djamaluddin Suryohadikusumo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

III.3 Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian menurut Nasution (2003) merupakan tempat atau lokasi sosial penelitian yang dicirikan oleh adanya unsur yaitu pelaku, tempat, dan kegiatan yang dapat di observasi. Dalam menentukan lokasi penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan teori substansif dan menjajaki lapangan serta mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan (Moleong, 2007). Dalam penelitian ini lokasi penelitian dilaksanakan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang beralamat di Jl. Jenderal Gatot Subroto, DKI Jakarta, Jakarta Pusat 10270, Gedung Manggala Wanabakti Blok VI. Sedangkan terkait dengan situs penelitian, situs penelitian merujuk pada objek yang akan dilakukan suatu penelitian. Menurut Sugiyono (2014) menjelaskan mengenai objek penelitian adalah sebagai suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Situs penelitian diperlukan untuk memperoleh data yang akurat dan relevan. Situs di dalam penelitian ini adalah Museum Kehutananan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Alasan pemilihan lokasi dikarenakan Museum Kehutananan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan salah satu museum

yang telah melaksanakan revitalisasi fisik dan koleksi dalam rangka perbaikan dan peningkatan layanan publik. Selain itu, masyarakat masih banyak yang belum mengetahui bahwa revitalisasi yang telah dilakukan di Museum Kehutananan Ir.Djamaluddin Suryohadikusumo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan pelayanan dan meningkatkan ketertarikan kunjungan, untuk itu peneliti ingin mengetahui sejauh mana perbedaan dan dampak dari dilakukannya revitalisasi museum secara fisik dan koleksi yang dilakukan oleh Museum Ir.Djamaluddin Suryohadikusumo Kehutananan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum.

III.4 Sumber Data

Sumber data merupakan tempat memperoleh data dan informasi penting untuk menunjang penelitian. Penelitian ini memperoleh data dari dua jenis sumber data yaitu, sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan jenis data utama yang diperoleh serta dikumpulkan secara langsung oleh peneliti pada saat sedang melakukan penelitian. Menurut Moleong (2007) sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tapes, pengambilan foto atau film. Pencatatan data utama diperoleh melalui proses wawancara atau pengamatan secara mendalam. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan pengamatan secara



mendalam dengan beberapa informan yang berkaitan dengan penelitian. Adapun yang akan menjadi informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bapak Ir. Samidi, M.Sc. sebagai Kepala Biro Umum Setjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- b. Dyah Herlin Widiyowati, SH sebagai Kepala Sub Bagian Pengelolaan Karya Cetak dan Kepustakaan.
- c. Yulianti Fajar Wulandari, M.I.Kom sebagai Pejabat Pengelola Museum.
- d. Asep Sutisna sebagai Pengelola Museum.
- e. Masyarakat yang telah mengunjungi museum di Museum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti. Data sekunder dapat diperoleh melalui literatur seperti buku, jurnal, artikel, jurnal, foto, berita dan dokumen, serta data sekunder dapat diperoleh melalui internet atau Website yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu dokumen yang berhubungan dengan proses sebelum dan sesudah dilakukannya revitalisasi fisik dan koleksi seperti ruangan, tata letak koleksi, jumlah informasi kunjungan dalam sebulan sebelum pandemi, serta data sekunder peneliti peroleh dari website resmi Museum Kehutanan Ir.Djamaluddin Suryohadikusumo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (<http://muspera.menlhk.go.id/>).

III.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang nantinya akan menjadi jawaban atas permasalahan penelitian.

Menurut Creswell, (2016) terdapat empat cara dalam mengumpulkan suatu data yaitu observasi, wawancara, dokumen dan materi audio-visual. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati dan mencatat kejadian yang ada dilapangan secara langsung dengan panca indera yang dimiliki agar dapat memperoleh data dan informasi yang berguna untuk menjawab permasalahan penelitian. Teknik observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui tentang revitalisasi museum secara fisik dan koleksi yang dilakukan oleh Museum Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan jumlah kunjungan dan daya tarik kepada masyarakat.

2. Wawancara

Wawancara menurut Sugiyono (2014) merupakan cara mengumpulkan data dengan cara tatap muka langsung dan melakukan tanya jawab terhadap permasalahan yang berkaitan dengan fokus penelitian guna mendapatkan informasi atau data yang dibutuhkan. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur. Menurut Moleong (2011) wawancara terstruktur merupakan wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan

diajukan. Informan dalam penelitian ini yaitu oleh Pejabat Pengelola Museum dan masyarakat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Bungin (2007) merupakan teknik yang digunakan untuk menelusuri data historis yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen dapat berupa data yang berbentuk laporan atau foto kegiatan yang dapat menjadi data pendukung penelitian. Peneliti melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan revitalisasi fisik dan koleksi museum di Museum Kehutanan Ir.Djamaluddin Suryohadikusumo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa dokumentasi fisik dan koleksi museum sebelum dan sesudah revitalisasi, jumlah pengunjung dan agenda kegiatan museum sebelum pandemi, dan hasil *feedback* dari pengunjung terkait pelayanan yang diberikan oleh museum saat melakukan kunjungan sebelum dan saat pandemi berupa lembar *form* penilaian, kritik dan saran.

III.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh dan mengumpulkan data serta informasi, berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Peneliti

Peneliti termasuk salah satu instrumen penelitian karena peneliti berperan dalam menetapkan fokus penelitian, mencari dan mengumpulkan data penelitian,

melakukan analisis data dan mengartikan data serta membuat kesimpulan atas apa yang telah ditemukan.

2. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara merupakan deretan pertanyaan wawancara yang telah disiapkan sebelumnya agar peneliti fokus pada permasalahan penelitian. Pedoman wawancara dalam penelitian ini dibuat terstruktur sesuai dengan kapasitas informan. Pedoman wawancara pada penelitian ini berjumlah dua pedoman yang terdiri dari pedoman wawancara untuk oleh Pejabat Museum, pedoman wawancara untuk pengelola museum.

3. Perangkat penunjang

Perangkat penunjang meliputi buku catatan dan alat tulis untuk mencatat hasil wawancara, serta kamera untuk mengambil gambar penunjang penelitian dan recorder untuk merekam percakapan pada saat wawancara.

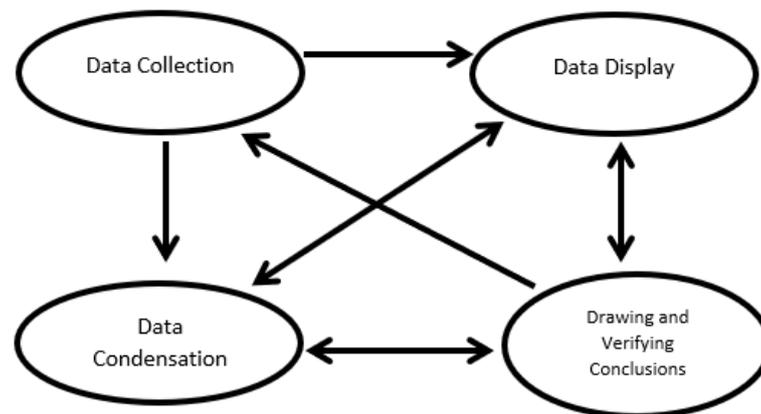
III.7 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu kegiatan untuk memaknai data yang telah diperoleh dan dikumpulkan dari sumber data. Analisis data dapat dilakukan dengan mengelompokkan data, menjabarkan hasil data, memilih data yang dianggap penting dan membuat kesimpulan yang menjadi hasil dari penelitian.

Menurut Bogdan (dalam Sugiyono, 2014) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data mempunyai

prinsip, yaitu untuk mengolah data dan menganalisis data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna. Jadi dapat disimpulkan bahwa analisis data merupakan cara membaca data yang telah didapat untuk kemudian disusun agar mudah dipahami dan disusun untuk diteruskan ke orang lain.

Analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif Milles, Huberman, dan Saldana (2014:12). Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis data model interaktif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, aktifitas dalam analisis data ini yaitu:



Gambar 3 1 Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman

Sumber : (Miles & Huberman, n.d.)

Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Interactive Model

dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclutions). Mengenai keempat alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Menurut (Herdiansyah, 2010), pengumpulan data ini dilakukan untuk mendapatkan sejumlah data yang diperlukan peneliti dengan melakukan pengumpulan data sesuai dengan pedoman yang sudah disiapkan. Pada penelitian ini proses analisis data diawali dengan melakukan observasi secara langsung pada objek penelitian dan melakukan wawancara dengan informan kunci dan informan pendukung yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu implementasi kebijakan pemerintah dalam rangka revitalisasi fisik dan koleksi museum. Tidak hanya itu, peneliti juga melakukan dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan revitalisasi fisik dan koleksi museum untuk mendapatkan data sekunder sebagai data pendukung penelitian tentang revitalisasi fisik dan koleksi museum.

2. Data Kondensasi (*Data Condensation*)

Kondensasi data merupakan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, penguraian, dan / atau transformasi data yang muncul dari catatan lapangan tertulis, transkrip wawancara, dokumen, dan materi

empiris lainnya. Tujuan dari kondensasi data ini yaitu untuk mempermudah peneliti dalam mencari data yang sesuai dengan penelitiannya. Proses kondensasi data ini dilakukan setelah peneliti mendapatkan data lapangan baik dari catatan lapangan hasil dari observasi, transkrip wawancara dengan informan kunci dan informan pendukung, serta data-data sekunder pendukung penelitian, yang selanjutnya dipilah-pilah berdasarkan fokus penelitian yang sudah ditetapkan. Data yang diperoleh dari proses pengumpulan data mengenai implementasi kebijakan pemerintah dalam rangka revitalisasi fisik dan koleksi museum kemudian dipilah. Kemudian dikategorikan dan dirangkum sesuai dengan fokus yang sudah ditentukan.

3. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data bisa diartikan sebagai sekumpulan informasi yang tersusun untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan dari penelitian. Menurut Sugiyono (2011), melalui penyajian data maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Penyajian data berguna untuk kemudahan dalam memahami apa yang terjadi di lapangan. Penyajian data dilakukan dengan menyajikan data-data yang didapat dari catatan lapangan, transkrip wawancara dan dokumen pendukung yang sudah dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, *flowchart*, dan lain sebagainya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penyajian data dalam bentuk uraian

singkat dengan memberikan gambaran umum mengenai Museum Kehutanan Ir.Djamaluddin Suryohadikusumo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai lokasi penelitian dan proses implementasi kebijakan revitalisasi yang dimulai dari perencanaan hingga hasil akhir dari revitalisasi.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Drawing and Verifying Conclusions*)

Langkah keempat atau terakhir pada kegiatan analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Menurut Sugiyono (2011) kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah menemukan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa kausal, interakti, hipotesis, atau teori. Penarikan kesimpulan merupakan verifikasi data yang dilakukan secara terus menerus selama kegiatan penelitian dilakukan. Verifikasi dilakukan mulai pertama memasuki lapangan dan juga selama proses pengumpulan data guna mencari pola, tema, hubungan persamaan, dan hal-hal yang terjadi dalam penelitian yang selanjutnya data-data tersebut diperoleh untuk ditinjau ulang agar mendapatkan data yang valid.

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini akan dilakukan ketika pengumpulan data dan analisis implementasi kebijakan pemerintah yang dilakukan pada museum Ir.Djamaluddin Suryohadikusumo sudah diidentifikasi dan dibandingkan dengan teori yang ada. Pada tahapan ini peneliti mengambil intisari



dari semua hasil identifikasi maupun perbandingan dengan teori untuk diringkas menjadi kesimpulan penelitian.

Kebermanfaatan analisis data Miles and Huberman (2014) dalam penelitian ini adalah membantu peneliti memperoleh data hingga jenuh sehingga diperoleh data atau informasi yang lebih kredibel. Tolak ukur kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru dengan melalui aktivitas pengumpulan data, yang selanjutnya mereduksi data untuk kemudian data disajikan dan ditarik kesimpulan. Analisis data ini dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama memasuki lapangan dan setelah selesai dari lapangan.

III.8 Keabsahan Data

Menurut Connaway & Powell (2010) keabsahan data merupakan upaya untuk menghasilkan tanggapan dari informan untuk dapat merespon jawaban yang diinginkan dengan tujuan klarifikasi, eksplorasi lebih lanjut, dan contoh-contoh.

Moleong (2011) menjelaskan bahwa untuk menetapkan keabsahan (*truthworthiness*) data diperlukan Teknik pemeriksaan Pelaksanaan. Teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferbility*), kebergantungan (*dependanbility*), dan kepastian (*confirmability*).

Pada penelitian ini peneliti menggunakan kriteria keabsahan data yaitu uji kredibilitas. Uji kredibilitas yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan triangulasi. Menurut Sugiyono (2014) triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai

teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Sugiyono juga membedakan triangulasi menjadi tiga jenis, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Jenis triangulasi yang digunakan peneliti dalam pengujian kredibilitas penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber menurut Sugiyono (2014) adalah untuk menguji kredibilitas data yang telah diperoleh dari informan utama dengan cara menanyakan kebenaran data kepada informan tambahan. Dengan menggunakan teknik triangulasi sumber, maka peneliti dapat membandingkan informasi yang diperoleh melalui informan-informan yang berbeda. Peneliti dapat membandingkan jawaban dari masing-masing narasumber dengan data yang diperoleh dari hasil observasi, museum dan gambar foto yang berkaitan dengan revitalisasi fisik dan koleksi pada Museum Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedangkan Triangulasi Teknik menurut Sugiyono (2014) adalah teknik untuk menguji kredibilitas data kepada sumber yang sama tapi dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuisioner. Bila dengan tiga teknik tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Pada triangulasi Teknik ini peneliti menggunakan observasi partisipasi pasif, wawancara mendalam, dan analisis data sekunder untuk sumber data yang sama yang berkaitan dengan revitalisasi fisik dan koleksi pada Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

IV.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

IV.1.1 Profil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan lingkungan hidup, dan kehutanan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan penggabungan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh seorang menteri yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Siti Nurbaya Bakar.

Pada masa Pemerintahan Presiden Jokowi Kementerian Kehutanan digabungkan dengan Kementerian Lingkungan Hidup menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berikut nama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebelum digabung :

- Lingkungan Hidup :

1. Kementerian Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Kemeneq PPLH, 1978-1983)
2. Kementerian Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (Kemeneq KLH, 1983-1993)
3. Kementerian Negara Lingkungan Hidup (Kemeneq LH, 1993-2005)

4. Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen LH, 2005-2014)

- Kehutanan :

1. Direktorat Jenderal Kehutanan, Departemen Pertanian (sampai dengan tahun 1983)

2. Departemen Kehutanan (1983-1998)

3. Departemen Kehutanan dan Perkebunan (1998)

4. Departemen Kehutanan (1998-2005)

5. Kementerian Kehutanan (2005-2014)

Setelah Presiden Jokowi menjabat pada 2014, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan diabungkan menjadi satu yang bernama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar koordinasi dua kementerian tersebut menjadi satu dikarenakan masih terkait dalam satu lingkup bidang yang sama.

IV.1.2 Tugas dan Fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

3. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan, pengelolaan keanekaragaman hayati, peningkatan daya

dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

5. Pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

6. Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

7. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

8. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

9. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

10. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

IV.1.3 Budaya Kerja Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan beberapa nilai organisasi sebagai pedoman bagi seluruh karyawan dalam menjalankan tugasnya, yang terdiri dari :

- a. *Stewardship* : Melaksanakan amanah para stakeholder dan meninggalkan *legacy*.
- b. *Excellence* : Memberikan hasil yang terbaik dalam setiap tugas.
- c. *Integrity* : Selalu menerapkan standar etika yang tinggi dan memenuhi komitmen setiap tugas.
- d. *Teamwork* : Komitmen untuk selalu bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama.

IV.2 Gambaran Umum Situs Penelitian

IV.2.1 Profil Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo

Museum Ir.Djamaludin berawal dari nama museum manggala wanabakti sejak berdiri tahun 1983. Museum Ir.Djamaludin Suryohadikusumo atau biasa disebut Muspera (Museum, Perpustakaan dan Arboretum) merupakan satuan kerja yang berada dibagian Tata Usaha Kementerian, Sub. Bagian Karya Cetak dan Kepustakaan, Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Muspera (Museum, Perpustakaan dan Arboretum) mulai dibina pada bulan Agustus 1983 dibawah struktur organisasi Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti. Sejak bulan Juli 2012 dikelola oleh Kementerian Kehutanan yang saat ini berubah menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena adanya penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan dikabinet kerja 2014-2019 oleh Presiden Joko Widodo. Melalui surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor: SK.525/Menlhk-Setjen/2015 Muspera (Museum, Perpustakaan dan Arboretum) ditetapkan dengan nama Museum Ir. Djamaludin Suryohadikusumo, Perpustakaan Ir. Djamaludin Suryohadikusumo menempati ruang Blok VI kompleks gedung Manggala Wanabakti sedangkan nama Taman Hutan Persahabatan berubah nama menjadi Arboretum Ir. Lukito Daryadi, M.Sc yang berlokasi di Blok VII kompleks gedung Manggala Wanabakti. Museum kehutanan sendiri yaitu merupakan jenis museum khusus atau tematik dengan tema tertentu yang disesuaikan dengan pengelolanya.

Kedudukan Museum Kehutanan dan Taman Hutan pada awalnya berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 yang

ditetapkan tanggal 16 Januari 2012 adalah Gedung Pusat Kehutanan dan Taman Hutan Manggala Wanabakti. Pada tanggal 16 November 2015 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.525/Menlhk-Setjen/2015 Museum Kehutanan dan Taman Hutan berubah nama dan ditetapkan menjadi Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo KLHK dan Arboretum Ir.Lukito Daryadi, M.Sc. Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri tersebut menyatakan bahwa kedudukan museum dan taman hutan langsung di bawah pemerintah pusat. Sumber pendanaan dalam penyelenggaraan museum adalah menggunakan dana anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setiap tahunnya.

Museum kehutanan ini unik karena pertama merupakan museum bertema kehutanan yang merupakan satu-satunya di Jakarta karena dimiliki oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan serta berada langsung dibawah pemerintah pusat. Museum ini mempunyai koleksi hidup dan koleksi benda mati.

Untuk koleksi mati di museum dan koleksi hidup di arboretum. Jika merujuk pada aturan unesco, museum itu tidak hanya mengoleksi benda mati warisan sejarah, tetapi juga benda hidup karena merupakan warisan alam. Museum ini memberikan pengalaman yang berbeda kepada pengunjungnya karena mereka bisa mendapatkan informasi lebih seperti misalnya kalau pengunjung berkunjung, mereka dapat melihat botol minyak kayu putih dipajang sebagai salah satu hasil hutan non kayu, tapi nanti mereka bisa belajar seperti apa dan darimana asalnya minyak kayu putih.

Mereka bisa ke koleksi yang hidup di arboretum. Mereka bisa melihat koleksi pohon minyak kayu putih yang hidup. Selain itu, mereka juga bisa mendapatkan

pengalaman memetik daun serta mengetahui bahan dasar dari minyak kayu putih tersebut. Oleh sebab itu, museum ini tidak hanya menawarkan pengalaman untuk melihat koleksi saja tetapi juga dapat ikut melihat langsung koleksi hidupnya.

Pada Tahun 2015 dilakukan revitalisasi fisik dan koleksi di Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo KLHK dengan faktor pendukung yaitu sumber daya manusia dan anggaran, koleksi khusus, lokasi museum serta fasilitas dan layanan museum. Namun, terdapat juga faktor penghambat dalam proses revitalisasi seperti anggaran, dukungan pimpinan, pembinaan pengelola museum dan kerja sama.

IV.2.2 Visi Misi Museum

- Visi :

Sebagai Pusat Informasi dan Dokumentasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Indonesia

- Misi :

1. Mendokumentasikan segala kegiatan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang bernilai sejarah dari zaman ke zaman.
2. Memberikan edukasi, informasi, dan rekreasi kepada pengunjung
3. Berunsur ilmiah sehingga menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lingkungan hidup dan kehutanan
4. Berdaya hidup, sehingga dapat di nikmati oleh masyarakat dan ditekuni oleh para ilmuwan

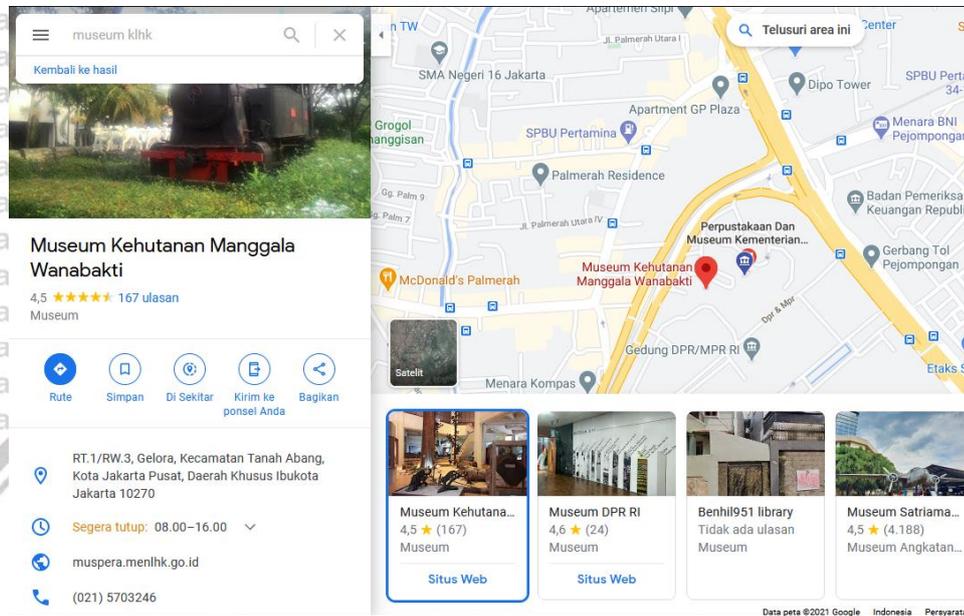
IV.2.3 Tujuan dan Fungsi Museum

Tujuan awal dari dibentuknya museum kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo adalah merupakan impian dari para pejuang rimbawan sebagai forestry center. Museum Kehutanan sendiri diharapkan mempunyai tempat yang lengkap untuk sarana pengetahuan, informasi, edukasi, dan peninggalan sejarah yang dibuat untuk generasi selanjutnya. Kunjungan ke dalam museum dapat melihat benda peninggalan di museum dan kunjungan keluar museum dapat melihat koleksi lengkap atau hidup yang ada didalam museum di arboretum/hutan kota. Untuk fungsi dari museum kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo ini adalah ingin ada peninggalan yang baik dari para pejuang rimbawan ini untuk generasi selanjutnya mengenai kehutanan di Indonesia. Komplek manggala ini menghimpun semua tentang kehutanan. Ada kantor pemerintah, swasta, perpustakaan, arboretum, masjid, dan lain-lain lengkap ada disini. Para peninggalan dari rimbawan ini memberikan pengetahuan melalui komplek manggala wanabakti.

IV.2.4 Lokasi dan/atau Bangunan Museum

Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo KLHK mulai dirintis pada rentang Tahun 1980, dilanjutkan dengan pembangunan fisik bangunan pada tahun 1982 dan selesai dibangun pada Tahun 1983 yang kemudian diresmikan oleh presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto. Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo KLHK terletak di Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270, Gedung Manggala Wanabakti blok VI, Komplek Kementerian Lingkungan Hidup. Lokasi museum sangat strategis karena berada di tengah pusat kota, sehingga akses menuju museum mudah dijangkau. Berikut adalah gambar peta

lokasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Museum Kehutanan
 Ir.Djamaludin Suryohadikusumo KLHK :

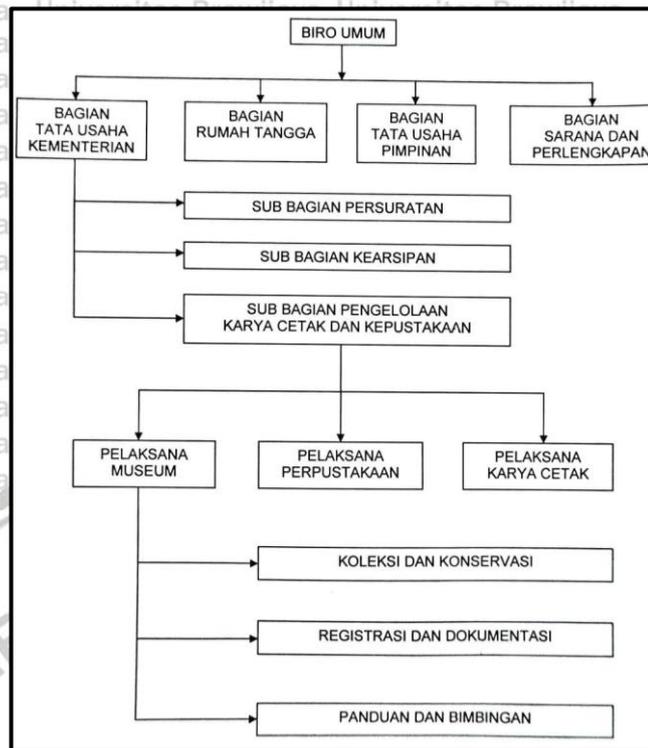


Gambar 4.1 Lokasi Museum

Sumber : [Google.com/maps/museumKLHK](https://www.google.com/maps/museumKLHK)

IV.2.5 Struktur Organisasi Museum

Museum Ir.Djamaludin Suryohadikusumo merupakan satuan kerja yang berada dibagian Tata Usaha Kementerian, Sub. Bagian Karya Cetak dan Kepustakaan, Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan memiliki tiga seksi didalamnya. Berikut merupakan struktur organisasi Museum Ir.Djamaludin Suryohadikusumo, yaitu :



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Museum

Sumber : Dokumen Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo

IV.2.6 Jenis dan Jumlah Koleksi Museum

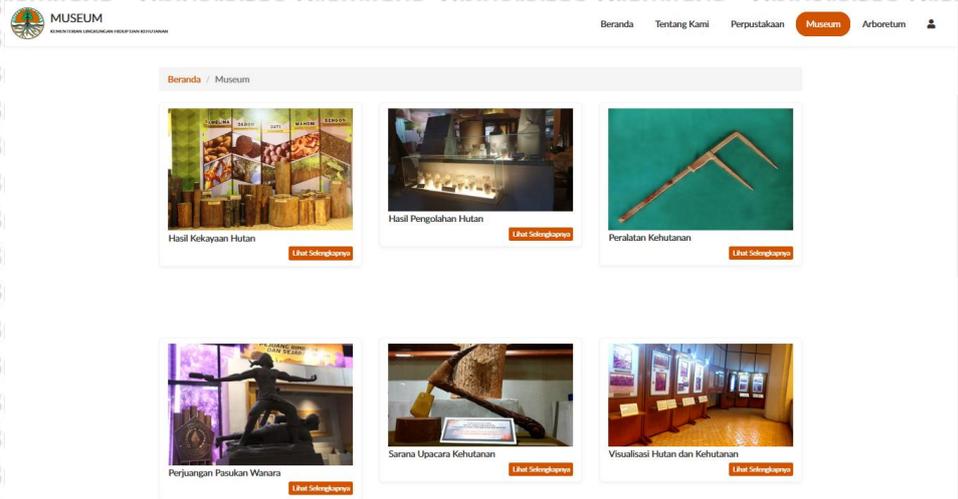
Museum Kehutanan Ir.Djamaludin SuryohadikusumoKLHK memiliki 7

(Tujuh) jenis koleksi museum yang masuk dalam klasifikasi koleksi museum yaitu

: Hasil Kekayaan Hutan, Hasil Pengelolaan Hutan, Peralatan Kehutanan,

Perjuangan Pasukan Wanara dan Rimbauan, Sarana Upacara Kehutanan,

Visualisasi Hutan dan Kehutanan, dan Visualisasi Taman Nasional Utama.



Gambar 4.3 Jenis Koleksi Museum

Sumber : Website Muspera

Sedangkan untuk jumlah koleksi, berdasarkan data koleksi museum tahun 2019 berjumlah 885 Koleksi. Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo KLHK di dukung dengan dua koleksi dari benda hidup dan benda mati menjadikan Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo KLHK sebagai satusatunya museum yang memiliki dua koleksi yang khusus melakukan pelestarian dan preservasi. Berikut adalah tabel total jumlah koleksi Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo KLHK yang terdiri dari koleksi Hasil Kekayaan Hutan, Hasil Pengelolaan Hutan, Peralatan Kehutanan, Perjuangan Pasukan Wanara dan Rimbauan, Sarana Upacara Kehutanan, Visualisasi Hutan dan Kehutanan, Visualisasi Taman Nasional Utama, dan Arboretum :

No. Inv.	Tgl. Pengumpulan	No. Inv.	Nama Koleksi	Jumlah	Asal Koleksi	Tempat Penyimpanan	Keterangan
883	19/02/2014	612	Hasil Kekayaan Hutan (Kayu) No. Inv. 4.1.612	1	Hadiah dari BPTH Maluku dan Papua	Maluku	Kondisi: TSKD Utuh; Kondisi: beberapa biji yang ditempel muan rontok Penempatan: Gudang Catatan: Berupa papan display biji-bijian dari berbagai pohon hutan dari daerah Maluku dan Papua, seperti ginaru, kaca crasicarpa, binuang laki, samama, gosale, titi, maessol, torem, koto, merbau, linggau, kenari, binuang biri, daman, nyatoh dan sencong. Ukuran: 14cm (L); 41cm (T); 40cm (D) Terbuat dari: Kayu titi Keadaan: Utuh; Kondisi: Baik, asli dan belum diawetkan/difernis Penempatan: Gudang
884	16/06/2014	613	Hasil Kekayaan Hutan (Non Kayu) No. Inv. 4.2.613	1	Hadiah dari BKSDA Kalimantan Barat	Kalbar	Ukuran: Terbuat dari: paruh burung rangkong Keadaan: Utuh; Kondisi: baik Tempat penyimpanan: kantor museum lantai 2 Catatan: Enggang/Rangkong adalah jenis burung besar yang mempunyai paruh seperti tanduk sapi dan berwarna terang. Burung ini termasuk famili Bucerotidae dengan 57 spesies. Daerah penyebarannya di Semenanjung Malaya, Sumatera dan Kalimantan. Enggang betina bertelur maksimal enam buah, berwarna putih dan ditempatkan di sarang yang terkungkung yang terbuat dari kotoran dan kulit babi. Makanannya terutama buah-buahan, madu, kelelewar, ikan, lar dan berbagai jenis serangga. Burung ini menjadi maskot Propinsi Kalimantan Barat dan termasuk jenis fauna yang dilindungi Undang-undang karena statusnya di alam liar terancam punah.
885	16/06/2014	614	Hasil Kekayaan Hutan (Non Kayu) No. Inv. 4.2.614	1	Hadiah dari BKSDA Kalimantan Barat	Kalbar	Ukuran: Terbuat dari: paruh burung rangkong Keadaan: Utuh; Kondisi: baik Tempat penyimpanan: kantor museum lantai 2 Catatan: Enggang/Rangkong adalah jenis burung besar yang mempunyai paruh seperti tanduk sapi dan berwarna terang. Burung ini termasuk famili Bucerotidae dengan 57 spesies. Daerah penyebarannya di Semenanjung Malaya, Sumatera dan Kalimantan. Enggang betina bertelur maksimal enam buah, berwarna putih dan ditempatkan di sarang yang terkungkung.

163

Gambar 4.4 Jumlah Koleksi Museum

Sumber : Dokumen Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo

IV.2.7 Pengunjung Museum

Museum Ir.Djamaludin Suryohadikusumo sebagai museum khusus atau tematik dalam melayani kunjungan masyarakat yang disesuaikan dengan koleksi yang ada dengan tema tertentu. Pengunjung dari museum sendiri terdiri dari pegawai kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) dan masyarakat umum. Dimana masyarakat umum terdiri dari pelajar, mahasiswa, karyawan swasta, PNS/TNI/POLRI, peneliti,dll.

IV.3 Penyajian Data

IV.3.1 Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66

Tahun 2015 Tentang Museum dalam rangka revitalisasi fisik dan

koleksi pada Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggunakan

model pendekatan implementasi kebijakan Edward III

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 Tentang

Museum, adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan,

memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. Peraturan

Pemerintah Nomor 66 tahun 2015 tentang Museum merupakan aturan pelaksanaan

dari ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang

Cagar Budaya. Museum memiliki koleksi. Koleksi Museum atau Koleksi

disebutkan dalam PP 66 tahun 2015 tentang Museum sebagai Benda Cagar Budaya,

Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya dan/atau Bukan Cagar

Budaya yang merupakan bukti material hasil budaya dan/atau material alam dan

lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan,

pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2015 tentang Museum ditetapkan di

Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2015 oleh Presiden Joko Widodo. PP 66 tahun

2015 tentang Museum diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal

19 Agustus 2015 di Jakarta. Agar setiap orang mengetahuinya Peraturan

Pemerintah Nomor 66 tahun 2015 tentang Museum ditempatkan pada Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195. Penjelasan PP 66 tahun 2015

tentang Museum ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733. Pertimbangan PP 66 tahun 2015 tentang Museum adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Museum.

George Edward III (dalam Widodo, 2010) menegaskan bahwa masalah utama dari administrasi publik adalah *lack of attention to implementation*.

Dikatakannya bahwa *without effective implementation the decision of policymakers will be carried out successfully*. Agar implementasi kebijakan menjadi efektif,

Edward menyarankan kita untuk memperhatikan empat isu pokok, yaitu: *communication, resource, disposition or attitudes dan bureaucratic structures*.

Merujuk pada pandangan Edward III ini peneliti mengetahui, menganalisis, serta mendeskripsikan kesiapan dan hasil dari Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo KLHK dalam menjalankan program revitalisasi fisik dan koleksi museum.

1. Komunikasi

Menurut Edward III (dalam Widodo, 2010), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”.

Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang di harapkan.

Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam kinerja kebijakan.

Menurut Edward III (dalam Widodo,2010), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).

- 1) Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 2) Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang di trasmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.
- 3) Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Dengan begitu, sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. Dalam hal ini, peneliti membagi komunikasi menjadi tiga dimensi yaitu dimensi transmisi, dimensi kejelasan dan dimensi konsistensi sebagai berikut :

a. Dimensi Transmisi

Komunikasi mengenai peraturan pemerintah mengenai kebijakan revitalisasi museum merupakan penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dan diefektifkan lagi dengan disampaikan juga kepada kelompok sasaran kebijakan serta pihak lain yang berkepentingan.

Indikator dalam komunikasi yaitu proses transmisi atau penyaluran komunikasi, kejelasan komunikasi dan konsistensi. Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara kepada para pimpinan kementerian. Berikut hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Bambang Hendroyono selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa :

“Informasi mengenai peraturan pemerintah tentang revitalisasi museum didapat langsung dari ibu menteri yang sebelumnya telah dipanggil oleh presiden dan kementerian lain yang terkait dengan museum milik pemerintah pusat. Dari penyampaian tersebut dirasa sudah jelas dan dapat dipahami isi peraturan pemerintah tersebut dan diminta untuk segera di implementasikan.” (Wawancara dengan Bapak Bambang Hendroyono, Jum’at 2 Maret 2021).

Pernyataan serupa juga didukung dan disampaikan oleh Bapak Samidi selaku Kepala Biro Umum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa:

“Penyampaian informasi terkait revitalisasi museum dilakukan oleh eselon I yaitu sekretaris jenderal kementerian berupa pemberitahuan dan rapat koordinasi peraturan pemerintah yang dilakukan. Dengan adanya pemberitahuan dan rapat koordinasi tersebut dirasa informasi terkait revitalisasi museum yang akan dilakukan telah cukup jelas dan telah dibuat rancangan awal implementasi peraturan pemerintah tersebut.” (Wawancara dengan Bapak Samidi, Kamis 1 Maret 2021).

b. Dimensi Kejelasan

Komunikasi mengenai kejelasan peraturan pemerintah mengenai kebijakan revitalisasi museum yang telah dilakukan oleh para pimpinan kementerian disampaikan kepada para pelaksana terkait dengan adanya revitalisasi museum

melakukan penyampaian informasi dan tindakan lanjutan kepada para pelaksana dan pengelola museum. Hal tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan Ibu Herlyn selaku Kepala Bidang Perpustakaan dan Museum bahwa :

“Penyampaian informasi terkait revitalisasi museum dilakukan oleh pak KARO (Kepala Biro) yaitu pak Samidi berupa pemberitahuan awal dan rapat koordinasi terkait implementasi seperti apa yang ingin dilakukan dengan peraturan pemerintah tersebut. Dengan adanya pemberitahuan dan rapat koordinasi tersebut dirasa informasi terkait revitalisasi museum yang akan dilakukan telah cukup jelas dan telah dibuat rancangan awal implementasi peraturan pemerintah tersebut. Pada tahap awal saya diminta untuk membuat tim pembangunan revitalisasi museum dan rencanan pemberian honorarium terhadap tim tersebut.” (Wawancara dengan Ibu Herlyn, Kamis 25 Februari 2021).

Pernyataan dari Ibu Herlyn tersebut didukung dengan pernyataan pelaksana dilapangan yang dilakukan dengan Ibu Yuli selaku Penanggung Jawab dan Pengelola Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo bahwa :

“Komunikasi mengenai implementasi Peraturan Pemerintah terkait revitalisasi museum dilakukan secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi dengan melakukan koordinasi antara Sekretaris Jenderal kementerian, Kepala Biro Umum, Kepala Bidang Perpustakaan dan Museum, serta Pengelola Museum dan kontraktor pihak ketiga. Saya diminta untuk menyiapkan gambaran rancangan tim pembangunan revitalisasi museum dan mencari referensi design serta kontraktor dan konsultan design interior.” (Wawancara dengan Ibu Yuli, Selasa 23 Februari 2021).

c. Dimensi Konsistensi

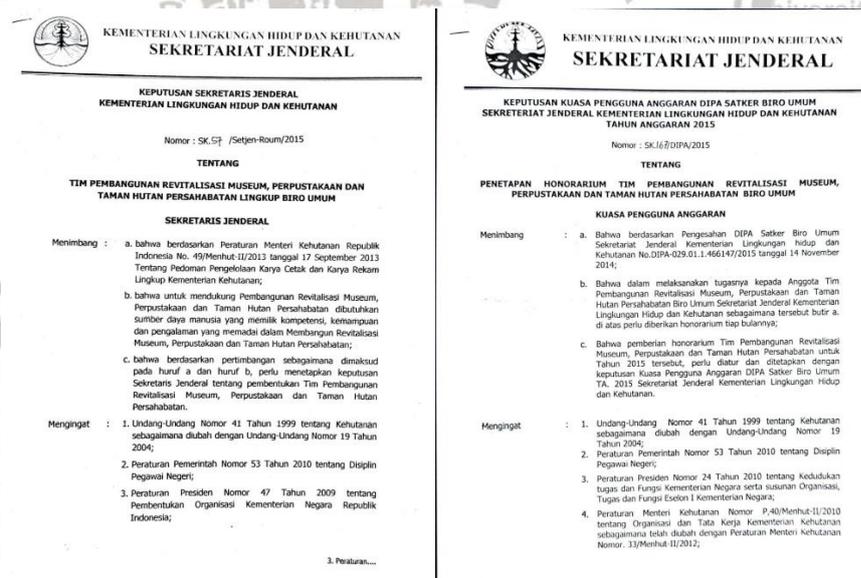
Komunikasi mengenai konsistensi terkait revitalisasi museum yang telah dilakukan oleh para pimpinan dan para pelaksana terkait dengan adanya revitalisasi adalah dengan melakukan Tindakan lanjutan sertakoordinasi terkait pembuatan satuan kerja dan tim pembangunan revitaslisasi museum. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Yuli selaku selaku Penanggung Jawab dan Pengelola Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo bahwa :

“Konsistensi komunikasi yang dilakukan itu terkait keluarnya Surat Keputusan (SK) tim pembangunan revitalisasi museum beserta dengan honorarium nya mas. Selain itu juga melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan pihak design interior yang sudah ditetapkan serta mempersiapkan kondisi museum untuk dilakukan penutupan sementara terkait proses revitalisasi”.



Gambar 4.5 Design Revitalisasi

Sumber : Dokumen Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo



Gambar 4.6 SK Tim Pembangunan Revitalisasi Museum dan Honorarium

Sumber : Dokumen Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti, dapat dikatakan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pihak pimpinan dan pihak para pelaksana

lapangan sudah baik dan berhasil dalam menerapkan implementasi peraturan pemerintah tentang revitalisasi museum. Hal tersebut juga tercermin dari adanya koordinasi dan komunikasi yang intens antara pihak internal dan eksternal kementerian, selain itu juga dengan direalisasikan pembuatan tim pembangunan museum dalam rangka mempercepat implementasi peraturan tersebut.

2. Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Sumber daya dipilih sebagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan karena implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya manusia serta sumber anggaran/finansial. Sumber daya peralatan dan sumberdaya kewenangan untuk melaksanakan implementasi kebijakan tersebut sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia

Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Mengenai sumber daya manusia atau dalam hal ini para pelaksana pegawai yang melaksanakan program ini. Dalam hal ini, Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo KLHK masih kekurangan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dalam pengelolaan

museum, Sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Herlyn selaku Kepala Bidang Perpustakaan dan Museum mengatakan bahwa :

“Sumber daya manusia atau pengelola museum memang saat ini dirasa belum memadai dan belum mencukupi sesuai dengan tugas, serta fasilitas sarana dan prasarana yang ada dan diperintahkan oleh pihak kementerian. Pengelola museum berulang kali ingin meminta penambahan sumberdaya manusia agar lebih meningkatkan lagi pelayanan yang ada. Namun hal tersebut belum dapat terakomodir dikarenakan kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kementerian ini sudah mencapai batas maksimal dan untuk penambahan sumberdaya manusia untuk pengelola museum dapat dilakukan dalam rentang waktu tahun ini 2021 hingga 2023 dikarenakan banyaknya pegawai kementerian yang memasuki masa pensiun.” (Wawancara dengan Ibu Herlyn, Kamis 25 Februari 2021).

Hal ini didukung dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Yuli selaku Penanggung Jawab dan Pengelola Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo KLHK bahwa :

“Sumber daya untuk melakukan revitalisasi dilihat dari sumber daya manusianya yaitu pengelola museum dirasa masih kurang dari segi SDM. Untuk melayani pengunjung SDM sekarang yang dimiliki masih terasa kurang dalam mengelola museum apalagi dengan kunjungan yang ada dan fasilitas yang dimiliki. Dengan fasilitas dan pelayanan yang dimiliki seperti pemanduan, ruang audio visual, ruang teater, serta koleksi yang jumlahnya cukup banyak dan beragam dirasa belum mencukupi dengan SDM yang ada untuk melayani masyarakat.” (Wawancara dengan Ibu Yuli, Selasa 23 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa dalam hal sumber daya manusia memiliki kendala karena para staf pegawai yang menjalankan program ini kekurangan pegawai walaupun telah memiliki kompetensi dan kapabilitas yang cukup. Dari jumlah pegawai sekarang hanya memiliki 1 kepala bidang dan 2 orang pegawai museum dengan tugas yang berbeda. Satu pegawai yaitu kurator yang bertugas sebagai Mengamati dan menganalisis perkembangan kehutanan Indonesia dan International, Mempertimbangkan dan menseleksi karya dan kegiatan pameran di museum, Membantu mempertimbangkan tata pameran

tetap, sistem pendokumentasian dan kebijakan pengelolaan koleksi dan Melakukan kerjasama, bimbingan, edukasi, dan apresiasi melalui kegiatan-kegiatan museum. Sedangkan satu pegawai lagi yaitu konsevator yang bertugas untuk menjaga dan merawat koleksi yang ada di museum.

b. Sumber Daya Finansial

Diluar sumber daya manusia, sumberdaya-sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial. Karena, mau tidak mau, ketika sumberdaya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pilek untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik.

Sumber Daya Finansial Museum Kehutanan dalam mengimplementasikan program mengandalkan dari anggaran tahunan kementerian yang setiap tahunnya dialokasikan ke bagian biro umum kementerian. Sedangkan biro umum sudah menaungi banyak hal dan otomatis alokasi anggaran untuk museum hanya tersisa sedikit. Setiap tahunnya, museum hanya mendapatkan anggaran sebesar 30 juta rupiah saja untuk segala aktivitas kegiatan dan perawatan. Hal inilah yang menyulitkan petugas lapangan dalam membuat program secara optimal. Hal tersebut didukung oleh Bapak Asep selaku Pengelola Museum yang mengatakan bahwa :

“Untuk anggaran memang saya rasa kurang mas yang diberikan oleh museum, terlebih untuk perawatan maupun pengadaan koleksi. Anggaran yang diberikan sangatlah terbatas kemudian anggaran tersebut digunakan untuk perawatan seperti pencucian pasir, pelapisan koleksi pohon maupun batang kayu yang dilakukan oleh pihak ketiga.” (Wawancara dengan Bapak Asep selaku Pengelola Museum, Selasa 23 Februari 2021).

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Samidi selaku Kepala Biro

Umum bahwa :

”Untuk sumber daya finansial sendiri memang untuk museum masih dirasa kurang untuk memaksimalkan pengelolaan museum karena sejauh ini anggaran di biro umum terbagi ke beberapa pos mas. Akan tetapi, ada rencana di tahun ini atau di tahun depan pengelolaan museum akan di pindahkan ke bidang PPID ataupun Pusdatin agar memang lebih fokus dalam pengembangan museum agar lebih baik lagi sekaligus alokasi dana yang lebih banyak lagi jika pengloaan museum dipindahkan ke bagian lain.” (Wawancara dengan Bapak Samidi, Kamis 1 Maret 2021).

Pernyataan tersebut didukung juga oleh Bapak Bambang Hendroyono selaku Sekretaris Jenderal Kementerian yang mengatakan bahwa :

“Untuk saat ini memang sumber daya finansial untuk museum masih dirasa kurang untuk karena alokasi yang tidak merata jika dibawah oleh bidang biro umum sehingga alokasi anggaran tidak maksimal untuk pengelolaan museum.” (Wawancara dengan Bapak Bambang, Jum’at 2 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa dalam hal sumber daya finansial masih memiliki kendala karena alokasi anggaran yang diberikan oleh biro umum kepada museum tidak merata dan tidak sesuai dengan kebutuhan museum untuk melakukan pelayanan, perawatan, pembuatan program sehingga kurang optimal yang dilakukan oleh pengelolaan museum tanpa adanya anggaran yang cukup.

c. Sumber Daya Peralatan

Sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Dalam revitalisasi ini, pihak kementerian dan museum melakukan pencatatan ulang terkait sarana dan prasarana apa saja yang kurang ataupun perlu ditambahkan. Fasilitas yang tersedia di Museum Kehutanan

Ir.Djamaludin Suryohadikusumo KLHK meliputi standar fasilitas umum berupa loker penitipan barang, AC, akses wifi, ruang audio visual, teater, perpustakaan dan ruang rapat untuk didalam Gedung museum. Kemudian untuk fasilitas diluar seperti di arboretum atau hutan kota terdapat jalur untuk pengunjung disabilitas. Selain itu masih terdapat juga fasilitas umum lainnya seperti toilet, musholla, ruang relaksasi dan lahan parkir yang luas untuk kendaraan pengunjung baik kendaraan roda dua, roda empat maupun bus.

d. Sumberdaya Kewenangan

Sumber daya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Dalam hal kewenangan, pihak pimpinan kementerian menyerahkan kepada kepala bidang pengelolaan karya cetak dan kepastakaan, hal tersebut dikatakan oleh Ibu Herlyn selaku kepala bidang pengelolaan karya cetak dan kepastakaan bahwa

“Untuk kewenangan sendiri pada saat pengambilan keputusan diserahkan ke kabid waktu itu pak Hendra. Biasanya keputusan yang urgent dan memerlukan keputusan langsung boleh kabid yang mengambil keputusannya. Nanti setelah itu baru di laporkan ke pak KARO. Tapi, kalo untuk kewenangan yang terencana tetap harus diserahkan kepada pimpinan mas”. (Wawancara dengan Ibu Herlyn, Kamis 25 Februari 2021).

Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari Ibu Yuli selaku Penanggung Jawab dan Pengelola Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo KLHK

bahwa “untuk keputusan pada saat revitalisasi yang membutuhkan keputusan cepat diserahkan ke kabin pada saat itu Pak Hendra mas”. (Wawancara dengan Ibu Yuli, Selasa 23 Februari 2021).

3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Indikator disposisi dalam implementasi terdiri dari :

a. Rekrutmen Pegawai/Pengangkatan Birokrat

Pengangkatan dan pemilihan pegawai untuk jabatan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan wewenang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Pengangkatan birokrat dilakukan secara terbuka dengan menggunakan tes seleksi secara tertulis. Pengangkatan dan pemilihan personil struktural di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan oleh pemerintah dengan mekanisme penerimaan PNS sesuai Undang-undang. Sedangkan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan wewenang dari kementerian. Rekrutmen PPPK disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas pegawai di kementerian. PPPK diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Berdasarkan, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai PPPK juga termasuk sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) non-PNS sehingga bisa menduduki jabatan administratif dan jabatan

fungsi di instansi pemerintah. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Bambang Hendoroyono selaku Sekretaris Jenderal Kementerian bahwa :

“Untuk pengangkatan pegawai pasti ada, terlebih dengan komitmen ingin berinovasi untuk pelayanan terhadap pengunjung, kami membuat SOP dan evaluasi rutin yang akan dilaporkan kepada saya. Begitu juga dengan rekrutmen pegawai yang dilakukan oleh kami, sejauh ini kami belum bisa melakukan rekrutmen pegawai ASN dikarenakan kami mengikuti aturan dari kementerian PANRB dan BKN terkait hal tersebut. Ditambah lagi, pada tahun 2020 kemarin tidak ada rekrutmen untuk CPNS tahun lalu. Akan tetapi memang diakui bahwa sejauh ini dari pihak kementerian kurang partisipatif dengan pengelolaan museum dikarenakan bidang yang menaungi museum sudah mendapat banyak tanggungan. Untuk pengangkatan PPPK sendiri belum dilakukan hingga saat ini karena tidak mudah. Ketika dahulu museum masih dipegang oleh Yayasan manggala wanabakti dan kapasitas pegawai dibagian biro umum sudah mencapai batas maksimal. Oleh karena itu sedang di rencanakan dan di realisasikan untuk pemindahan bidang yang menaungi museum entah itu nanti ke PPID ataupun PUSDATIN disekitar tahun ini hingga 2023 karena banyak pegawai kami yang memasuki masa pensiun.” (Wawancara dengan Bapak Bambang, Selasa 2 Maret 2021).

b. Insentif

Pendapat George C. Edward III, insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi. Pemberian Insentif pada pegawai Kementerian terdapat dua, yaitu Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) dan Tunjangan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Dimana pemberian

tunjangan PPTK dilaksanakan satu tahun sekali dan satu orang satu kegiatan tidak boleh double. Hal ini sesuai wawancara dengan Kepala Biro Umum, yaitu:

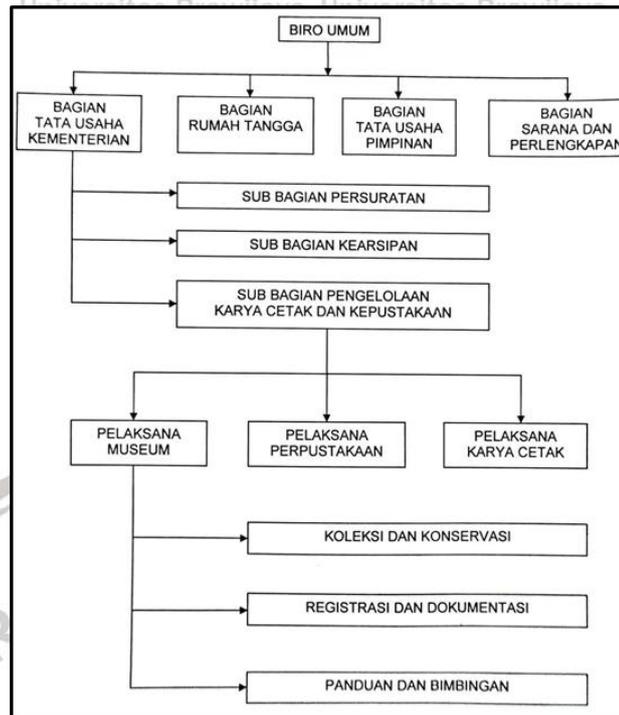
“Kalau disini pemberian insentif ya yang buat semua PNS itu mas, TPP (Tunjangan Perbaikan Penghasilan). Terus sama PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) ini khusus untuk jabatan struktural, pemberiannya satu tahun sekali, satu orang satu kegiatan, tidak boleh double. Kalau insentif untuk pengelola museum itu masuk kedalam PPTK mas.” (Wawancara dengan Bapak Samidi, Senin 1 Maret 2021).

4. Struktur Birokrasi

Pendapat Edward III (dalam Widodo, 2010), struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi yaitu penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Selain itu, struktur birokrasi mencakup dimensi standar prosedur operasional yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi tugasnya.

a. Fragmentasi

Fragmentasi menegaskan bahwa struktur birokrasi yang terpecah-pecah atau tersebar dapat meningkatkan gagalnya komunikasi. Semakin terfragmentasi organisasi pelaksana semakin membutuhkan koordinasi yang intensif. Struktur Organisasi pada Biro Umum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi ini pola koordinasi yang terjalin menempatkan Kepala Biro sebagai pejabat tertinggi dimana setiap bagian-bagian organisasi terhubung dengan rantai komando langsung ke Kepala Biro Umum.



Gambar 4 7 Struktur Organisasi Biro Umum dan Museum

Sumber : Dokumen Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo

Dalam melaksanakan aktifitas museum, dibentuk sebuah sub bagian yaitu sub bagian pengelolaan karya cetak dan kepastakaan. Sub bagian ini juga menaungi tentang perpustakaan. Dalam pelaksana museum terbagi menjadi tiga, yaitu :

1. Koleksi dan Konservasi

Bidang ini menaungi Koleksi yang dimiliki oleh sebuah museum agar tetap terjaga kelestariannya perlu dilakukan perawatan yang sesuai dengan karakteristik dan material koleksi. Dalam hal ini kurator bekerjasama dengan Bagian Konservasi.

Selain konservasi, perlu tindakan pencegahan terhadap kerusakan koleksi atau preservasi sehingga koleksi tetap terjaga kelestariannya, dalam kegiatan tersebut dituntut peran aktif konservator dan preservator dan sebaiknya memiliki keahlian yang cukup tentang seni koleksi yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga tidak menggantungkan masalah kelestarian koleksi sepenuhnya kepada kurator. Dalam

hal perawatan, konservator harus benar-benar yakin bahwa benda tersebut tidak akan rusak, misalnya hilangnya lapisan patina pada logam.

Selain itu, koleksi-koleksi yang mengalami kerusakan atau fragmentaris perlu diperbaiki atau direkonstruksi supaya dapat diperoleh bentuk seperti semula.

Dalam kegiatan ini kurator bekerjasama dengan Bagian Restorasi. Dalam proses merekonstruksi koleksi yang bersifat fragmentaris, sebaiknya kurator yang dibantu oleh Bagian Restorasi mengadakan studi perbandingan dengan koleksi lain yang masih utuh dan diperkirakan sejenis dengan koleksi tersebut, serta direkonstruksi di atas kertas terlebih dahulu, sebelum dilakukan restorasi terhadap koleksi.

2. Registrasi dan Dokumentasi

Registrasi adalah kegiatan pencatatan suatu benda, setelah benda tersebut ditentukan secara resmi menjadi koleksi museum, ke dalam buku induk registrasi.

Pencatatan dilakukan pula terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan koleksi tersebut, seperti berita acara, surat wasiat, dsb. Hasil pencatatan ini sangat diperlukan untuk penelitian koleksi lebih lanjut, karena merupakan sumber informasi awal dari koleksi tersebut. Registrasi diperlukan dalam proses pinjam-meminjam koleksi atau koleksi yang untuk sementara meninggalkan pengawasan museum, untuk beberapa maksud, misalnya untuk pengujian atau identifikasi.

Registrasi sebaiknya disusun untuk membantu menginspeksi secara periodik terhadap koleksi untuk terjaminnya ketepatan dalam menangani koleksi, serta untuk mengetahui jumlah koleksi yang dimiliki, titipan, atau yang dikeluarkan. Sehingga dapat dicegah adanya penipuan atau pengakuan dari seseorang atas kepemilikan koleksi tersebut, dan dapat membantu ilmuwan dalam penelitian.

Sedangkan dokumentasi objek museum adalah keterangan tertulis mengenai koleksi museum. Dokumentasi koleksi dibagi dalam dua kategori umum, yaitu :

(1) Pertama, termasuk dokumentasi yang biasanya disertai fungsi registrasi.

Dokumen utama ini merupakan status legal dari sebuah objek atau pada pinjam-meminjam di museum, serta objek yang berpindah-pindah dan dijaga di bawah pengawasan museum. Dokumentasi registrasi yang baik memasukan pula catatan dari dokumen resmi, seperti bukti legal kepemilikan atau pemilik objek sistem dokumentasi sebaiknya berhubungan antara objek dengan nomor khusus, misalnya nomor inventaris dan nomor pinjam-meminjam, dan memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi objek atau lokasi yang terakhir, dokumentasi objek dalam pinjam-meminjam sebaiknya menunjukkan semua aktivitas objek tersebut sewaktu di bawah pengawasan museum;

(2) Kedua, termasuk dokumentasi yang disertai dengan fungsi kuratorial, yang mana memberikan informasi yang lebih luas mengenai sebuah objek dan menempatkan objek pada tempat yang tepat dan penting di dalam kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Dokumentasi koleksi sebaiknya dibuat tepat pada waktunya, disimpan di lokasi yang aman dan terpelihara dengan penerangan yang tepat, disertai dengan metode penyimpanan yang baik, dan bila perlu dibuat duplikat dokumentasi yang disimpan di luar museum. Pendokumentasian yang umum dilakukan di museum adalah pembuatan kartu tik.

3. Panduan dan Bimbingan

Memimpin penyelenggaraan kegiatan bimbingan dengan metode dan sistem edukatif kultural dalam rangka menanamkan daya apresiasi dan penghayatan nilai warisan budaya dan ilmu pengetahuan serta menyelenggarakan publikasi tentang koleksi museum.

Hal tersebut didukung dengan pernyataan dari Ibu Yuli selaku penanggung jawab dan pengelola museum yang mengatakan bahwa :

“Ideal nya sebuah standar minimal museum 3 bagian mas, yaitu bagian koleksi dan konservasi, bagian registrasi dan dokumentasi serta bagian panduan dan bimbingan yang didalamnya ada curator, konservator dan tata pameran yang mempunyai tugas masing-masing dari pengelola museum. Akan tetapi sekarang ini semenjak dibawah pemerintah jumlah karyawan berkurang seiring belum adanya tambahan pegawai pengelola museum karena pensiun. Sekarang hanya ada koleksi dan konservasi serta panduan dan bimbingan. Untuk registrasi dan dokumentasi belum ada karena terkendala anggaran mas.” (Wawancara dengan Ibu Yuli, Selasa 23 Februari 2021).

Berikut adalah tabel total jumlah pengunjung selama 2015-2020 :

Tabel 4.1 Jumlah Pengunjung Museum 2015-2020

Tahun	Pengunjung Lokal	Pengunjung Mancanegara	Jumlah Total Pengunjung Tahunan
2015	2.524	213	2.737 Pengunjung
2016	5.571	233	5.804 Pengunjung
2017	6.346	194	6.540 Pengunjung
2018	4.468	65	4.533 Pengunjung
2019	7.354	51	7.405 Pengunjung
2020	906	-	906 Pengunjung

Sumber : Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo

b. *Standard Operating Procedure* (SOP)

Birokrasi menjadi salah satu organisasi yang paling sering menjadi pelaksana kebijakan. Menurut Edward ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau *Standard Operating*

Procedures (SOP) dan fragmentasi. SOP menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan bagi setiap implementor. SOP mampu menyeragamkan tindakan-tindakan dari organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Implementasi Kebijakan pearturan pemerintah tentang revitalisasi belum memiliki SOP atau prosedur-prosedur kerja yang baru dan belum meiliki rencana strategis (renstra). Beberapa SOP yang ada merupakan SOP dari Yayasan manggala wanabakti sebelum terjadinya pengalihan dari pihak Yayasan dan kementerian. Setelah di revitalisasi juga belum ada SOP yang baru, masih dalam tahap rancangan yang kemungkinan di tahun ini di sah-kan Hal ini sesuai wawancara langsung dengan Ibu Yuli selaku penanggung jawab dan pengelola museum yang mengatakan bahwa :

“Dalam melayani kunjungan masyarakat terdapat SOP sebagai dasar acuan bertugas. SOP mengenai pelayanan kujungan hampir sama disetiap museum dikarenakan standar yang digunakan sama. SOP akan ditanda tangani oleh kepala museum dan kementerian Pendidikan dan kebudayaan. Akan tetapi, untuk museum kehutanan Ir.Djamaludin sendiri belum memiliki SOP sendiri mas semenjak beralih kepengelolaan dari Yayasan ke kementerian. Rencana strategis seperti museum lain pun kami belum ada”. (Wawancara dengan Ibu Yuli, Selasa 23 Februari 2021).

Pernyataan dari Ibu Yuli tersebut didukung dengan pernyataan dari Ibu Herlyn selaku Kepala Bidang Karya Cetak dan Kepustakaan yang mengatakan bahwa :

“Memang betul SOP untuk museum belum ada dan masih dalam tahap brancangan yang inshaallah di tahun ini di sah-kan. Begitupun dengan brencana strategis kami belum memili mas masih dalam pembahasan. Karena terkadang promosi dan rolling jabatan disini berlangsung cepat sehingga tidak mempunyai waktu yang banyak untuk melakukan pembahasan tentang museum. Sejauh ini kami masih menerapkan SOP yang lama dan hanya melakukan evaluasi tiap 6 bulan sekali dan hasilnya di laporkan ke pak KARO dan pak Sekjen”. (Wawancara dengan Ibu Herlyn, Kamis 25 Februari 2021).

Dalam pengelolaannya sendiri, museum mempunyai berbagai macam aktivitas yang bersifat teknis yang dibantu oleh seksi teknis dan seksi pelayanan.

Aktivitas seksi teknis memiliki rincian tugas sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan dan Penataan Storage (Ruang Penyimpanan Koleksi)
- 2) Survei Benda Cagar Budaya/Koleksi
- 3) Pengadaan/Pengumpulan Benda Cagar Budaya/Koleksi
- 4) Pembuatan Replika Koleksi
- 5) Reinventarisasi dan Dokumentasi Koleksi
- 6) Konservasi (perawatan) seluruh koleksi secara berkala
- 7) Fumigasi Koleksi
- 8) Pembuatan Katalog Koleksi
- 9) Penelitian koleksi dan penggandaan Naskah Penelitian Koleksi

Sedangkan dalam Aktivitas seksi pelayanan memiliki rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Penyediaan informasi dalam bentuk cetakan (buku panduan tata pameran tetap, brosur museum. Folder/ koleksi unggulan museum)
- 2) Penyelenggaraan pelayanan pameran tetap
- 3) Publikasi melalui media massa dan elektronik
- 4) Penyelenggaraan pameran temporer
- 5) Museum masuk sekolah

6) Seminar, diskusi dan sarasehan permuseuman

7) Lomba permuseuman

IV.3.2 Hasil, Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dari revitalisasi fisik dan koleksi museum pada Museum Kehutanan Ir.Djamaluddin Suryohadikusumo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1. Hasil Revitalisasi

Sebuah museum memerlukan ruangan atau gedung permanen yang representatif untuk dapat menjamin keamanan koleksi, penataan koleksi, perawatan koleksi, sirkulasi koleksi, personil, dan pengunjung museum. Bangunan Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo dibangun atas dasar ingin menjadi *forestry center* dan dikelola sesuai dengan kebutuhan masyarakat yaitu kebutuhan rekreasi, kebutuhan edukasi, kebutuhan proteksi, kebutuhan penyaluran aspirasi dan kebutuhan informasi. Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo menerima bantuan revitalisasi museum pada tahun anggaran 2015. Peruntukan revitalisasi museum tersebut yaitu: a. Ruang penyimpanan (*storage*) sebagai tujuan pengunjung museum dan edukasi ruang penyimpanan (*storage*), b. Kemudahan pengunjung museum dalam mengakses informasi dan data koleksi kehutanan, c. Keamanan dan kenyamanan pengunjung museum, pengelola museum, dan koleksi museum. Dalam kajian ini, penulis memfokuskan pada tampilan fisik gedung dan koleksi pameran tetap museum setelah dilaksanakannya revitalisasi museum.

Tampilan fisik gedung dan koleksi pameran tetap sebuah museum merupakan pintu awal dan sekaligus sumber informasi langsung pengunjung museum ketika akan memasuki dan melihat museum guna memahami kebudayaan Lampung melalui

koleksi museum yang dipamerkan dengan informasi data koleksi museum didalamnya yang tentu berpengaruh pula terhadap proses apresiasi pengunjung museum (masyarakat) terhadap koleksi kehutanan, baik berhubungan dengan tingkat pemahaman maupun pandangan mereka yang sangat penting bagi eksistensi keberadaan museum sendiri. Revitalisasi yang dilakukan juga didukung oleh pernyataan dari Bapak Samidi selaku kepala biro umum bahwa:

“Dari Kunjungan pejabat eselon 1 dan 2 pada saat pergantian jabatan di tahun 2015 berkunjung ke museum dan melihat mengenai kondisi museum yang belum mengalami revitalisasi sejak awal museum berdiri. Museum terkesan kuno, tidak bersih dan kurang dapat menarik minat kunjungan. Dan kebetulan disaat yang bersamaan ada peraturan pemerintah mengenai revitalisasi museum, karena itu akhirnya di 2015 kita sekalian melakukan revitalisasi.” (Wawancara dengan Bapak Samidi, Senin 1 Maret 2021).

Tampilan fisik gedung museum, dan tata koleksi pameran tetap museum dengan informasi koleksi museum di dalam ruang pameran tetap tersebut, setelah dilakukan revitalisasi dapat dikatakan sangat baik, bahkan mendapatkan apresiasi yang lebih dari pejabat eselon 1 dan 2 terhadap hasil revitalisasi serta pengunjung museum (masyarakat) yang dapat dilihat dari jumlah kunjungan masyarakat ke Museum Kehutanan Ir.Djamaludin. Hal tersebut dikatakan oleh Ibu Yuli selaku penanggung jawab dan pengelola museum bahwa :

“Hasil dari revitalisasi fisik dan koleksi sejauh ini cukup memuaskan dari pejabat eselon 1 dan 2 karena memberikan sebuah penyegaran terhadap museum yang belum pernah di revitalisasi semenjak museum berdiri. Namun ada satu spot favorit pengunjung setelah revitalisasi yang hilang yaitu bagian diorama hutan dan dengan hilangnya spot tersebut beberapa pengunjung yang pernah datang sebelum museum di revitalisasi mengatakan roh dari museum ini hilang tidak seperti dulu.” (Wawancara dengan Ibu Yuli, Selasa 23 Februari 2021).

Tampilan fisik gedung museum dan kondisi ruang tata koleksi pameran tetap museum saat dilakukan kajian mulai banyak terlihat kerusakan di beberapa

tempat, baik pada vitrin, informasi grafis, plavon gedung, dinding museum, pencahayaan koleksi dan juga kondisi museum yang terlihat kuno sebelum di revitalisasi. Adapun penjelasan yang berkaitan dengan hal tersebut di atas, terdapat pada ada foto berikut ini:

Tampak depan Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo, Kondisi museum sebelum direvitalisasi dan museum saat dilakukan kajian tahun 2021. Kondisi museum sebelum di revitalisasi tahun 2015 akhir, Fisik gedung tampak depan dibagian pintu masuk terlihat kuno dan tidak baik pada foto 1a. Pada tahun 2021 kondisi bangunan museum terlihat tampak depan tertata baik dan rapih serta terlihat lebih *modern* pada foto 1b dengan sentuhan pencahayaan pada tulisan nama museum dan *finishing* dengan warna abu-abu. Berbeda dengan sebelum di revitalisasi tampak depan museum terlihat kuno dan kurang menarik untuk dikunjungi.

Tabel 4.2 Tabel Perbandingan Sebelum dan Sesudah Revitalisasi 1

Museum Sebelum di Revitalisasi 2015	Museum Setelah di Revitalisasi 2021
	
<p>Foto 1a. Tampak depan Museum Kehutanan (dokumen museum kehutanan).</p>	<p>Foto 1b. Tampak depan Museum Kehutanan (dokumen Peneliti tahun 2021).</p>

Memasuki ruang pameran *spot* diawali dengan sajian tampilan ruang koleksi pejuang rimbaan dan sejarah hutan yang dibuat saat revitalisasi fisik dan koleksi museum, tampak bagus dan memperlihatkan bagaimana sejarah para pejuang rimbaan dan hutan tersebut. Keberadaan koleksi pejuang rimbaan sendiri merupakan sebuah koleksi yang berisikan tentang ketua rimbaan, penghargaan para rimbaan, alat-alat untuk berjuang para rimbaan pada masa lalu. Koleksi pejuang rimbaan tersendiri baru masuk dan ditata dengan rapi seperti foto 2b.

Ketika dipegang oleh yayasan dan belum di revitalisasi, koleksi pejuang rimbaan tidak masuk kedalam koleksi museum karena merupakan koleksi milik yayasan.

Koleksi pejuang rimbaan pun tidak di masukkan kedalam vitrin yang bagus, tidak memiliki pencahayaan dan kurang tertata rapi seperti pada foto 2a.

Tabel 4.3 Tabel Perbandingan Sebelum dan Sesudah Revitalisasi 2





Foto 2a. Tampak koleksi pejuang rimbauan dan sejarah hutan. (dokumen museum kehutanan)

Foto 2b. Tampak koleksi pejuang rimbauan dan sejarah hutan. (dokumen Peneliti tahun 2021).

Memasuki *spot* selanjutnya yaitu *spot central* atau utama pada museum ini yaitu diorama hutan dan pohon jati serta tata pameran koleksi binatang. Pada sebelum revitalisasi *spot* ini memiliki sedikit koleksi binatang dan belum menjadi gambaran sesungguhnya karena masih menggunakan lantai sebagai dasarnya. Selain itu, dapat dilihat juga bahwa koleksi ini kurang pencahayaan dan minim informasi padahal merupakan *spot central* pada museum ini seperti pada foto 3a. Setelah dilakukan revitalisasi, koleksi binatang yang ada di perbanyak dan menggunakan lantai pasir sehingga terlihat lebih nyata dan diberi cairan untuk membuat koleksi berkilau seperti pada foto 3b.

Tabel 4.4 Tabel Perbandingan Sebelum dan Sesudah Revitalisasi 3

Museum Sebelum di Revitalisasi 2015	Museum Setelah di Revitalisasi 2021
	
	
Foto 3a. Tampak koleksi <i>cental spot</i> museum. (dokumen museum kehutanan).	Foto 3b. Tampak koleksi <i>cental spot</i> museum.(dokumen Peneliti tahun 2021).

Memasuki koleksi alat-alat kehutanan yang berisi koleksi tentang alat-alat kehutanan di masa lalu dan sekarang, pada vitrin koleksi alat-alat kehutanan kondisi tata pameran sebelum dilakukan revitalisasi terlihat kurang teratur dan rapi, kemudian kurang pencahayaan dan kurang perawatan pada koleksi serta kurang petunjuk dan informasi mengenai koleksi seperti foto 4a. Koleksi alat-alat kehutanan setelah dilakukan revitalisasi mengalami tampilan yang jauh lebih informatif, teratur, rapi dan memiliki pencahayaan yang bagus serta koleksi yang terawat dilapisi oleh cairan sehingga koleksi lebih terawat seperti pada foto 4b.

Tabel 4.5 Tabel Perbandingan Sebelum dan Sesudah Revitalisasi 4

Museum Sebelum di Revitalisasi 2015	Museum Setelah di Revitalisasi 2021
	
Foto 4a. Tampak koleksi alat-alat kehutanan. (dokumen museum kehutanan).	Foto 4b. Tampak koleksi alat-alat kehutanan. (dokumen Peneliti tahun 2021).

Ruang pameran koleksi selanjutnya yaitu koleksi kendaraan kehutanan pada masa lalu. Pada ruang pameran koleksi ini sebelum di revitalisasi kendaraan yang ada di pameran kurang mendapatkan perawatan dan dibiarkan begitu saja serta tidak ada pencahayaan dan letaknya terlalu dengan dengan lantai sehingga pengunjung masih bisa naik ke atas temoat koleksi seperti pada foto 5a. Setelah dilakukan revitalisasi, koleksi kendaraan kehutanan terlihat lebih terawat karena dilapisi oleh cairan *varnish* sehingga terlihat berkilau dan bersih serta mendapat pencahayaan dan letaknya pun sudah tidak setara dengan lantai sehingga lebih aman untuk koleksi tersebut seperti pada foto 5b.

Tabel 4.6 Tabel Perbandingan Sebelum dan Sesudah Revitalisasi 5

Museum Sebelum di Revitalisasi 2015	Museum Setelah di Revitalisasi 2021
	
Foto 5a. Tampak koleksi kendaraan kehutanan. (dokumen museum kehutanan).	Foto 5b. Tampak koleksi kendaraan kehutanan. (dokumen Peneliti tahun 2021).

Koleksi tata pameran selanjutnya yaitu diorama jenis hutan yang menjelaskan mengenai macam-macam hutan dan koleksinya yang di Indonesia. Pada sebelum dilakukannya revitalisasi, koleksi ini berupa diorama hutan yang dimana pengunjung dapat masuk kedalamnya dan merasakan sensasi seperti berjalan di hutan dengan suasana dan efek air dan embun didalamnya seperti foto 6a. Setelah dilakukan revitalisasi, diorama tersebut dihilangkan karena dianggap oleh para pimpinan membuat terlihat kumuh, kotor dan tidak rapi sehingga menyebabkan daun berguguran, becek dan debu sehingga diorama tersebut diganti dengan foto tiga dimensi (3D) jenis hutan di Indonesia seperti foto 6b.

Tabel 4.7 Tabel Perbandingan Sebelum dan Sesudah Revitalisasi 6

Museum Sebelum di Revitalisasi 2015	Museum Setelah di Revitalisasi 2021
	
	
Foto 7a. Tampak koleksi jenis hutan. (dokumen museum kehutanan).	Foto 7b. Tampak koleksi jenis hutan.(dokumen Peneliti tahun 2021).

Ruang koleksi tata pameran selanjutnya yaitu hasil kehutanan yang dimana berisi koleksi dari hasil-hasil kekayaan hutan yang dapat diolah menjadi suatu produk ataupun benda yang bermanfaat dari hutan. Sebelum dilakukan revitalisasi, koleksi yang dimiliki sedikit, kemudian vitrin yang terlihat kuno dan kotor serta tidak ada pencahayaan didalamnya sehingga koleksi tidak terlihat dengan jelas dan kurang menarik seperti pada foto 7a. Setelah dilakukan revitalisasi vitrin koleksi hasil kehutanan terlihat bersih, terata sesuai dengan jenisnya masing-masing serta pencahayaan yang membuat koleksi terlihat jelas dan jauh lebih menarik seperti pada foto 7b.

Tabel 4.8 Tabel Perbandingan Sebelum dan Sesudah Revitalisasi 7

Museum Sebelum di Revitalisasi 2015	Museum Setelah di Revitalisasi 2021
	
	
	
<p>Foto 7a. Tampak koleksi hasil kehutanan. (dokumen museum kehutanan).</p>	<p>Foto 7b. Tampak koleksi hasil kehutanan. (dokumen Peneliti tahun 2021).</p>

Memasuki koleksi tata pameran yang terakhir yaitu koleksi tentang hasil dan contoh kayu dari beberapa jenis pohon yang ada di Indonesia. Sebelum di revitalisasi koleksi ini di letakkan secara tida teratur, tidak memiliki keterangan yang cukup jelas, tidak ada pencahayaan dan tidak ada visualisasi seperti foto 8a.

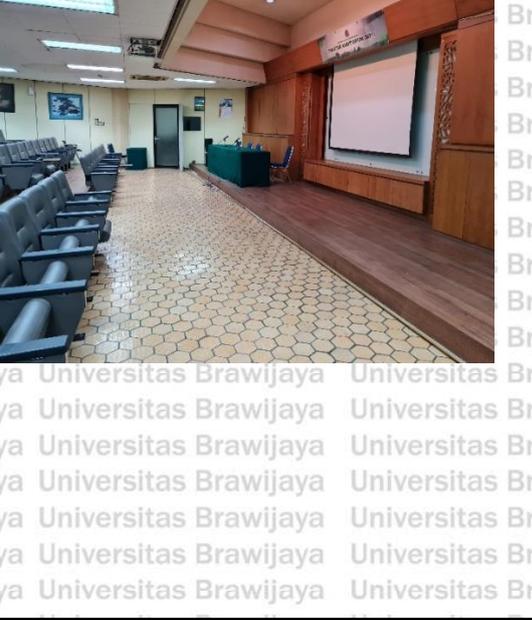
Setelah dilakukan revitalisasi koleksi ini di tata di sebuah sudut dekat dengan pintu masuk dan keluar museum sehingga mudah dilihat, terdapat keterangan dan visualisasi serta dilapisi dengan cairan varnish agar terlihat berkilau dan pencahayaan terhadap koleksi seperti foto 8b.

Tabel 4.9 Tabel Perbandingan Sebelum dan Sesudah Revitalisasi 8

Museum Sebelum di Revitalisasi 2015	Museum Setelah di Revitalisasi 2021
	
	
<p>Foto 8a. Tampak koleksi hasil dan contoh kayu. (dokumen museum kehutanan).</p>	<p>Foto 8b. Tampak koleksi hasil dan contoh kayu. (dokumen Peneliti tahun 2021).</p>

Selanjutnya setelah dilakukan revitalisasi terdapat beberapa penambahan koleksi yang merupakan permintaan khusus dari Menteri lingkungan hidup dan kehutanan yaitu koleksi tujuh taman nasional favorit yang biasa dijadikan masyarakat Indonesia untuk berkunjung, dan juga merevitalisasi ruangan teater yang ada didalam gedung museum seperti foto 9a dan 9b. Diluar dari koleksi yang ada didalam gedung museum, museum kehutanan memiliki koleksi diluar Gedung seperti kereta api peninggalan zaman belanda untuk mengangkut hasil kayu dan ada taman hutan kota arboretum sebagai bentuk koleksi hidup yang dimiliki oleh museum seperti pada foto 9c dan 9d.

Tabel 4.10 Tabel Perbandingan Sesudah Revitalisasi 8

Museum Setelah di Revitalisasi 2015	Museum Setelah di Revitalisasi 2021
 <p>Exhibit of Mount Bromo National Park (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru) with a large mural and informational panels.</p>	 <p>Interior view of a theater room with rows of blue seats and a stage area.</p>
 <p>Exhibit of Komodo National Park (Taman Nasional Komodo) featuring a large mural of Komodo dragons and informational panels.</p>	 <p>Interior view of the theater room after renovation, showing a modern stage area with a large screen and updated seating.</p>
<p>Foto 9a. Tampak koleksi taman nasional. (dokumen museum kehutanan).</p>	<p>Foto 9b. Tampak hasil revitalisasi ruang teater. (dokumen Peneliti tahun 2021).</p>



2. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti terkait implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah No.66 tahun 2015 tentang revitalisasi museum.

Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo KLHK didapatkan dua aspek utama, yaitu pendukung internal dan eksternal. Faktor pendukung diantaranya , dukungan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dikeluarkannya Peraturan Pemerintah, dan hasil pergantian pejabat serta kunjungan eselon 1 dan 2, serta sikap positif dari kunjungan pengunjung. Sebagaimana dikatakan oleh Bapak

Bambang Hendroyono selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengatakan bahwa :

“Faktor pendukung yang utama jelas dari eksternal ya mas, yaitu dikeluarkannya PP tentang museum yang didalamnya terdapat museum harus melakukan revitalisasi untuk penyegaran dan menarik minat masyarakat berkunjung ke museum dan tidak kalah dengan museum yang dikelola oleh museum swasta. Selain itu, kalo untuk faktor internal tentu adanya arahan dari ibu menteri dan sarana yang disediakan untuk melakukan revitalisasi”. (Wawancara dengan bapak Bambang, Selasa 2 Maret 2021).

Pernyataan tersebut didukung dan berkaitan dengan yang dikatakan oleh bapak Samidi selaku kepala biro umum kementerian lingkungan hidup dan kehutanan yang mengatakan bahwa :

“Kalo faktor internal dari Kunjungan pejabat eselon 1 dan 2 pada saat pergantian jabatan di tahun 2015 ke museum dan melihat mengenai kondisi museum yang belum mengalami revitalisasi sejak awal museum berdiri. Museum terkesan kuno, tidak bersih dan kurang dapat menarik minat kunjungan. Dan kalo eksternal itu ya dari PP tentang museum itu dan sikap positif atau *feedback* dari pengunjung.”. (Wawancara dengan bapak Samidi, Senin 1 Maret 2021).

Selain itu ada empat faktor pendukung lainnya dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2016. Empat faktor tersebut adalah sumberdaya, koleksi khusus, lokasi dan fasilitas serta layanan. Dibawah ini merupakan table faktor pendukung yang terdiri dari aspek dan hasil temuan di lapangan, yaitu :

Tabel 4. 11 Tabel Faktor Pendukung

No	Aspek	Hasil Temuan
1.	Sumber Daya Manusia	Pengelola dan tenaga yang kompeten di bidangnya
2.	Koleksi Khusus	Koleksi yang dimiliki berupa koleksi kehutanan
3.	Lokasi	Lokasi museum yang dianggap sangat strategis

4.	Fasilitas dan Layanan	Fasilitas dan layanan yang dimiliki memadai sehingga pengunjung dapat memilih fasilitas dan layanan yang ingin digunakan
----	-----------------------	--

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2021.

3. Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti terkait implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah No.66 tahun 2015 tentang revitalisasi museum.

Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo KLHK didapatkan dua aspek utama, yaitu hambatan dari internal dan eksternal. Hambatan implementasi dalam melaksanakan kebijakan berupa alokasi anggaran, koordinasi dan komunikasi dengan pihak ketiga, serta kurang melek akan teknologi. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Bapak Samidi selaku kepala biro umum kementerian lingkungan hidup yang mengatakan bahwa :

“Kurangnya alokasi anggaran dana dan mungkin hal tersebut menyebabkan ide-ide dari pengelola museum belum dapat terwujud yang dapat menyebabkan motivasi pengelola museum menurun.” (Wawancara dengan bapak Samidi, Senin 1 Maret 2021).

Pernyataan tersebut didukung sebagaimana yang dikatakan oleh para pelaksana di lapangan yaitu Ibu Yuli selaku penanggung jawab dan pengelola museum yang mengatakan bahwa :

“Kendala dalam melaksanakan jelas soal anggaran yang alokasinya tidak merata sedangkan harus melakukan revitalisasi. Selain itu, juga pernah terkendala di sarana dan prasarana interior museum yang mengharuskan kami lebih sering untuk berkoordinasi dengan pihak kontraktor agar sesuai dengan kemauan kami dan mungkin kendala nya lagi sih kurang melek atau terbuka akan teknologi ya sangat di sayangkan harusnya bisa mengadopsi teknologi yang lebih untuk museum kehutanan”. (Wawancara dengan Ibu Yuli, Selasa 23 Februari 2021).

Selain itu, ada empat faktor penghambat lainnya dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2016. Empat faktor tersebut adalah anggaran, sarana dan prasarana, dukungan pimpinan, pembinaan pengelola museum, serta kerja sama. Dibawah ini merupakan table faktor penghambat yang terdiri dari aspek dan hasil temuan di lapangan, yaitu:

Tabel 4.12 Tabel Faktor Penghambat

No	Aspek	Hasil Temuan
1.	Anggaran	Alokasi anggaran yang dimiliki terbatas dan tidak merata karena berasal dari kementerian dan diatur oleh biro umum
2.	Dukungan Pimpinan	Kurangnya perhatian pimpinan mengenai kurang di perhatikannya perawatan koleksi dan pengadaan koleksi baru
3.	Kurang jumlah SDM dan Pembinaan Pengelola Museum	Kurangnya jumlah SDM yang ada untuk pengelolaan museum dan Belum adanya pelatihan pengembangan SDM berupa diklat atau workshop mengenai pengelolaan dan perkembangan museum
4.	Kerja Sama	Kurang adanya pengembangan kerja sama antar museum ataupun lembaga

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2021.

IV.4. Analisis Data

IV.4.1 Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum dalam rangka revitalisasi

fisik dan koleksi pada Museum Kehutanan Ir.Djamaludin

Suryohadikusumo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

menggunakan model pendekatan implementasi kebijakan Edward

III

Sesuai dengan konsep kebijakan publik yaitu sebagai upaya pemerintah memenuhi kebutuhan dan pemecahan masalah yang ada di masyarakat, kebijakan mengenai peraturan pemerintah tentang museum mengatur didalamnya tentang revitalisasi untuk meningkatkan citra dan kualitas museum kepada masyarakat. Implementasi dari suatu kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa adanya implementasi, suatu kebijakan hanyalah sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam pemerintahan maupun kehidupan masyarakat, dan tanpa kebijakan maka tidak ada acuan atauan metode yang dapat diimplementasikan.

Museum berdasarkan International Council of Museum (ICOM) tahun 2007 merupakan suatu badan tetap, tidak tergantung kepada siapa pemiliknya melainkan harus tetap ada. Museum bukan hanya merupakan tempat kesenangan, tetapi juga untuk kepentingan studi dan penelitian. Museum terbuka untuk umum dan kehadiran serta fungsi-fungsi museum adalah untuk kepentingan dan kemajuan masyarakat.

Sedangkan revitalisasi museum menurut Danisworo & Martokusumo (2002) adalah upaya untuk meningkatkan kualitas museum dalam melayani masyarakat sesuai dengan fungsinya, sehingga museum dapat menjadi tempat yang dirasakan sebagai kebutuhan untuk dikunjungi yang merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam peningkatan citra museum. Adanya kebijakan revitalisasi museum di Indonesia, akan berdampak luas dan manfaatnya sangat besar. Museum akan berkembang menjadi lebih baik dan masyarakat semakin kenal dan cinta dengan museumnya. Diharapkan, dengan adanya revitalisasi museum ini, bisa memunculkan kesadaran untuk menempatkan kembali museum bukan sebagai tempat yang ditakuti oleh masyarakat. Museum bisa menjalankan fungsi utamanya sebagai tempat *research*, *education*, dan *entertainment*.

Hal ini berlaku pada museum baik museum umum maupun khusus atau tematik milik instansi pemerintah maupun instansi swasta salah satunya adalah museum milik pemerintah museum kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo kementerian lingkungan hidup dan kehutanan. Adapun ruang lingkup yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 yaitu meliputi pendirian museum, pengelolaan koleksi dan pengelolaan museum. Pada bagian ini akan diuraikan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh dari observasi dan wawancara yang selanjutnya akan dibandingkan dengan peraturan yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 dan beberapa teori dari kajian Pustaka.

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy process*) sekaligus kajian yang sangat krusial.

Bersifat krusial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, jika tidak dipersiapkan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan (Widodo 2010:85). Oleh karena itu, diperlukanlah koordinasi dan kerja sama yang baik antar-instansi bagi keberhasilan pelaksanaan suatu program.

Proses implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah tentang revitalisasi museum tidak selalu berjalan dengan lancar. Masih terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat proses implementasi kebijakan. Kendala tersebut merupakan kendala yang mendasar, diantaranya mengenai sumberdaya manusia, ketersediaan dana, dan proses komunikasi yang dilakukan oleh implementor kebijakan. Oleh sebab itu kendala-kendala tersebut di analisis penyebabnya berdasarkan teori model implementasi kebijakan George C. Edwards III.

Model implementasi Edward III dipilih dan cocok dibandingkan dengan teori lain dalam penelitian ini karena Implementasi PP Nomor 66 Tahun 2015 merupakan salah satu kebijakan yang bersifat top-down yang dimana bukan karena adanya desakan dari bawahan kepada atasan kebijakan tersebut dikeluarkan, tetapi pemerintah pusat memang mengeluarkan kebijakan tersebut untuk merubah dan memperbaiki tampilan, citra dan pengelolaan museum milik pemerintah pusat kepada masyarakat. Salah satu karakteristik model kebijakan top-down adalah kebijakan yang jelas seperti standar, strategi dan aturan yang baku.

Keberhasilan dari penerapan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor dan indikator. Faktor sendiri merupakan hal-hal yang akan diukur, yang memengaruhi (menghambat, atau mendukung) keberhasilan dari penerapan implementasi kebijakan yang akan diukur tersebut. Dalam hal ini, terdapat empat

faktor yang menentukan keberhasilan dari penerapan implementasi kebijakan, yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi (sikap), dan struktur birokrasi. Sedangkan untuk indikator sendiri merupakan tanda-tanda, ciri-ciri, dan gejala-gejala dari faktor. Artinya, indikator adalah sesuatu yang harus *observable* (dapat diamati).

Indikator inilah yang akan menjadi item dalam skala penentuan keberhasilan suatu faktor. Indikator ini juga menggambarkan secara spesifik kondisi sebuah faktor. Dalam hal ini, terdapat sebelas indikator yang menentukan keberhasilan sebuah faktor, yakni transmisi, kejelasan, konsistensi, sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, sumber daya kewenangan, *rekrutment* pegawai, insentif, fragmentasi dan *standart operational procedures*.

1. Komunikasi

Salah satu hal yang penting dalam implementasi sebuah kebijakan yaitu isi dari kebijakan itu sendiri. Sebab kebijakan dapat berjalan dengan efektif apabila pelaksanaannya memahami isi yang menjadi maksud dan tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan, dimana maksud dan tujuan itu dapat dilihat dalam isi kebijakan yang tertuang dalam pasal di dalam peraturan pemerintah. Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi atau tujuan kebijakan serta tidak jelasnya sasaran kebijakan itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa sejauh ini faktor komunikasi yang dilakukan oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan kepada jajarannya mengenai PP Nomor 66 Tahun 2015 sudah sesuai dan jelas dengan tujuan serta sasaran kebijakan yang tepat.

Komunikasi dalam dimensi transmisi yang dilakukan dari penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan pemerintah pusat kepada pelaksana atau sasaran kebijakan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dalam hal ini museum kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo KLHK sudah berhasil sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Edward III dalam teori model implementasi kebijakan publik. Menurut Edward III (dalam Widodo, 2010), Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan public disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, kegiatan yang dilakukan dalam implementasi peraturan pemerintah tentang revitalisasi museum yaitu komunikasi antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Sekretaris Jenderal Kementerian, Kemudian informasi tersebut disampaikan kepada jajaran dibawahnya seperti kepala biro untuk selanjutnya di informasikan kepada para pelaksana kebijakan.

Dalam hal komunikasi dimensi kejelasan, komunikasi mengenai kejelasan peraturan pemerintah mengenai kebijakan revitalisasi museum yang telah dilakukan oleh para pimpinan kementerian disampaikan kepada para pelaksana terkait dengan adanya revitalisasi museum yaitu melakukan penyampaian informasi dan tindakan lanjutan kepada kepala bidang karya cetak dan kepustakaan serta dilanjutkan kepada pengelola museum Terkait kejelasan mengenai informasi tersebut, realisasi yang dilakukan adalah dengan merencanakan pembentukan tim pembangunan revitalisasi museum sebagai bentuk mengetahui apa yang menjadi

maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik dan pencarian referensi design serta kontraktor untuk revitalisasi museum. Hal tersebut juga sudah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Edward III dalam teori model implementasi kebijakan publik. Menurut Edward III (dalam Widodo, 2010), Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

Dimensi yang terakhir dalam komunikasi menurut Edward III dalam teori model implementasi kebijakan publik yaitu dimensi konsistensi Menurut Edward III (dalam Widodo, 2010), Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini, konsistensi yang dilakukan adalah dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) tim pembangunan revitalisasi museum beserta dengan honorarium dan melakukan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan pihak design interior yang sudah ditetapkan serta mempersiapkan kondisi museum untuk dilakukan penutupan sementara terkait proses revitalisasi.

Dari hasil penelitian disebutkan bahwa proses komunikasi yang terjadi dalam implementasi peraturan pemerintahan tentang revitalisasi museum sudah berjalan dengan baik, dikarenakan penyampaian informasi yang sudah jelas,

persamaan persepsi dan kemampuan implementor dalam menangkap dan memahami informasi yang disampaikan juga sudah sama sehingga dapat dengan cepat untuk merealisasikannya. Selain itu, faktor komunikasi yang dilakukan juga tidak hanya terbatas didalam internal kementerian atau museum saja, tetapi juga komunikasi dilakukan ke luar kementerian atau museum yaitu dengan dilakukannya komunikasi dengan pihak *design interior* dan kontraktor. Faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan Edward III berkaitan erat juga dengan faktor disposisi dikarenakan disposisi dalam implementasi kebijakan juga di pengaruhi oleh transmisi dalam melakukan komunikasi, kejelasan terkait informasi dan konsistensi dalam pemberian informasi. Berikut ini tabel keterangan dari implementasi dalam teori model kebijakan publik Menurut Edward III pada faktor komunikasi, yaitu:

Tabel 4.13 Tabel Implementasi Faktor Komunikasi

Indikator	Keterangan
Komunikasi Dimensi Transmisi	Berhasil dan sesuai
Komunikasi Dimensi Kejelasan	Berhasil dan sesuai
Komunikasi Dimensi Konsistensi	Berhasil dan sesuai

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2021

2. Sumberdaya

Ketersediaan sumber daya merupakan salah satu syarat keberhasilan dalam implementasi sebuah kebijakan. Berdasarkan pada pendapat George C. Edwards III (dalam Widodo,2010), meskipun komunikasi sudah dilaksanakan dengan jelas dan konsisten, tetapi jika pelaksana kebijakan kekurangan sumberdaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam implementasi, maka kebijakan implementasi kebijakan sulit dilakukan. Menurut Van Matter dan Van Horn (dalam Nugroho, 2014) bahwa dalam suatu implementasi kebijakan perlu dukungan

sumberdaya, baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya material (*material resources*). Sumberdaya yang paling penting dari dua sumberdaya tersebut adalah sumberdaya manusia karena disamping sebagai subyek implementasi kebijakan, sekaligus juga sebagai objek. Faktor sumberdaya ini memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan.

Jika dikaitkan dengan teori standarisasi museum dalam indikator organisasi dan ketenagakerjaan (dalam Yogaswara,2011), museum harus memiliki organisasi dan ketenagaan di museum, yang sekurang-kurangnya terdiri dari kepala museum, bagian administrasi, pengelola koleksi kurator, bagian konservasi - perawatan, bagian penyajian preparasi, bagian pelayanan masyarakat dan bimbinganedukasi, serta pengelola perpustakaan. Berdasarkan PP Nomor 66 Tahun 2015, sumber daya manusia yang harus dimiliki oleh sebuah museum setidaknya ada register, kurator, konservator, penata pameran, educator dan humas museum. Namun, pada kenyataannya ketersediaan Sumber Daya Manusia dalam hal pengelolaan museum masih sangat kurang belum memenuhi standar yang ada pada PP Nomor 66 Tahun 2015 sehingga pengelola museum melakukan upaya pengoptimalan kinerja pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada, tetapi upaya ini dinilai kurang maksimal, karena membebani pekerjaan diluar kemampuan dan berdampak pada pelaksanaan kebijakan menjadi tidak efektif dan tidak dapat memaksimalkan pengelolaan museum.

Sumber daya anggaran berdasarkan teori Edward III model implementasi kebijakan publik (dalam Widodo, 2010), anggaran adalah salah satu hal terpenting dalam melaksanakan kebijakan dan jika terbatasnya anggaran yang tersedia

menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Sumber daya anggaran atau finansial pada museum kehutanan mengandalkan dari anggaran tahunan kementerian saja. Anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan museum hanya sebesar 30 juta rupiah saja yang berasal dari anggaran kementerian yang di alokasikan ke biro umum dan harus sesuai dengan peraturan menteri. Anggaran yang jumlahnya sangat terbatas masih dirasa kurang untuk melakukan perawatan maupun pengadaan koleksi pada museum. Anggaran tersebut hanya digunakan untuk perawatan seperti pencucian pasir, pelapisan koleksi pohon maupun batang kayu dengan *varnish* yang dilakukan oleh pihak ketiga. Untuk melaksanakan program-program museum terhambat juga karena alokasi anggaran yang minim dan terbatas. Keterbatasan sumber daya anggaran tersebut yang menyulitkan petugas lapangan dalam membuat program secara optimal. Hal tersebut juga belum sesuai dengan standar yang terdapat pada PP Nomor 66 Tahun 2015, dikarenakan anggaran museum belum memenuhi seluruh kebutuhan yang dibutuhkan oleh museum sehingga masih terdapat hambatan dalam pengelolaan museum.

Dalam hal sumber daya peralatan, sebagaimana dikatakan oleh Edward II dalam dalam teori model implementasi kebijakan publik (dalam Widodo,2010) bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo KLHK sudah sesuai dengan teori tersebut dengan melakukan pencatatan ulang

terkait sarana dan prasarana apa saja yang kurang ataupun perlu ditambahkan.

Fasilitas yang tersedia di Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo

KLHK meliputi standar fasilitas umum berupa loker penitipan barang, AC, akses

wifi, ruang audio visual, teater, perpustakaan dan ruang rapat untuk didalam

Gedung museum. Kemudian untuk fasilitas diluar seperti di arboretum atau hutan

kota terdapat *cafe* arborea, dan jalur untuk pengunjung disabilitas. Selain itu masih

terdapat juga fasilitas umum lainnya seperti toilet, musholla, ruang relaksasi dan

lahan parkir yang luas untuk kendaraan pengunjung baik kendaraan roda dua, roda

empat maupun bus. Berdasarkan hal tersebut, sumber daya peralatan sudah sesuai

dengan standar yang terdapat pada PP Nomor 66 Tahun 2015 yaitu menyediakan

kelengkapan minimal peralatan untuk museum dan mempunyai zona publik.

Sumber daya yang terakhir yaitu sumber daya kewenangan juga sudah

diterapkan dalam tolak ukur keberhasilan implementasi dalam hal ini pihak

pimpinan kementerian menyerahkan kepada kepala bidang pengelolaan karya cetak

dan kepustakaan untuk mengambil keputusan urgent dan cepat. Selain itu, faktor

sumber daya yang dilakukan juga tidak hanya terbatas didalam internal kementerian

atau museum saja, tetapi juga komunikasi dilakukan ke luar kementerian atau

museum yaitu dengan dilakukannya komunikasi dengan pihak *eksternal* terkait

pembelian peralatan, alokasi anggaran dan kewenangan. Faktor sumber daya dalam

implementasi kebijakan Edward III berkaitan erat juga dengan faktor struktur

birokrasi dikarenakan didalam sumber daya dalam implementasi kebijakan juga di

pengaruhi oleh fragmentasi dan SOP dalam hal pembagian tugas dalam pengelolaan

museum dan pemberian layanan kepada masyarakat. Berikut ini tabel keterangan

dari implementasi dalam teori model kebijakan publik Menurut Edward III pada faktor Sumber Daya, yaitu:

Tabel 4.14 Tabel Implementasi Faktor Sumber Daya

Indikator	Keterangan
Sumber Daya Manusia	Belum Berhasil
Sumber Daya Anggaran	Belum Berhasil
Sumber Daya Peralatan	Berhasil dan sesuai
Sumber Daya Kewenangan	Berhasil dan sesuai

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2021

3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Disposisi merupakan kecenderungan sikap, keinginan dan komitmen pelaksana kebijakan untuk melaksanakan sebuah kebijakan yang ditetapkan.

Disposisi yang diungkapkan oleh George C. Edwards III sebagai pendorong keberhasilan implementasi kebijakan, disposisi pelaksana kebijakan akan mempengaruhi kinerja kebijakan sebab jika pelaksanaan kebijakan didasari oleh sikap, keinginan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan dengan baik, maka keberhasilan implementasi kebijakan akan semakin besar.

Dalam implementasi peraturan pemerintan tentang revitalisasi museum, kemauan dan kesungguhan para pelaksana dalam melakukan implementasi kebijakan implementasi peraturan pemerintan tentang revitalisasi museum dinilai sudah baik. Walaupun dengan berbagai kekurangan dan kendala yang ada, mereka tetap berusaha untuk mengelola museum untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kebijakan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pengunjung. Sesuai dengan teori Edward III (dalam Widodo,2010), yang menjadi perhatian mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan yaitu mengenai masalah rekrutmen

pegawai dan pemberian insentif. Rekrutmen pegawai, pegawai yang berada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya biro umum yang didalamnya terdapat pegawai museum sebagian besar merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk pegawai sendiri masih kekurangan untuk standar pengelolaan museum karena hanya memiliki 2 pegawai. Seperti yang kita ketahui bahwa rekrutmen PNS melalui beberapa prosedur dengan persyaratan tertentu. Selain itu rekrutmen PNS dilakukan secara terbuka dengan seleksi tertulis maupun wawancara. Sehingga dapat dikatakan bahwa pegawai museum merupakan orang-orang pilihan yang memiliki integritas tinggi dalam menjalankan tugasnya.

Selain itu untuk rekrutmen pegawai juga dapat melalui rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan wewenang dari kementerian. Akan tetapi hal tersebut belum dilakukan hingga saat ini karena tidak semudah ketika dahulu museum masih dipegang oleh yayasan manggala wanabakti dan kapasitas pegawai dibagian biro umum sudah mencapai batas maksimal. Oleh karena itu sedang di rencanakan dan di realisasikan untuk pemindahan bidang yang menaungi museum entah itu nanti ke PPID ataupun PUSDATIN disekitar tahun ini hingga 2023 karena banyak pegawai kami yang memasuki masa pensiun.

Terkait masalah pemberian insentif, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan terdapat insentif khusus dalam hal kegiatan revitalisasi dan pengelolaan museum di Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo. Pegawai disini menerima insentif Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) dan Tunjangan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Dimana pemberian

tunjangan PPTK dilaksanakan satu tahun sekali dan satu orang satu kegiatan tidak boleh double dan untuk pegawai pengelola museum masuk didalamnya. Selain itu, faktor disposisi yang dilakukan juga tidak hanya terbatas didalam internal kementerian atau museum saja, tetapi juga disposisi dilakukan ke luar kementerian atau museum yaitu dengan dilakukannya *rekrutment* pegawai. Faktor disposisi dalam implementasi kebijakan Edward III berkaitan erat juga dengan faktor komunikasi dikarenakan disposisi dalam implementasi kebijakan juga di pengaruhi oleh transmisi dalam melakukan komunikasi, kejelasan terkait informasi dan konsistensi dalam pemberian informasi terkait *rekrutment* pegawai. Berikut ini tabel keterangan dari implementasi dalam teori model kebijakan publik Menurut Edward III pada faktor Disposisi, yaitu :

Tabel 4.15 Tabel Implementasi Faktor Disposisi

Indikator	Keterangan
Rekrutment Pegawai	Belum Berhasil
Insentif	Berhasil dan sesuai

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2021

4. Struktur Birokrasi

Pendapat Edward III (dalam Widodo, 2010), struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi yaitu penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Selain itu, struktur birokrasi mencakup dimensi standar operasional prosedur yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi tugasnya.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, struktur organisasi pada Biro Umum yang menaungi museum kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo KLHK menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi.

Sedangkan pada sisi museum kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo KLHK dalam melaksanakan aktivitas pengelolaan museum terbagi tiga kelompok kerja yaitu koleksi dan konservasi, registrasi dan dokumentasi serta panduan dan bimbingan yang masing-masing mempunyai tugas pokok dan fungsi saling terkait.

Secara keseluruhan dalam struktur organisasi ini pola koordinasi yang terjalin menempatkan Kepala Biro sebagai pejabat tertinggi dimana setiap bagian-bagian organisasi terhubung dengan rantai komando langsung ke Kepala Biro Umum.

Didalam fragmentasi ini juga terdapat tiga sub bagian dalam pelaksana museum yaitu koleksi dan konservasi, registrasi dan dokumentasi serta panduan dan bimbingan yang sudah diterapkan didalam struktur organisasi museum untuk memberikan pelayanan kepada para pengunjung museum.

Implementasi peraturan pemerintah tentang revitalisasi museum belum memiliki SOP atau prosedur-prosedur kerja yang baru dan belum memiliki rencana strategis (renstra). SOP yang digunakan saat ini masih merupakan SOP dari pengelola museum sebelumnya yaitu Yayasan manggalawanabakti. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa narasumber. Sehingga museum kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo KLHK hingga saat ini masih dalam tahap membahas mengenai rancangan SOP yang baru. Belum adanya SOP baru tersebut

tentunya mengakibatkan tidak ada keseragaman para pelaksana dalam berkerja dikarenakan prosedur kerja yang digunakan masing-masing orang berbeda.

Dalam hal SOP, terdapat Pengelolaan museum yang dimana adalah tugas pokok penyelenggaraan museum karena bertujuan untuk melestarikan koleksi yang dikumpulkan berdasarkan keunikan, keklasikan serta keanehan yang dimiliki untuk menaikkan citra pemilik serta memberikan pengetahuan bagi masyarakat.

Pengelolaan museum modern dilaksanakan dengan menambah fungsi pendidikan kepada pengunjung museum sehingga fungsi pokok museum bertambah menjadi fungsi pelestarian koleksi, penelitian serta komunikasi/pendidikan. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015, indikator pengelolaan museum dapat diukur dari aktivitas pengelolaan museum yang terdiri dari dua yaitu pengelolaan teknis dan pengelolaan pelayanan.

Pengelolaan secara teknis sendiri yang dilakukan pada museum kehutanan sudah sesuai dengan PP Nomor 66 Tahun 2015, Pengelolaan teknis yang dilakukan pada museum kehutanan berupa sudah adanya ruang penyimpanan koleksi, survey benda cagar budaya atau koleksi, pembuatan replika koleksi, reinventarisasi dan dokumentasi koleksi, fumigasi koleksi, konservasi koleksi, penelitian koleksi dan pembuatan katalog koleksi. Selain itu dalam pengelolaan secara teknis juga erat kaitannya dengan anggaran, anggaran sudah ditetapkan pada museum kehutanan namun untuk alokasinya belum maksimal. Akan tetapi walaupun masih ada kendala dalam alokasi anggaran terhadap museum, museum kehutanan masih dapat menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan teknis museum walaupun dengan terbatas.

Indikator selanjutnya yaitu pengelolaan pelayanan museum, pelayanan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan pengunjung adalah tujuan utama dari teknis pelayanan ini. Pada museum kehutanan juga sudah sesuai dengan PP Nomor 66

Tahun 2015, karena dalam hal ini museum kehutanan mengutamakan kualitas layanan yang perlu diperhatikan guna meningkatkan kualitas kepuasan pengunjung dan memberikan daya tarik tersendiri untuk berkunjung Kembali ke museum ini.

Hal tersebut terbukti dari hasil wawancara dan observasi bahwa untuk pelayanan dari sisi operasional sendiri, yaitu sesuai dengan jam kerja kementerian senin-jumat mulai pukul 08.30 WIB sampai dengan 15.00 WIB. Selain itu museum kehutanan memiliki beberapa pelayanan seperti layanan pemanduan, penyediaan informasi dalam bentuk cetakan, penyelenggaraan pameran tetap, dan publikasi melalui sosial media.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan teknis dan pelayanan museum itu dititik beratkan kepada bagaimana caranya menyusun kebijakan dalam hal pengelolaan museum itu sendiri. Artinya kebijakan dalam hal merumuskan program-program kegiatan untuk museum atau museum yang diselenggarakan, mengenai hal pembinaan program-program kegiatan operasionalnya, sesuai dengan tugas dan fungsi-fungsi museum bagaimana membina sarana, tenaga, dan menyusun rencana anggaran untuk pengelolaan museum itu. Faktor struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Edward III berkaitan erat juga dengan faktor sumber daya dikarenakan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan juga di pengaruhi oleh sumber daya manusia dalam hal fragmentasi, kewenangan dalam hal pembuatan SOP serta anggaran terkait insentif. Berikut ini tabel

keterangan dari implementasi dalam teori model kebijakan publik Menurut Edward III pada faktor Struktur Birokrasi, yaitu :

Tabel 4.16 Tabel Implementasi Faktor Struktur Birokrasi

Indikator	Keterangan
Fragmentasi	Berhasil dan sesuai
<i>Standard Operating Procedure</i>	Berhasil dan sesuai

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2021

IV.4.2 Analisis Hasil, Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dari revitalisasi fisik dan koleksi museum pada Museum Kehutanan Ir.Djamaluddin Suryohadikusumo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1. Hasil Revitalisasi

Menurut teori revitalisasi museum dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dikutip (dalam Trilestari, 2019), Untuk aspek fisik dan koleksi sendiri, paling tidak museum diharapkan bisa mengubah nuansanya menjadi modern agar nyaman dinikmati oleh pengunjung, tidak terasa tua dan seram lagi. Dalam penjelasan mengenai koleksinya, museum sebaiknya memiliki *storyline* agar pengunjung mendapatkan pengetahuan yang runtut pada hal yang akan disampaikan. Luas ruangan yang memadai juga berperan agar pengunjung nyaman, juga dilengkapi dengan penyejuk udara dan cahaya lampu yang bisa membuat suasana menjadi hidup. Selain itu, agar pengunjung tidak mudah bosan serta lebih mudah belajar di museum, perlu ditambahkan teknologi informasi yang dominan, bisa berupa diorama, permainan interaktif, layar sentuh, film dan video, dan lain sebagainya.

Dalam teori revitalisasi museum disebutkan juga bahwa fasilitas yang disediakan oleh museum juga perlu diperhatikan. Minimal, sebuah museum memiliki fasilitas utama berupa ruang pameran tetap dan temporer, ruang administrasi untuk karyawan, toilet, ruang dan peralatan medis, internet, auditorium, alat-alat pengamanan gedung, fasilitas untuk lansia, penyandang disabilitas, serta ruang untuk ibu menyusui dan balita. Sedangkan untuk di luar gedung, paling tidak disediakan fasilitas berupa tempat parkir, pos satpam, taman, sarana ibadah, pagar pengaman, perpustakaan, souvenir shop atau cafe, panggung terbuka, genset, drainase yang baik, rumah dinas, guest house, kendaraan operasional, dan fasilitas lainnya. Jika memungkinkan, perlu juga menyediakan fasilitas berupa CCTV, ruang loker, pengatur suhu dan kelembaban, alat komunikasi, sound system, ruang kontrol security, hotspot internet, pintu darurat, dan alat-alat peringatan dini darurat.

Berdasarkan teori revitalisasi museum tersebut dan di cocok kan dengan hasil observasi dan wawancara peneliti pada museum kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo KLHK sendiri, revitalisasi fisik dan koleksi bangunan dilakukan pada akhir 2015 selama waktu 3 bulan pengerjaan. Hasil dari revitalisasi tersebut di fokuskan pada tampilan luar, pengubahan tata letak koleksi, alur atau story line koleksi dan pembaharuan serta perawatan koleksi. . Perubahan yang dapat dilihat mulai dari pintu masuk yang lebih terlihat modern dan rapi. Kemudian dibagian dalam sudah memenuhi standar museum yaitu seperti adanya beberapa fasilitas sepeeti meja penerima tamu, spot foto dengan nama utama museum, toilet, AC diberbagai sisi, dan petunjuk informasi di setiap koleksi. Dari segi vitrin koleksi

ruang pameran mengalami perubahan yang signifikan dengan vitrin yang lebih modern dan rapi serta ada petunjuk mengenai jenis koleksi dibagian atas koleksi.

Kemudian untuk sisi koleksi, museum kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo KLHL koleksi sudah ditata dan diatur sesuai *story line* yang ada oleh curator mulai dari awal pejuang rimba, peralatan kehutanan, kendaraan kehutanan, jenis-jenis hutan, diorama taman nasional, dan hasil-hasil kehutanan.

Dari segi pencahayaan, pencahayaan pada museum jauh lebih terang sehingga menarik pengunjung termasuk pencahayaan terhadap koleksi yang ada diberi cahaya. Terakhir, dari segi perawatan dan informasi mengenai koleksi, koleksi yang ada pada ruang pameran sudah dilapisi dengan cairan varnish sehingga koleksi lebih awet dan tahan terhadap rayap. Informasi pada koleksi pun diberi penjelasan dan gambar menarik serta terdapat *QR code* yang dapat di scan melalui ponsel pengunjung untuk informasi lebih detail yang dapat dilihat di ponsel. Untuk ruangan didalam museum pun mengalami revitalisasi seperti ruang teater dan ruang rapat yang lebih modern. Untuk koleksi yang berada diluar museum pun mendapatkan perawatan seperti koleksi kereta peninggalan zaman belanda yang di cat ulang agar tidak terlihat kusam dan koleksi hidup di arboretum ditata dengan ditambahkan informasi dibawah pohon dan dirawat agar ketika pengunjung ke arboretum merasa nyaman. Selain itu, jika dikaitkan dengan teori revitalisasi museum, fasilitas mengenai café juga sudah disediakan oleh pihak museum yang dimana terdapat café arborea didalam kawasan arboretum milik museum.

Hal tersebut sudah sesuai dengan PP Nomor 66 Tahun 2015 tentang museum yang didalamnya mengatur tentang revitalisasi. Hasil revitalisasi dapat

dikatakan sangat baik karena mengalami perubahan yang cukup signifikan bahkan mendapatkan apresiasi dari pejabat kementerian eselon 1 dan 2 terhadap hasil revitalisasi serta pengunjung museum (masyarakat) yang dapat dilihat dari jumlah kunjungan masyarakat ke Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo KLHK sehingga dirasa museum sudah menerapkan teori revitalisasi museum dan mengimplementasikan PP Nomor 66 Tahun 2015.

2. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti terkait implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah No.66 tahun 2015 tentang revitalisasi museum Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo KLHK terdapat empat faktor pendukung, yaitu :

1. Sumber Daya

Menurut model Edwards III, sumber daya merupakan komponen terpenting dalam implementasi kebijakan, jika implementor kekurangan sumber daya yang memadai, tentu saja implementasi kebijakan tidak akan berjalannya efektif.

Sumber daya yang dimaksud pada faktor pendukung ini berupa Sumber Daya Anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten. SDA yang dimaksud adalah dengan disediakannya anggaran, sarana dan prasarana oleh pihak kementerian dalam rangka mempercepat proses revitalisasi. SDM yang kompeten ini sangat mendukung dalam implementasi Peraturan Pemerintah No.66 tahun 2015 terutama dalam standar pengelolaan koleksi museum dan standar pengelolaan museum. Pada indikator pengelolaan koleksi museum dan pengelolaan museum, museum harus dilaksanakan secara mandiri,efisien, efektif, dan akuntabel. SDM

yang dimiliki Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo KLHK seperti kurator dan konservator sudah kompeten di bidangnya masing-masing. Sehingga dengan SDM kompeten ini Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo KLHK sudah menerapkan standar pengelolaan koleksi museum dan pengelolaan museum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.66 tahun 2015.

2. Koleksi Khusus

Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo KLHK yang digolongkan sebagai museum khusus atau tematik, dengan memiliki koleksi yang tidak dimiliki museum pada umumnya. Koleksi khusus menjadi faktor pendukung dalam implementasi peraturan pemerintah mengenai revitalisasi museum, dikarenakan hampir seluruh koleksi yang tersedia di Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo KLHK merupakan hasil koleksi kehutanan serta koleksi pribadi maupun hasil sitaan yang ada diseluruh Indonesia. Hal ini mendukung Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo KLHK dalam menerapkan standar koleksi Peraturan Pemerintah No.66 tahun 2015 yaitu pada indikator jenis koleksi.

3. Lokasi Museum

Berdasarkan hasil observasi peneliti dan wawancara dengan pengunjung selaku informan, lokasi Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo KLHK dinilai sudah sangat strategis. Hal ini menjadi faktor pendukung dalam penerapan indikator lokasi pada Peraturan Pemerintah No.66 tahun 2015.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terletak di Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270, Gedung Manggala Wanabakti blok VI. Museum

Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo KLHK sendiri berada di Gedung museum dan perpustakaan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo KLHK atau yang lebih dikenal dengan Muspera, dan tepat berada didekat gerbang pintu masuk kompleks kementerian lingkungan hidup dan kehutanan Manggala Wanabakti, sertaberada di lantai 1 gedung tersebut. Pengunjung dapat dengan mudah menuju Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo dari gerbang pintu masuk.

Lokasi Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo KLHK dapat diakses dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Jika pengunjung menggunakan kendaraan pribadi dari jalan Jenderal Gatot Subroto setelah Gedung MPR dan DPR RI, pengunjung dapat belok kiri mengarah ke jalan Tentara Pelajar kemudian langsung dapat melihat kompleks kementerian lingkungan hidup dan kehutanan Manggala Wanabakti di sebelah kiri jalan.

Jika menggunakan transportasi umum bisa diakses dengan transjakarta rute Pinang Ranti – Pluit ataupun PGC – Grogol 2 dengan halte terdekat yaitu halte Transjakarta Slipi Petamburan. Jika pemustaka menggunakan KRL (Kereta Rel Listrik) stasiun terdekat dari Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo KLHK yaitu Stasiun Palmerah yang kemudian dilanjutkan dengan menyebrang stasiun dan berjalan kaki. Selain itu, dapat juga diakses dengan transportasi umum seperti mikrolet, transportasi online, bus, dan bajaj. Lokasi Kementerian Lingkungan Hidup yang berada diantara gedung MPD dan DPR RI, gedung pemerintahan, gedung TV Nasional Republik Indonesia (TVRI), dan Stadion Gelora Bung Karno (GBK) menjadikan lokasi ini mudah ditemui.

4. Fasilitas dan Layanan

Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo KLHK telah menyediakan fasilitas dan layanan yang memadai. Keberagaman jenis fasilitas dan layanan yang disediakan Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo KLHK menjadikan hal ini sebagai faktor pendukung dalam penerapan revitalisasi Peraturan Pemerintah No.66 tahun 2015. Sementara bagi pengunjung, fasilitas dan layanan yang memadai dapat mendukung mereka dalam memilih fasilitas dan layanan yang diinginkan guna memenuhi kebutuhan informasinya. Memiliki fasilitas dan layanan yang memadai juga berpengaruh untuk hasil kepuasan pengunjung terhadap layanan Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo KLHK. Fasilitas-fasilitas yang disediakan Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo demi mendukung pelayanan perpustakaan yaitu seperti jalur kursi roda, toilet, musholla, ruang teater, ruang rapat, wifi dan tempat paker luas untuk kendaraan roda dua maupun roda empat.

3. Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti terkait implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah No.66 tahun 2015 tentang revitalisasi museum Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo KLHK terdapat empat faktor penghambat, yaitu :

1. Anggaran

Keterbatasan anggaran yang dimiliki Biro Umum menjadi salah satu faktor penghambat. Menurut model implementasi Edwards III, jika implementor kekurangan sumber daya yang memadai tentu implementasi kebijakan tidak akan

berjalan secara efektif, termasuk kekurangan sumber daya finansial yaitu anggaran.

Anggaran Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo KLHK hanya bersumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Anggaran yang disediakan untuk Biro Umum atau Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo KLHK, mengacu pada masing-masing seksi yang ada dan disesuaikan dengan urgensi dan keperluannya.

Anggaran yang disediakan untuk Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo KLHK masih dianggap belum sesuai kebutuhan museum.

Akibatnya, keterbatasan anggaran ini menjadikan indikator pada pendirian museum

Peraturan Pemerintah No.66 tahun 2015 belum dapat diterapkan di Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo, yaitu organisasi dan ketenagakerjaan.

Demi mencapai anggaran yang sesuai kebutuhan, Biro umum perlu melakukan analisa ulang standar biaya untuk pengelolaan museum. Tujuan dari Analisa ini dapat digunakan sebagai pedoman agar setiap biaya yang dialokasikan untuk program atau kegiatan dapat diterima dengan wajar. Sehingga, dengan informasi biaya satuan program atau kegiatan tersebut, Museum Kehutanan Ir.Djamaludin

Suryohadikusumo KLHK dapat menggunakannya sebagai salah satu acuan dalam mengelola anggaran yang lebih baik lagi, serta Peraturan Pemerintah No.66 tahun 2015 revitalisasi museum dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien.

2. Dukungan Pimpinan

Hasil wawancara dengan informan menyimpulkan bahwa keberadaan Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo KLHK masih kurang diperhatikan oleh pimpinan Kementerian padahal sudah dilakukan revitalisasi.

Aspek ini melihat bahwa Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo KLHK dalam implementasi Peraturan Pemerintah No.66 tahun 2015 masih kurang dalam organisasi dan ketenagakerjaan. Fungsi struktur birokrasi menurut model Edwards III yaitu untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan implementor atau pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan serta tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi.

Kelompok sasaran juga harus diinformasikan mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan tersebut, sehingga mengurangi distorsi implementasi.

Kurangnya dukungan dari pimpinan dirasa karena keberadaan museum masih dianggap belum penting di wilayah kementerian / lembaga karena hanya menjalankan tanggung jawab pelayanan kunjungan saja. Padahal, Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo KLHK saat ini masih meraih sertifikat standarisasi museum dengan nilai C. Penilaian ini hampir membuktikan bahwa pelayanan publik dan pengelolaan pada Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo belum meraih predikat layanan prima, maka diperlukan dukungan pimpinan untuk memperoleh predikat yang lebih baik tersebut.

3. Kurangnya jumlah SDM dan Pembinaan Pengelola Museum

Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo KLHK harus dikelola dengan baik agar dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan. Tenaga pengelola museum dituntut untuk memiliki kemampuan dan kecakapan dalam mengelola museum. Saat ini di Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo KLHK belum semua tenaga pengelola museum memiliki kemampuan dan kecakapan

dalam mengelola museum. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti dari segi pendidikan, kepedulian, dan motivasi.

Keadaan seperti ini berdampak pada pelaksanaan kinerja tenaga pengelola museum yang dapat menyebabkan kurangnya ketercapaian tujuan museum. Salah satu solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan pembinaan tenaga pengelola museum. Pembinaan tenaga pengelola museum dimaksudkan selain menambah kompetensi yang dimiliki juga untuk meningkatkan daya guna tenaga pengelola museum tersebut.

Pembinaan tenaga pengelola museum dapat dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah No.66 tahun 2015 dengan cara mengikuti seminar/workshop pengelolaan museum baik kurator, konsektor maupun teknisi museum. Pembinaan tenaga pengelola museum juga dapat dilakukan untuk mengembangkan disposisi yang dimiliki tenaga museum, seperti kejujuran, komitmen, dan demokratis.

Menurut model Edwards III bahwa apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

4. Kerja Sama

Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo KLHK sebenarnya belum memenuhi Peraturan Pemerintah No.66 tahun 2015 dalam melakukan kerja sama yaitu dengan museum lain, pihak swasta dan kementerian/instansi lainnya untuk mengembangkan koleksi museum. Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo masih kurang dalam hal kerja sama dengan museum lainnya.

Ada dua faktor yang menjadi dasar untuk mendorong pentingnya kerja sama, yaitu:

a. Adanya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dapat memberikan peluang dan dapat menunjang museum dalam pelaksanaan kerja sama agar dapat berjalan lebih cepat, mudah, dan murah.

b. Kerja sama dilakukan karena memungkinkan untuk penghematan fasilitas, sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan waktu.

Kerja sama dilakukan dalam rangka keperluan untuk pengembangan museum dalam pelayanan perpustakaan dan sebagai alternative dalam mengoptimalkan daya pakai koleksi dan informasi. Selain faktor pendorong kerja sama, ada beberapa bentuk kerja sama yang dapat dilakukan, yaitu :

a. Kerja sama pengadaan, pertukaran dan redistribusi koleksi museum.

b. Kerja sama penyediaan fasilitas dan teknologi.

d. Kerja sama antar kurator dan konsevator untuk memecahkan beberapa permasalahan yang dihadapi yang dapat menambah wawasan tenaga pengelola museum.

e. Kerja sama pemberian jasa informasi

BAB V PENUTUP

V.I Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Rangka Revitalisasi Fisik dan Koleksi Museum (Studi Pada Museum Kehutanan Ir.Djamaluddin Suryohadikusumo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)” yang telah dilakukan peneliti, dan mengacu pada pembahasan terhadap fokus penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

A. Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum pada Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggunakan model pendekatan implementasi kebijakan Edward III

1. Komunikasi yang dilakukan terkait dengan Implementasi PP Nomor 66 Tahun 2015 dalam rangka revitalisasi fisik dan koleksi museum sudah berhasil dan berjalan efektif karena ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam kinerja kebijakan. Komunikasi kebijakan sudah berhasil dan sesuai dengan indikator yang ada didalamnya yaitu dimensi, antara lain dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).

2. Sumber daya merupakan faktor Keberhasilan proses implementasi kebijakan yang sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Sumberdaya yang terdapat pada Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo dalam melaksanakan Implementasi PP Nomor 66 Tahun 2015 dalam rangka revitalisasi fisik dan koleksi museum yang dilakukan relatif sudah sesuai dan berhasil diterapkan dalam hal sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan. Sementara, untuk sumber daya manusia dan sumber finansial belum berhasil dan belum sesuai penerepannya untuk melaksanakan implementasi kebijakan PP Nomor 66 Tahun 2015.

3. Disposisi (sikap pelaksana) dari pihak pimpinan kementerian dalam melaksanakan Implementasi PP Nomor 66 Tahun 2015 dalam rangka revitalisasi fisik dan koleksi museum sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan sebagai pendorong keberhasilan implementasi kebijakan. Pada indikator insentif sudah berhasil dapat di implementasikan dengan baik dan sudah sesuai dengan PP Nomor 66 Tahun 2015. Namun, untuk indikator pada rekrutment pegawai hal tersebut belum berhasil dilakukan dan belum sesuai dengan PP Nomor 66 Tahun 2015.

4. Struktur Birokrasi pada pengelolaan Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo merupakan struktur yang berjenjang. Struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi yaitu penyebaran tanggung

jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Selain itu, struktur birokrasi mencakup dimensi standar prosedur operasional yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi tugasnya. Dalam melaksanakan Implementasi PP Nomor 66 Tahun 2015 dalam rangka revitalisasi fisik dan koleksi museum, dua indikator yaitu fragmentasi dan *standard operating procedure* (SOP) sudah berhasil diterapkan dan sudah sesuai dengan standar yang ada dalam implementasi kebijakan.

Berdasarkan model pendekatan implementasi kebijakan Edward III dalam menerapkan revitalisasi fisik dan koleksi museum, Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo Kementerian Lingkungan Hidup relatif sudah memadai atau memuaskan dalam kesiapan dan hasil penerapan empat faktor berdasarkan komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Namun, dalam beberapa indikator implementasi kebijakan Edward III ada yang belum memadai dan belum berhasil diterapkan mengenai sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan rekrutmen pegawai. Keberhasilan tersebut diukur dari penilaian sudah diterapkannya faktor dan indikator yang ada dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan, serta sudut pandang penerima manfaat atau masyarakat dalam hal ini yaitu pengunjung museum.

B. Hasil, Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dari revitalisasi fisik dan koleksi museum pada Museum Kehutanan Ir.Djamaluddin Suryohadikusumo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1. Hasil Revitalisasi

Revitalisasi yang dilakukan oleh Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo KLHK dapat dikatakan sudah memuaskan dan sudah mengimplementasikan PP Nomor 66 Tahun 2015. Hal tersebut terlihat dari aspek fisik yang dimana nuansanya menjadi *modern*, vitrin yang lebih *modern* dan rapi, nyaman dinikmati oleh pengunjung, tidak terasa tua dan seram lagi. Luas ruangan yang memadai juga berperan agar pengunjung nyaman, juga dilengkapi dengan penyejuk udara dan cahaya lampu yang bisa membuat suasana menjadi hidup.

Mengenai koleksinya, museum sudah memiliki *storyline* agar pengunjung mendapatkan pengetahuan yang runut pada hal yang akan disampaikan dan disertai fitur QR code yang dapat diakses melalui ponsel pengunjung. Dari segi fasilitas yang disediakan oleh museum juga sudah memenuhi standar yaitu memiliki fasilitas utama berupa ruang pameran tetap dan temporer, meja penerima tamu, ruang administrasi untuk karyawan, toilet, CCTV, AC di berbagai sisi, internet, auditorium, ruang teater, ruang rapat, alat-alat pengamanan gedung, fasilitas untuk lansia, penyandang disabilitas, musholla, lahan parkir yang luas dan terdapat cafe arborea didalam arboretum yang membuat lebih nyaman dan dapat beristirahat sesudah dari museum.

2. Faktor Pendukung

1. Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Anggaran yang dimiliki

Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo KLHK yaitu pengelola dan tenaga yang kompeten di bidangnya.

2. Koleksi yang dimiliki Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo KLHK berupa koleksi khusus yaitu koleksi tentang kehutanan.

3. Lokasi Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo KLHK dianggap sangat strategis, karena mudah ditemui dan diakses.

4. Fasilitas dan Layanan yang dimiliki memadai, sehingga pengunjung dapat memilih fasilitas dan layanan yang ingin digunakan.

3. Faktor Penghambat

1. Alokasi anggaran yang dimiliki Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo KLHK jumlahnya terbatas dan tidak merata, serta belum mengacu kepada kebutuhan pada museum.

2. Kurangnya dukungan dari pimpinan terhadap kinerja pengelolaan museum mengenai kurang di perhatikannya perawatan koleksi dan pengadaan koleksi baru.

3. Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo KLHK masih kekurangan jumlah sumber daya manusia dalam pengelolaan museum dan belum melaksanakan pembinaan tenaga pengelola museum di bidang permuseuman seperti seminar/*workshop*/diklat mengenai pengelolaan dan perkembangan museum untuk meningkatkan daya guna tenaga pengelola museum tersebut.

4. Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo KLHK belum menjalin kerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait mengenai

koleksi kehutanan. Kerja sama ini dalam rangka keperluan untuk pengembangan dan pelayanan museum.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil, faktor pendukung dan faktor penghambat tersebut, dapat di analisis bahwa museum di masa mendatang sebagai organisasi sektor publik akan mampu menyediakan public good and service dikarenakan museum tumbuh dan berkembang dalam masyarakat jika dirasakan ada manfaatnya. Dalam hal museum, manfaat itu dapat berupa sebagai sarana Edukatif, Inovatif, Rekreatif dan Imajinatif. Semua manfaat itu didasarkan bahwa museum memang merupakan sumber informasi terhadap publik pengunjungnya yang diukur dari pelayanan yang diberikan. Penataan pada tiap ruang haruslah nyaman bagi perorangan maupun kelompok. Sangat penting bagi pembimbing tur agar dapat didengar oleh kelompoknya tanpa mengganggu pengunjung yang lain. Beberapa ruangan untuk fungsi tertentu seperti ruang pertemuan, orientasi, auditorium harus dirancang oleh ahlinya. Ruang lainnya seperti area sirkulasi utama dan ruang pameran memerlukan penataan akustik tertentu untuk mencegahnya menjadi terlalu “hidup” sehingga merusak pengalaman yang ingin diciptakan museum.

Faktor teknologi mempunyai pengaruh yang dramatis pada museum-museum modern. Fleksibilitas untuk menerima teknologi-teknologi baru adalah pertimbangan desain yang penting untuk diingat. Tergantung pada jenis museumnya, ruang pameran dan ruang-ruang lain seharusnya dilengkapi dengan tanda yang inovatif, informasi, interaksi pengunjung, kunjungan “jarak jauh” dan pameran. Sehingga di masa mendatang jika museum mampu mengelola,

beradaptasi dengan perkembangan dan dapat melewati hambatan yang ada baik dari segi sumber daya, anggaran, pengelolaan, dll maka akan dapat menyediakan public good and service bagi para pengunjungnya.

V.II Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka peneliti ingin memberikan saran terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 di Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo KLHK, agar dapat meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pelayanan museum. Adapun saran tersebut antara lain :

1. Perlu adanya analisa dan kalkulasi ulang terkait alokasi anggaran yang di distribusikan oleh biro umum kepada museum. Tujuan dari analisa dan kalkulasi ulang agar setiap biaya yang dialokasikan untuk program atau kegiatan dapat diterima dengan wajar dan sesuai kebutuhan museum. Sehingga, dengan informasi biaya satuan program atau kegiatan tersebut, Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo KLHK dapat menggunakannya sebagai salah satu acuan dalam mengelola anggaran yang lebih baik lagi secara efektif dan efisien.
2. Sebaiknya merealisasikan pemindahan penanggung jawab pengelolaan museum kepada PPID atau PUSDATIN yang dimana memang idealnya jika dikelola oleh salah satu diantara dua bidang tersebut, alokasi anggaran dan jumlah pegawai untuk museum dapat lebih sesuai kebutuhan serta

terfokus dalam pengembangan dan meningkatkan citra museum agar pengelolaan lebih efektif dan efisien.

3. Perlu Menambahkan SDM pada pengelola museum karena sekarang masih dirasa kurang dan agar tercapainya implementasi kebijakan pada indikator rekrutmen pegawai. Kemudian dilakukan pembinaan terhadap tenaga pengelola museum untuk menambah kompetensi yang dimiliki juga untuk meningkatkan daya guna tenaga pengelola museum tersebut dan menyesuaikan dengan perkembangan museum yang modern.
4. Sebaiknya diperhatikan kembali mengenai pengecekan berkala dan perawatan untuk sarana dan prasarana serta koleksi museum dengan melakukan konservasi, preservasi dan restorasi secara berkala baik koleksi yang ada didalam vitrin maupun diluar agar hasil revitalisasi tetap terjaga dengan baik dan menunjang pelayanan pada museum
5. Perlu adanya kerja sama dengan museum lainnya, agar dapat mengoptimalkan daya pakai koleksi, layanan museum, dan menambah wawasan tenaga pengelola museum. Selain itu kerja sama diperlukan dalam penambahan koleksi pada museum untuk meningkatkan nilai akreditasi museum. Penambahan koleksi, perlu dilakukan koordinasi dengan BKSDA serta GAKKUM KLHK perihal penambahan koleksi untuk museum dari barang illegal hasil sitaan kehutanan.

DAFTAR PUSTAKA

Afan, G. (2009). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. In Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Afrizal. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers.

Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.

Ardika, I. W. (2007). *Pusaka budaya dan pariwisata*. Pustaka Larasan.

Artini, Dini Fajratul. 2016. *Komunikasi Pemasaran Museum Mpu Tantular*.

Bungin, B. (2007). *Analisis data penelitian kualitatif*. PT RajaGrafindo Persada.

Christensen, T., Lægreid, P., Roness, P. G., & Røvik, K. A. (2007). *Organization theory and the public sector: Instrument, culture and myth*. In *Organization Theory and the Public Sector*. Instrument, Culture and Myth.

Coleman, L. V. (2012). *Museum Buildings. The American Association of Museums*. Washington, DC.

Connaway, L. S., & Powell, R. R. (2010). *Basic research methods for librarians*. ABC-CLIO.

Creswell, J. W. (2016). *Research design: pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

D. Hywel E. Roberts dan Jean Everitt. 1999. A Study of Information and Communications Technologies in Museums with Particular Reference to Wales. *Jurnal DOI*. Vol. 33, Issue: 4, pp. 291-301.

Danisworo, M., & Martokusumo, W. (2002). *The search for appropriate conceptual framework in urban heritage preservation and conservation: Discourse upon continuity and change in the Indonesian context*. Working paper Delft Technical University.

Direktorat, M. K. P. dab K. R. I. (2008). *Pedoman Museum Indonesia*.

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman. (2015). Permasalahan dan Tantangan Pengembangan Museum. Makalah. Diakses pada 11 Maret 2021, dari <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditpcb/2015/05/11/permasalahan-dan-tantangan-pelestarian-museum/>.

Fitriyani, Luvita Dwi. 2013. Penerapan Analisis SWOT dalam Strategi Pengembangan Museum Brawijaya sebagai Salah Satu Aset Sejarah Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB UB*. Vol. 1, No. 2, p. 4.

Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*.

Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA.

Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. In Jakarta: Salemba Humanika.

Imarotul Mufidah, S. s. (2019). *Potret Museum di Indonesia*. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.

Islamy, M. I. (2009). *Prinsip-prinsip perumusan kebijakan negara*. -.

Kiersten F. Latham. 2012. Museum Object as Document Using Buckland's Information Concepts to Understand Museum Experiences. *Jurnal Proquest*. Vol. 68, p. 47.

Kochhar, S. K. (2008). *Pembelajaran Sejarah*. Jakarta : Grasindo.

Laretna, A. (2002). *Revitalisasi Tata Kelola Kota*. Penerbit UGM Press. Jogjakarta.

Listyarini, Upiek. 2013. *Evaluasi Manajemen Pemasaran Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta: FIB Universitas Gadjah Mada

Mahsun, Moh., Sulistiyowati, Firma., & Purwanugraha, H. A. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. BPFE.

Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Scott Foresman.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (n.d.). dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition, 3*.

Moleong, L. J. (2007). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Moleong, L. J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Nasution. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Tarsito.

Nomor, P. P. (66 C.E.). *Tahun 2015 Tentang Museum*.

Nordiawan, D. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.

Nugroho D, R. (2004). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, penerbit PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.

Pamuji, Kukuh. 2010. *Komunikasi dan Edukasi di Museum Istana Kepresidenan Jakarta*. Skripsi. Depok: FIB Universitas Indonesia.

Puspitasari, Arum. 2014. *Penerapan Ketentuan Pemerintah untuk Pendirian Museum di Indonesia Kajian Kasus-Kasus Museum di Yogyakarta*. Yogyakarta: Tesis Universitas Gadjah Mada

- Redita, Rizky. 2017. *Pengaruh Destination Image dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Wisatawan di Museum Angkut Kota Batu*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.
- Ruslan, R., & Rosady Ruslan SH, M. M. (2018). *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*. Rajawali Press.
- Rukmana, Indra. 2015. *Strategi Pengelolaan Museum Benteng Vredeborg sebagai Daya Tarik Wisata Warisan Budaya di Yogyakarta*. Yogyakarta: Tesis Institut Seni Indonesia.
- Sekarningrum, Oksiana. 2013. *Analisis Faktor-Faktor yang Menentukan Efektivitas Sistem Informasi pada Organisasi Sektor Publik (Studi Kasus Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan)*. Skripsi. Bandung: FE Universitas Widyatama.
- Soetjipto. (1991). *Fungsi dan Tugas Museum*. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono, A. G. (2005). *Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi* (Vol. 138). Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D* Bandung Alfabeta. Metode Penelitian.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Bandung: Alfabeta.
- Sutaarga, M. A. (1990). *Studi museologia*. Proyek Pembinaan Permuseuman Jakarta, Direktorat Jenderal Kebudayaan
- Syarief, Y. I. (2004). *Memperkuat Manajemen Museum: Studi tentang Upaya Memaksimalkan Fungsi Museum Sri Baduga Jawa Barat*. Tesis Universitas Indonesia. Diakses pada 8 Maret 2021, dari <https://core.ac.uk/download/files/451/12140627.pdf>.
- Tangkilisan, H. N. S., & Saputro, S. H. (2003). *Implementasi kebijakan publik: transformasi pikiran George Edwards*. Lukman Offset: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI).
- Tjilen, A. P., Fitriani, H. T., Maturan, A. Y., Ririhena, S. W., & Manuhutu, F. Y. (2019). *Participation in Empowering Women and the Potential of the Local Community Economy, a Case Study in Merauke Regency, Papua Province. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Local Community Economic Empowerment And Corporate Social Responsibility)(Teori, Konsep, Dan Implementasi Kebijakan Publik)*, 89.
- Trilestari, I. (2008). *Kajian Tata Pameran Tetap Pada Museum Sejarah*. Jakarta : Direktorat Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Trilestari, I. (2019). *Implementasi Program Revitalisasi Museum Pada Museum*

- Negeri Provinsi Lampung. *Jurnal Kebudayaan*. Vol.14, No.2.
- Ulum, I. (2008). *Akuntansi Sektor Publik*. Malang : UMM Press.
- Van dan Van Horn, M. (1974). *Human Resource Champions*. Boston: Harvard Business School Press.
- Widodo, J. (2009). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Cetakan Ketiga*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarni. (2013). *Pedoman Penyelenggaraan dan Pengelolaan Museum*. Direktorat Permuseuman, Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Winarno, B. (2002). *Teori dan proses kebijakan publik*. Media Pressindo.
- Yogaswara. (2011). *Bagaimana mendirikan sebuah museum*. Jakarta : Kementerian Pariwisata Republik Indonesia



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pejabat Kementerian (Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro Umum)

1. Dalam pembentukan kebijakan mengenai revitalisasi museum, bagaimana implementasi kebijakan yang dibuat oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan?
2. Siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan revitalisasi museum ini?
3. Bagaimana persiapan koordinasi yang dilakukan sebelum kebijakan revitalisasi museum ini dilaksanakan?
4. Bagaimana koordinasi dengan Pihak terkait seperti kontraktor untuk menyelesaikan revitalisasi museum?
5. Darimana sumber dana untuk melaksanakan kebijakan revitalisasi museum ini? Apakah sebelumnya telah ditetapkan dalam anggaran?
6. Adakah fasilitas-fasilitas yang memadai yang diberikan oleh kementerian dalam mengelola museum ini?
7. Apakah ada hukum atau peraturan yang mengatur dan melindungi keberadaan museum kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo kementerian lingkungan hidup?
8. Apakah ada peraturan dari pemerintah untuk revitalisasi museum?
9. Apakah ada tindakan partisipatif oleh kementerian Pendidikan dan kebudayaan dalam mengelola museum kehutanan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan?
10. Apakah di museum kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo kementerian lingkungan hidup ada renstra (rencana strategis) museum tahun 2020-2024?
11. Bagaimana struktur organisasi dari Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo Kementerian Lingkungan Hidup?
12. Bagaimana tugas masing-masing bagian dari pengurus Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo Kementerian Lingkungan Hidup?

13. Bagaimana mekanisme prosedur (Standard Operating Procedures) dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan museum yang meliputi Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dan Juknis (Petunjuk Teknis)?

14. Bagaimana proses revitalisasi fisik dan koleksi Museum Kehutananan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo Kementerian Lingkungan Hidup?

15. Bagaimana hasil dari revitalisasi museum? Apa saja perubahan setelah revitalisasi? Apakah ada perubahan yang cukup signifikan setelah revitalisasi museum?

16. Harapan dan saran apa utk perbaikan museum ke depan (ke depan) menurut bapak/ibu?

B. Para Pelaksana Kebijakan (Kepala Bidang Karya Cetak dan Kepustakaan, Penanggung Jawab Pengelola Museum dan Pengelola Museum)

1. Seperti apa gambaran umum tentang Museum Kehutananan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo Kementerian Lingkungan Hidup?

2. Apa tujuan dibentuknya Museum Kehutananan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo Kementerian Lingkungan Hidup?

3. Apa fungsi dari Museum Kehutananan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo Kementerian Lingkungan Hidup?

4. Apa visi dan misi dari Museum Kehutananan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo Kementerian Lingkungan Hidup?

5. Bagaimana dengan SumberDaya yang ada di Museum ini?

6. Bagaimana pelayanan yang diberikan?

7. Ada berapa pegawai yang ada di Museum ini?

8. Bagaimana dengan tingkat pendidikan pegawai Museum ini?

9. Bagaimana struktur organisasi dari Museum Kehutananan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo Kementerian Lingkungan Hidup?

10. Bagaimana proses revitalisasi fisik dan koleksi Museum Kehutananan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo Kementerian Lingkungan Hidup?

11. Seperti apa kondisi koleksi museum selama proses revitalisasi tersebut?

12. Bagaimana hasil dari revitalisasi museum? Apa saja perubahan setelah revitalisasi? Apakah ada perubahan yang cukup signifikan setelah revitalisasi museum?

13. Fasilitas apa saja yang terdapat di Museum Kehutananan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo Kementerian Lingkungan Hidup?

14. Program apa saja yang dimiliki oleh Museum Kehutananan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo Kementerian Lingkungan Hidup?

15. Berapa rata-rata jumlah pengunjung Museum Kehutananan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo Kementerian Lingkungan Hidup dan dari kalangan apa saja?

16. Bagaimana dengankelengkapan dan variasi koleksi Museum Perjuangan?

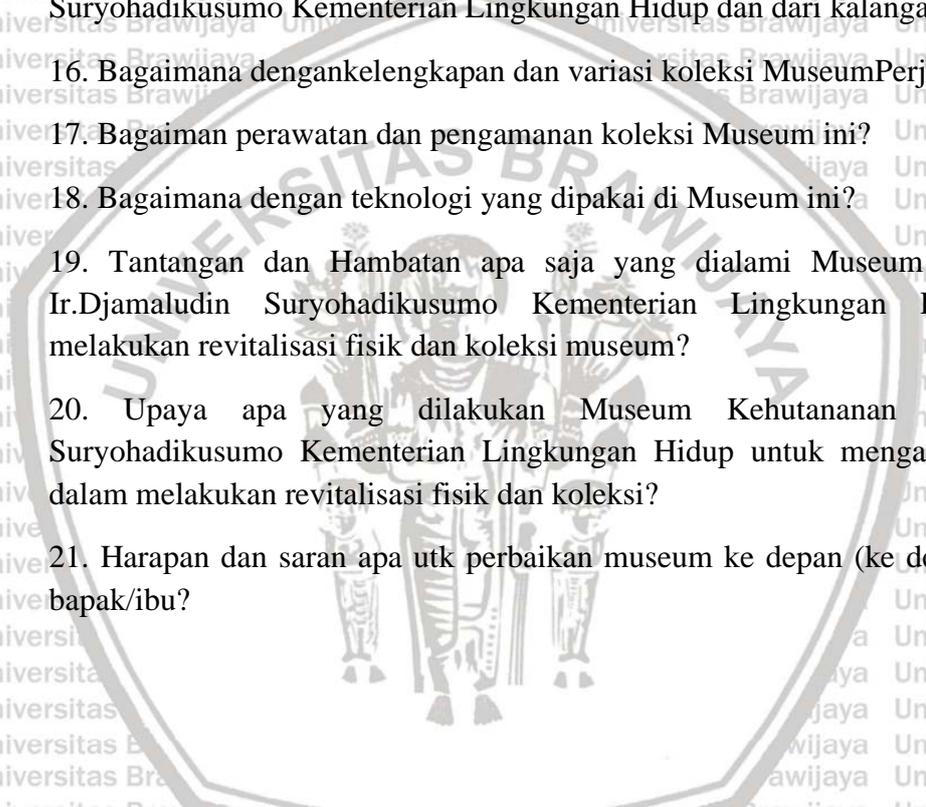
17. Bagaimana perawatan dan pengamanan koleksi Museum ini?

18. Bagaimana dengan teknologi yang dipakai di Museum ini?

19. Tantangan dan Hambatan apa saja yang dialami Museum Kehutananan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo Kementerian Lingkungan Hidup dalam melakukan revitalisasi fisik dan koleksi museum?

20. Upaya apa yang dilakukan Museum Kehutananan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengatasi hambatan dalam melakukan revitalisasi fisik dan koleksi?

21. Harapan dan saran apa utk perbaikan museum ke depan (ke depan) menurut bapak/ibu?



LAMPIRAN 2

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Raden Muhammad Irfan Pratama

Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 12 Juni 1999

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Jl.Madrasah V No.21

Rt.002/Rw.010, Cawang Baru,

Kel.Cipinang Cempedak, Kec.Jatinegara, Jakarta Timur

No. HP : 081910073868

Email : iirfanp@yahoo.com

Riwayat Pendidikan :



Tahun	Pendidikan	Jurusan
2017 - 2021	Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya	S1 Ilmu Perpustakaan
2014 - 2017	SMAN 62 Jakarta	IPS
2011 - 2014	SMP Al-Azhar 2 Pejaten	-
2005 - 2011	SDIT Al-Khairaat	-

Riwayat Pekerjaan :

Tahun	Jabatan	Instansi
2020-2021	Magang di Pusat dan Data Informasi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2019-2020	Admin dan Binglas	BTA 8 DUTA Jakarta

Pengalaman Organisasi :

Jabatan	Organisasi	Periode
Ketua Umum HMPIP FIA UB	HMPIP FIA UB	2020
Sekretaris Majelis Perwakilan Mahasiswa	MPM FIA UB	2019
Ketua Divisi Internal	HMPIP FIA UB	2019
Manajer Futsal Putra FIA UB	MAFIOSO	2019
Ketua Divisi Internal	HMPIP FIA UB	2018
Manajer Futsal Putri FIA UB	MAFIOSO	2018

Pengalaman Kepanitiaan :

Jabatan	Organisasi	Periode
SC Divisi Acara Pemilwa FIA UB 2019	MPM FIA UB	2019
SC Divisi Acara Study Excursion	HMPIP FIA UB	2019
CO Futsal Olimpiade Brawijaya	MAFIOSO	2019
CO Divisi Kesehatan Olimpiade FIA	MAFIOSO	2019
SC Ketua Pelaksana Makrab 2018	HMPIP FIA UB	2018
CO Divisi Perlengkapan Mafia Expo	BEM FIA UB	2018
SC Divisi Humas Study Excursion	HMPIP FIA UB	2018
Ketua Pelaksana Musyawarah Besar HMPIP	HMPIP FIA UB	2017

LAMPIRAN 3

SURAT KETERANGAN RISET DARI TEMPAT RISET

1. Surat Permohonan Menjadi Informan

Yth. Calon Informan

di Museum Kehutanan Ir.Djamaluddin Suryohadikusumo Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Raden Muhammad Irfan Pratama

NIM : 175030700111006

Prodi : Ilmu Perpustakaan

Fakultas : Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Akan melakukan penelitian dengan judul “**Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Rangka Revitalisasi Fisik dan Koleksi Museum (Studi Pada Museum Kehutanan Ir.Djamaluddin Suryohadikusumo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)**”. Penelitian ini dilaksanakan sebagai salah satu kegiatan dalam menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) di Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 tentang museum dalam rangka revitalisasi fisik dan koleksi museum. Penelitian ini tidak menimbulkan akibat yang merugikan bagi informan dan kerahasiaan semua informasi yang diberikan akan dijaga, serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian.

Partisipasi dalam penelitian bersifat bebas untuk ikut atau tanpa ada paksaan apapun. Bila telah menjadi informan dan terjadi hal-hal yang merugikan informan, informan berhak untuk mengundurkan diri sebagai informan dalam penelitian ini. Apabila anda memahami dan menyetujui, maka saya mohon kesediaannya untuk menandatangani lembar persetujuan dan bersedia diwawancarai lebih lanjut.

Atas perhatian dan kesediaan saudara menjadi informan saya ucapkan terima kasih.

Peneliti,

Raden Muhammad Irfan Pratama

2. Lembar Persetujuan Menjadi Informan

1. Yulianti Fajar Wulandari, M.I.KOM

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bersedia menjadi Informan penelitian yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Rangka Revitalisasi Fisik dan Koleksi Museum Pada Museum Kehutanan Ir.Djamaluddin Suryohadikusumo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan”** yang dilakukan oleh:

Nama : Raden Muhammad Irfan Pratama
 NIM : 175030700111006
 Prodi : Ilmu Perpustakaan
 Fakultas : Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Saya mengerti penelitian ini tidak menimbulkan dampak negatif dan data mengenai diri saya dalam penelitian ini akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti. Semua berkas yang mencantumkan identitas saya hanya akan digunakan untuk keperluan pengolahan data dan bila sudah tidak digunakan akan dimusnahkan. Hanya peneliti yang dapat mengetahui kerahasiaan data-data penelitian.

Demikian, secara suka rela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun saya bersedia berperan serta dalam penelitian ini.

Jakarta, 23 Februari 2021

Pengelola Museum,



Yulianti Fajar Wulandari, M.I.Kom

2. Asep Sutisna

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bersedia menjadi Informan penelitian yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Rangka Revitalisasi Fisik dan Koleksi Museum Pada Museum Kehutanan Ir.Djamaluddin Suryohadikusumo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan”** yang dilakukan oleh:

Nama : Raden Muhammad Irfan Pratama

NIM : 175030700111006

Prodi : Ilmu Perpustakaan

Fakultas : Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Saya mengerti penelitian ini tidak menimbulkan dampak negatif dan data mengenai diri saya dalam penelitian ini akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti. Semua berkas yang mencantumkan identitas saya hanya akan digunakan untuk keperluan pengolahan data dan bila sudah tidak digunakan akan dimusnahkan. Hanya peneliti yang dapat mengetahui kerahasiaan data-data penelitian.

Demikian, secara suka rela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun saya bersedia berperan serta dalam penelitian ini.

Jakarta, 23 Februari 2021

Pengelola Museum,



Asep Sutisna

3. Dyah Herlin Widiyowati, SH

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bersedia menjadi Informan penelitian yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Rangka Revitalisasi Fisik dan Koleksi Museum Pada Museum Kehutanan Ir.Djamaluddin Suryohadikusumo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan”** yang dilakukan oleh:

Nama : Raden Muhammad Irfan Pratama

NIM : 175030700111006

Prodi : Ilmu Perpustakaan

Fakultas : Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Saya mengerti penelitian ini tidak menimbulkan dampak negatif dan data mengenai diri saya dalam penelitian ini akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti. Semua berkas yang mencantumkan identitas saya hanya akan digunakan untuk keperluan pengolahan data dan bila sudah tidak digunakan akan dimusnahkan. Hanya peneliti yang dapat mengetahui kerahasiaan data-data penelitian.

Demikian, secara suka rela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun saya bersedia berperan serta dalam penelitian ini.

Jakarta, 25 Februari 2021

Kepala Sub Bagian Pengelolaan Karya

Cetak dan Kepustakaan,



Dyah Herlin Widiyowati, SH

4. Ir.Samidi, M.Sc.

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bersedia menjadi Informan penelitian yang berjudul **"Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Rangka Revitalisasi Fisik dan Koleksi Museum Pada Museum Kehutanan Ir.Djamaluddin Suryohadikusumo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan"** yang dilakukan oleh:

Nama : Raden Muhammad Irfan Pratama

NIM : 175030700111006

Prodi : Ilmu Perpustakaan

Fakultas : Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Saya mengerti penelitian ini tidak menimbulkan dampak negatif dan data mengenai diri saya dalam penelitian ini akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti. Semua berkas yang mencantumkan identitas saya hanya akan digunakan untuk keperluan pengolahan data dan bila sudah tidak digunakan akan dimusnahkan. Hanya peneliti yang dapat mengetahui kerahasiaan data-data penelitian.

Demikian, secara suka rela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun saya bersedia berperan serta dalam penelitian ini.

Jakarta, 1 Maret 2021

Kepala Biro Umum,



Ir. Samidi, M.Sc.

5. Ir. Bambang Hendroyono, M.M

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bersedia menjadi Informan penelitian yang berjudul **"Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Rangka Revitalisasi Fisik dan Koleksi Museum Pada Museum Kehutanan Ir.Djamaluddin Suryohadikusumo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan"** yang dilakukan oleh:

Nama : Raden Muhammad Irfan Pratama
NIM : 175030700111006
Prodi : Ilmu Perpustakaan
Fakultas : Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Saya mengerti penelitian ini tidak menimbulkan dampak negatif dan data mengenai diri saya dalam penelitian ini akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti. Semua berkas yang mencantumkan identitas saya hanya akan digunakan untuk keperluan pengolahan data dan bila sudah tidak digunakan akan dimusnahkan. Hanya peneliti yang dapat mengetahui kerahasiaan data-data penelitian.

Demikian, secara suka rela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun saya bersedia berperan serta dalam penelitian ini.

Jakarta, 2 Maret 2021

Sekretaris Jenderal,



Ir. Bambang Hendroyono, M.M

3. Surat-Surat Penelitian

1. Pengantar Penelitian untuk Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
 Jl. MT. Haryono 363, Malang 65145, Indonesia
 Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
 http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 1420/UN10.F03.11/PN/2021 11 Februari 2021
 Hal : Permohonan Data, Izin Wawancara Karyawan, Izin Observasi Lapangan

Yth. Kepala Biro Umum Sekretariat Jendral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Museum Kehutanan Ir. Djamaludin Suryohadikusumo, Blok Kehutanan 1 lantai 3, Jl. Gatot Subroto Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190

Berkenaan dengan proses pembelajaran dan perkuliahan Program Sarjana S1 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, sebagai tugas akhir mahasiswa diwajibkan melaksanakan penelitian untuk itu mahasiswa kami :

Nama : Raden Muhammad Irfan Pratama
 NIM : 175030700111006
 Tingkat / Semester : 8 (Delapan)
 Handphone : 081910073868
 Program Studi/Jurusan : Ilmu Perpustakaan / Jurusan Administrasi Negara/Publik
 Judul Penelitian : **Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam rangka Revitalisasi Fisik dan Koleksi Museum (Studi pada Museum Kehutanan Ir. Djamaludin Suryohadikusumo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)**
 Dosen Pembimbing : 1. Mochamad Rozikin, Dr. Drs, MAP
 2. Mochamad Chazienul Ulum, S.Sos, M.AP
 Penelitian di : Museum Kehutanan Ir. Djamaludin Suryohadikusumo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Mohon dengan hormat diperkenankan / diijinkan melaksanakan permohonan data, wawancara karyawan, observasi lapangan di Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, rencana akan diselenggarakan pada bulan : Februari - Maret 2021

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.



Tembusan:
 1. Dekan FIA.UB sebagai laporan
 2. Dosen Pembimbing

2. Surat Keterangan telah melakukan penelitian di Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
 Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto,
 Jakarta 10270, Kotak Pos 6505
 Telepon : 5730191, Faximile : 5738732

SURAT KETERANGAN
 Nomor: 77/PKCK/TUK/IV/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Dyah Herlin Widiyowati, SH
 NIP : 19640829 199203 2 006
 Jabatan : Kepala Subbag. Pengelolaan Karya Cetak dan Kepustakaan

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Raden Muhammad Irfan Pratama
 NIM : 175030700111006
 Instansi : Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Administrasi
 Program Studi : Ilmu Perpustakaan / Jurusan Administrasi Negara / Publik

Telah melakukan penelitian dan wawancara serta observasi lapangan dalam rangka Tugas Akhir (Skripsi) pada Museum Kehutanan Ir. Djamaludin Suryohadikusumo, Biro Umum, Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta Pusat, pada bulan Februari s/d Maret 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 6 April 2021
 Kasubbag. Pengelolaan Karya Cetak
 Dan Kepustakaan



Dyah Herlin Widiyowati, SH
 NIP. 19640829 199203 2 006

LAMPIRAN 4

HASIL WAWANCARA

TRANSKRIP WAWANCARA MUSEUM

1. Seperti apa gambaran umum tentang museum kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan?

Jawaban :

Kalau dari sejarah, berawal dari nama museum manggala wanabakti. Kemudian di tahun 2012 berganti nama menjadi museum kehutanan. Pada tahun 2015, melakukan revitalisasi fisik dan koleksi yang merubah tampilan dan tata pameran di lantai 1. Terkait museum kehutanan sendiri yaitu merupakan jenis yang museum khusus atau tematik dengan tema tertentu yang disesuaikan dengan pengelolanya. Museum sendiri kan terbagi menjadi 2 jenis yaitu museum umum dan museum khusus. Museum umum seperti museum daerah yang bisa menampung semua koleksi daerah tentang daerah tersebut mulai dr sejarah, sosiologinya, industrinya dijadikan satu. Tetapi Museum kehutanan ini unik karena pertama meruoakan museum bertema kehutanan yg merupakan satu2 nya di Jakarta karena dimiliki oleh klhk. Kedua museum ini mempunyai koleksi hidup dan koleksi benda mati, Untuk koleksi mati di museum dan koleksi hidup di arboretum. Jika merujuk pada aturan unesco, museum itu tidak hanya mengkoleksi benda mati warisan sejarah tetapi juga benda hidup karena merupakan warisan alam. Bisa dimasukin di latar belakang kenapa menarik meneliti disitu.

Dan masyarakat yg datang kesini pun bisa mengalami pengalaman yg berbeda dr museum lain. Kalo di museum lain mereka datang lihat koleksi selesai. Kalo disini mereka bisa dapet informasi lebih. Misalnya kalo anak2 berkunjung, mereka ngelihat botol minyak kayu putih dipajang sebagai salah satu hasil hutan non kayu, tapi nanti mereka bisa belajar seperti apa dan darimana asalnya minyak kayu putih. Mereka bisa ke koleksi yang hidup di arboretum. Mereka bisa melihat koleksi pohon minyak kayu putih yang hidup. Bisa mengalami pengalaman memetic daun, kemudian minyak kayu putih terbuat dari daun nya.

Kemudian gambaran umum lainnya, diresmikan tanggal 24 agustus 1983 diresmikan oleh presiden soeharto. Pda tahun 80an industry kehutanan sangat maju, sehingga presiden mendukung keberadaan dan pendirian museum ini. Dan kebetulan jg Menteri kehutanan.... Pada saat itu kehutanan hanya menjadi bagian dari dirjen di departemen pertanian, mulai dipisah berkembang lebih besar menjadi departemen kehutanan. Menteri kehutanan yg pertama yaitu pak sujarwo yaitu yang menggagas kompleks manggala wanabakti. Beliau ingin ada peninggalan yang baik dari para rimbauan ini untuk generasi selanjutnya. Komplek manggala ini menghimpun semua tentang kehutanan. Ada kantor pemerintah, swasta,

perpustakaan, arboretum, masjid, dll lengkap ada disini. Rimbawan ini memberikan pengetahuan melalui manggala wanabakti.

Di tahun 2012, dari Yayasan manggala wanabakti menyerahkannya kepada pemerintah dan dikelola oleh kementerian kehutanan. Dan berganti menjadi museum kehutanan.

Secara fisik berada di blok 6, dan memiliki 2 lantai. Di lantai pertama berisi pameran artefak dan dilantai kedua hanya kilasan foto dan informasi. Terkait pengunjung yang datang para pelajar dari SD-SMA berupa studi tour. Dan untuk mahasiswa biasanya keperluannya untuk magang dan penelitian skripsi tugas akhir. Peneliti kehutanan untuk melakukan penelitian di arboretum. Ada juga pengunjung dari luar negeri. Yang datang dari pelajar sekolah menengah yaitu sejenis smk tapi khusus kehutanan dari korea dan jepang. Mahasiswa dari luar negeri. PNS Kehutanan dari india, korea, jepang, jerman untuk kunjungan kerja. Terutama dari mereka tertarik untuk melihat arboretum karena dapat melihat tanaman aslinya dan dapat melihat perbandingan dengan tanaman di negara mereka

2. Apa Tujuan dan Fungsi Dibentuknya Museum?

Jawaban :

Tujuannya adalah impian para rimbawan sebagai forestry center. Mempunyai tempat yang lengkap untuk pengetahuan, informasi, edukasi, peninggalan sejarah untuk generasi selanjutnya. Dapat mencari informasi di perpustakaan, melihat benda oeninggalan di museum dan melihat koleksi lengkap di arboretum.

3. Bagaimana Pelayanan yang diberikan oleh museum?

Jawaban:

Untuk pelayanan dari sisi operasional, yaitu sesuai dengan jam kerja kementerian. Yaitu senin-jumat mulai pukul 08.30 WIB sampai dengan 15.00 WIB. Berbeda dengan museum lain yang di hari senin mereka libur kemudian selasa hingga minggu mereka buka.

Untuk pelayanan, karena berada di pengelolaan kementerian maka kita memungut tiket masuk alias gratis. Yang mau berkunjung dalam jumlah besar harus memakai prosesudr surat terlebih dahulu karena menyangkut parkir kendaraan untuk disiapkan lahan parker di kemenetrian. Kdua terkait kepemanduan, karena biasanya mereka meminta panduan agar tidak bentrok dengan jadwal yang lain dengan kunjungan yang lain. Jika orang pribadi hanya tinggal masuk saja. Hal tersebut dimasa normal

Ketika dimasa pandemic,tempat wisata megikuti kemauan pemerintah, Jika diminta tutup oleh pemerintah. Dan jika buka, harus menyesuaikan kapasitas jumlah pengunjung dengan kapasitas yang dimiliki museum. Jika museum harus ditutup, pelayanan harus tetap buka dan jalan oleh karena itu dialihkan melalui virtual. Yaitu tour museum melalui zoom virtual dan melalui video dengan digerakkan oleh pemandu museum.

Untuk perbandingan antara masa pandemic dan normal, pengunjung rata2 dari daerah luar kota. Mereka senang banget. Dan untuk Pelayanan terkait penelitian, tetap diperbolehkan tetapi dengan prokes.

4. Ada berapa orang pegawai disini?

Jawaban

Dulu ideal ada curator, konservator dan tata pameran. Tetapi sekarang ini semenjak dibawah pemerintah jumlah karyawan berkurang. Sekarang hanya ada pak asepan dan saya. Pak asepan pemeliharaan, dan saya pemanduan dan koleksi. Untuk koleksi belum ada pengadaan lagi karena masalah anggaran. Pekerjaan saya sebagai curator lebih banyak kearah riset. Seperti ada koleksi yg belum diketahui sejarahnya, fungsinya dll kenapa bisa menjadi koleksi dijadikan semacam riset untuk dicari tahu informasinya tentang benda itu. SDM nya memang sedikit

5. Bagaimana Proses revitalisasi fisik dan koleksi bagaimana prosesnya?

Jawaban :

Revitalisasi berawal dari penyerahan museum oleh pihak Yayasan manggala wanabakti kepada pihak pemerintah yaitu kementerian kehutanan. Pihak kementerian kemudian melakukan kunjungan ke museum. Mereka melihat dan melakukan penilaian dan mereka merencanakan revitalisasi. Tujuan dari revitalisasi yaitu memberikan nilai lebih kepada museumnya. Dari tahun 1983 hingga 2012 belum ada yg berubah dari segi tampilan dan koleksi yang terlihat kuno dan kurang bersih karena ada diorama hutan asli. Penilaian dari mereka yaitu kurang pencahayaan, kelihatannya berdebu, bentrok fitrin tidak teratur dan kuno tampilannya. Berangkat darisana mereka mempunyai rencana revitalisasi agar terlihat kekinian, terang, bersih dan teratur penataan koleksi sesuai story line nya.

Sempat ada kendala masalah anggaran dan baru terlaksana pada tahun 2015. Pimpinannya masih sama yaitu kepala bironya karena baru ada anggaran yang bisa dipakai untuk revitalisasi namu terbatas hanya pada lantai 1 saja. Di lantai 2 dan perpustakaan belum.

Prosedur administrasinya, pekerjaan yg bernilai diatas 200 juta harus diberikan ke pihak ketiga melalui lelang atau open tender dan dilaksanakan oleh tata usaha kementerian. Kita menyewa konsultan design interior yg bekerjasama dengan kuratornya untuk menentukan bagaimana design dan curator merancang

story line koleksi dalam fitrin. Karena ada koleksi museum rimbauwan pejuang yang di masukkan kedalam museum kehutanan. Pihak konsultan membuat rancangan design sesuai dengan permintaan kementerian yg hanya design nya saja. Untuk isi koleksi disesuaikan oleh curator.

6. Bagaimana keadaan koleksi Ketika museum di revitalisasi?

Jawaban :

Selama revitalisasi, koleksi masih berada didalam fitrin nya. Jadi hanya tinggal digeser dan didorong kedekat area gudang saja.

7. Menurut ibu/bapak, hasil dari revitalisasi sendiri bagaimana bu? Apakah ada perubahan yang signifikan?

Jawaban :

Kalau dari pimpinan mereka puas karena tampilan dan koleksi lebih modern, lebih terang, lebih bersih tidak berdebu dan tertata. Dari sisi pengunjung, ada rasa kekecewaan setelah revitalisasi. Mereka kecewa karena sebelum revitalisasi sudah pernah datang ke museum dan merasa setelah revitalisasi ruh nya hilang. Karena bagian diorama hutan sudah dihilangkan sedangkan itu merupakan bagian favorit mereka. Diorama hutan sesungguhnya yg tampilannya becek, berdebu, daun, dan pohon sehingga mereka memiliki pengalaman serasa masuk kedalam hutan. Dan sekarang konsep hutannya menjadi hilang.

Kalau dari saya sebagai curator, ada kekecewaan dari designnya. Yaitu pada bagian bawah fitrin koleksi terbuka yg semula kayu, sekarang di cat menggunakan warna semen yaitu abu2. Jadi akhirnya otomatis agak kasar dan landasan untuk menaruh pameran jadi agak kurang aman untuk anak2 karena anak2 suka berlari dan takut tergores kemudian berdarah. Kemudian dari material lebih bagus jika kayu saja tanpa dilapisi secara estetika dan kebersihan.

8. Fasilitas apa saja yang terdapat pada museum ini?

Jawaban :

Fasilitas masih standar umum museum..Dari fasilitas umum seperti toilet yang cukup banyal, namun toilet belum di revitalisasi. Fasilitas lain seperti ruang audio visual dan teater untuk pemutaran film. Sebelum mereka keliling museum untuk pemanduan, mereka menonton film diruang jati 1 sembari mereka istirahat. Kemudian juga komunitas yang mau melakukan kegiatan mereka bisa memakai fasilitas ruang rapat di museum, kemudian ada wifi juga kalau mereka mau melakukan kegiatan mereka disini yang mempromosikan museum juga. Fasilitas lainnya ada masjid dibelakang museum dan ada perpustakaan juga. Jika ada peneliti ataupun pengunjung yang ingin mencari buku2 tentang kehutanan bisa ke perpustakaan. Ada juga arboretum jika ingin melakukan penelitian di hutan kota.

Fasilitas fisik itu, untuk pengunjung disabilitas belum ada fitur kelengkapan fasilitasnya disini seperti flat stairs untuk kursi roda. Kursi roda pun belum disediakan untuk pengunjung yang sudah tua atau berumur. Fasilitas selanjutnya ada parkir yg luas.

9. Ada program apa saja yg terdapat di museum ini?

Jawaban :

Ketika masih dibawah Yayasan, SDM masih banyakk sehingga program pun masih banyak seperti bekerjasama dengan perpustakaan seperti bedah buku, pameran, lomba2 untuk anak sekolah. Tetapi semenjal bergabung dengan kementerian anggaran menjadi terbatas sehingga program hanya sebatas pameran disini dan pameran keliling ataupun pameran yg diadakan oleh pemprov kita buka booth. Karena anggaran terbatas.

10. Berapa Rata-rata jumlah pengunjung?

Jawaban :

Karena kita museum tematik, pengunjung tertentu. Gak semua sekolah kesini, khususnya sekolah alam yg kesini. Untuk jumlah kunjungan tidak sebanyak museum umum seperti museum fatahillah yg didukung oleh lokasi yang strategis. Tapi kita berada didalam komplek lingkungan kementerian dan museum tematik. Otomatis pengunjung gabegitu banyak. Dalam sebulan jumlah pengunjung bisa sampai 4rb pengunjung.

11. Bagaimana perawatan dan pengamanan koleksi museum?

Jawaban :

Jika dijamin Yayasan masih ada konsevator dan ada konsultan museum, steelah bergabung dengan museum karena dana terbatas untuk perawatan tidak begitu banyak dan terbatas. Pemeliharaan sekarang dilakukan secara keseluruhan karena gabung dengan perpustakaan, seperti fumigasi yg melibatkan pihak ketiga. Seharusnya koleksi kita ada konsevator khusus karena koleksi kita ada yg kain, logam, kayu yg membutuhkan perawatan khusus yg berbeda dengan konsevator yg berbeda-beda juga. Karena SDM dan anggara kurang, pemeliharaan tidak dilakukan secara spesifik, hanya secara keseluruhan untuk menghilangkan jamur, bakteri yg dilakukan 3 bulan sekali. Setiap hari sabtu, museum ditutup untuk pemeliharaan.

12. Bagaimana Teknologi yg ada di museum ini apa saja?

Jawaban :

Teknologi biasanya besar, anggaran kita kecil. Teknologi yg dipakai disini hanya sebatas QR CODE saja. Selebihnya org bisa melihat dr QR CODE saja belum segacanggih dan memakai teknologi yg macem-macem seperti museum lain.

13. Apa saja Tantangan yang dihadapi museum?

Jawaban :

1. Teknologi

1. Membuat program public yang menarik dan bermanfaat untuk masyarakat, museum kehutanan dan citra kementerian lingkungan hidup dan kehutanan

-pengunjung kita beda2, seperti di museum lain ada night museum atau jelajah museum. Disini dulu ada, tetapi sekarang tidak ada karena SDM yg terbatas. Kemudian perlu mengandeng komunitas, sedangkan di kehutanan sendiri kebanyakan adalah komunitas pecinta alam yg dimana mereka lebih menyukai beraktivitas di alam seperti gunung, taman nasional. Sementara kita ingin memproosikan museum Dan mereka kurang tertarik. Hal tersebut menjadi kendala tersendiri karena komunitas ingin aktivitas outdoor dan SDM kita terbatas.

2. Mengadakan koleksi-koleksi yang semakin beragam sesuai tema lingkungan hidup dan kehutanan, dengan kajian mendalam yang dapat dipublikasikan kepada masyarakat

-Sekarang museum kllh Namanya, sedangkan sekarang masih museum kehutanan. Apakah nantinya koleksi mau hanya sebatas pada koleksi kehutanan saja atau bagaimana. Semua Kembali lagi ke dana dan pimpinan. Apakah pimpinan punya perhatian khusus terhadap museum atau tidak. Kemudian soal anggaran. Karena museum berada dibawah biro umum. Sedangkan ditempat lain biasanya di humas atau pusdatin. Jika di ditempat lain memang aktivitas di fokuskan untuk aktivitas yg dinamis. Sedangkan di biro umum, banyak membawahi hal2 lain sehingga anggaran menjadi kecil. Sehingga banyak tantangan dan kendala. Yg paling utama yaitu anggaran dan SDM karena semua gabisa kerja sendiri.

3. Berpartisipasi dalam setiap kegiatan pameran baik didalam maupun luar kota sebagai sarana promosi museum kehutanan dan peningkatan citra kementerian lingkungan hidup dan kehutanan

4. Menjalin Kerjasama internal dan eksternal untuk memajukan dan meningkatkan daya manfaat museum kehutanan bagi masyarakat

14. Bagaimana Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut?

Jawaban :

Kalau dari saya, berupaya aktif memberikan informasi. Seperti permintaan untuk menambah SDM. Permohonan melakukan kegiatan ini dan itu. Sejauh ini yg baru terealisasi kegiatan pameran. Setidaknya kita tetap mengemukakan gagasan ide pemikiran kepada pimpinan.

15. Apa Harapan dan saran apa dari ibu/bapak untuk kedepannya ?

Jawaban :

Harapan saya pastis ama dengan pengelola museum pemerintah yang lainnya. Yitu kepedulian pimpinan terhadap museum. Kedua, kalo udah perhatian dan peduli ibarat kata orang udah saying apa aja dikasih, nah otommatis kan nanti anggaran untuk kegiatan ada, perbaikan untuk sana sini ada. Revitalisasi tidak hanya fisik saja tetapi juga program. Karena ini sudah masuk di teknologi 4.0, sementara museum masih seperti ini hanya mainan di qr code, harapannya kedepan menerapkan teknologi yg lebih bermanfaat untuk museum. Seperti misalkan yg di lantai 2, daripada tampilan seperti itu dan setiap tahun harus ganti dan akhirnya terbengkalai, lebih bagus bentuknya layer sentuh yg bisa kita klik informasinya apa. Seperti struktur organisasi yg ada gambar dan orang2nya. Teknologi yg sederhana tp bermanfaat. Harapan saya pipinan lebih peduli dan penerapan teknologi dan SDM



LAMPIRAN 5

LOGBOOK PENELITIAN

No	Tanggal	Kegiatan	Teknik Pengumpulan Data	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1.	23 Februari 2021	Wawancara dengan Ibu Yuli selaku Penanggung Jawab dan Pengelola Museum	Wawancara	1. Implementasi Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 tentang revitalisasi Museum Kehutanan Ir.Djamaluddin Suryohadikusumo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terdiri dari: a. Komunikasi b. Sumber daya c. Disposisi d. Struktur Birokrasi	a. Komunikasi mengenai implementasi Peraturan terkait revitalisasi museum dilakukan secara berjenjang dengan struktur organisasi dengan melakukan koordinasi antara Sekretaris Jenderal kementerian, Kepala Biro Umum, Kepala Bidang Perpustakaan dan Museum, serta Pengelola Museum dan kontraktor pihak ketiga. b. Sumber daya untuk melakukan revitalisasi dilihat dari sumber daya manusianya yaitu pengelola museum dirasa masih kurang dari segi SDM. Untuk melayani pengunjung SDM sekarang yang dimiliki masih terasa kurang dalam mengelola museum apalagi dengan kunjungan yang ada dan fasilitas yang dimiliki. Dengan fasilitas dan pelayanan yang dimiliki seperti pemanduan, ruang audio visual, ruang teater, serta koleksi yang jumlahnya cukup banyak dan beragam dirasa belum mencukupi dengan SDM yang ada untuk melayani masyarakat. Dalam menerapkan kebijakan revitalisasi fisik dan koleksi museum kehutanan memiliki standar operasional prosedur tersendiri terlebih dalam melayani



					<p>pengunjung museum. Semua permintaan kunjungan melalui standar operasional prosedur yang ada dan diteruskan ke bagian-bagian bidan perpustakaan dan museum kemudian dicatat oleh tata usaha kementerian.</p> <p>c. Dalam menjalankan tugasnya sebagai penanggung jawab pengelola museum, beliau melaksanakan sesuai dengan aturan dan SOP yang telah dibuat, tanpa adanya insentif dikarenakan sudah menjadi tugas dari beliau yaitu penanggung jawab pengelola museum. Selain itu untuk rencana strategis tahun 2020-2024 museum belum ada dan partisipasi pihak kementerian masih terbilang pasif.</p> <p>d. Dalam melayani kunjungan masyarakat terdapat SOP sebagai dasar acuan bertugas. SOP mengenai pelayanan kunjungan hampir sama disetiap museum dikarenakan standar yang digunakan sama. SOP akan ditandatangani oleh kepala museum dan kementerian Pendidikan dan kebudayaan.</p>
			<p>2. Hasil dari revitalisasi fisik dan koleksi museum serta Faktor pendukung dan faktor penghambat Implementasi Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 tentang revitalisasi Museum Kehutanan Ir.Djamaluddin Suryohadikusumo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terdiri dari:</p>		<p>a. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat mendukung dengan adanya peraturan dan kebijakan mengenai revitalisasi museum yang ditandai dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah mengenai revitalisasi</p> <p>b. Pengelola Museum yang berkompeten Sikap positif yang ditunjukkan oleh pengunjung setelah dilakukannya revitalisasi</p> <p>c. awa</p>

				<p>d. Ada pihak yang kurang melekat teknologi.</p> <p>e. Hasil dari revitalisasi fisik dan koleksi sejauh ini cukup memuaskan dari pejabat eselon 1 dan 2 karena memberikan sebuah penyegaran terhadap museum yang belum pernah di revitalisasi semenjak museum berdiri.</p>
Wawancara dengan Bapak Asep Pengelola Museum	Wawancara	1.	<p>Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 tentang revitalisasi Museum Kehutanan Ir.Djamaluddin Suryohadikusumo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Komunikasi b. Sumber daya c. Disposisi <p>a. Struktur Birokrasi</p>	<p>a. Komunikasi mengenai implementasi Peraturan terkait revitalisasi museum dilakukan secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi dengan melakukan koordinasi antara Sekretaris Jenderal kementerian, Kepala Biro Umum, Kepala Bidang Perpustakaan dan Museum, serta Pengelola Museum dan kontraktor pihak ketiga.</p> <p>b. Sumber daya untuk melakukan revitalisasi dilihat dari sumber daya manusianya yaitu pengelola museum dirasa masih kurang dari segi SDM. Untuk melayani pengunjung SDM sekarang yang dimiliki masih terasa kurang dalam mengelola museum apalagi dengan kunjungan yang ada dan fasilitas yang dimiliki. Dengan fasilitas dan pelayanan yang dimiliki seperti pemanduan, ruang audio visual, ruang teater, serta koleksi yang jumlahnya cukup banyak dan beragam dirasa belum mencukupi dengan SDM yang ada untuk melayani masyarakat. Dalam menerapkan kebijakan revitalisasi fisik dan koleksi</p>



					<p>museum kehutanan memiliki standar operasional prosedur tersendiri terlebih dalam melayani pengunjung museum. Semua permintaan kunjungan melalui standar operasional prosedur yang ada dan diteruskan kebagian bidang perpustakaan dan museum kemudian dicatat oleh tata usaha kementerian.</p> <p>c. Dalam menjalankan tugasnya sebagai penanggung jawab pengelola museum, beliau melaksanakan sesuai dengan aturan dan SOP yang telah dibuat, tanpa adanya insentif dikarenakan sudah menjadi tugas dari beliau yaitu penanggung jawab pengelola museum. Selain partisipasi pihak kementerian masih terbilang pasif terlebih soal pemeliharaan dan perawatan koleksi yang tidak se intens. Ketika masih dipegang oleh Yayasan manggala wanabakti.</p> <p>d. Dalam melayani kunjungan masyarakat terdapat SOP sebagai dasar acuan bertugas. SOP mengenai pelayanan kujungan hampir sama disetiap museum dikarenakan standar yang digunakan sama. SOP akan ditanda tangani oleh kepala museum dan kementerian Pendidikan dan kebudayaan.</p>
				<p>2. Faktor pendukung dan faktor penghambat Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 tentang revitalisasi Museum Kehutanan Ir.Djamaluddin Suryohadikusumo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terdiri dari:</p>	<p>a. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat mendukung dengan adanya peraturan dan kebijakan mengenai revitalisasi museum yang ditandai dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah</p>

				<p>a. Faktor pendukung internal</p> <p>b. Faktor pendukung eksternal</p> <p>c. Faktor penghambat internal</p> <p>d. Faktor penghambat eksternal</p> <p>e. Hasil Revitalisasi</p>	<p>mengenai revitalisasi</p> <p>Pengelola Museum yang berkompeten untuk menjalankan tugasnya sebagai orang lapangan mengelola museum.</p> <p>b. Sikap positif yang ditunjukkan oleh pengunjung setelah dilakukannya revitalisasi.</p> <p>c. Pernah terkendala di alokasi anggaran, sarana dan prasarana interior museum yang mengharuskan kami lebih sering untuk berkoordinasi dengan pihak kontraktor</p> <p>d. Ada pihak luar dari pengunjung yang terkadang memberikan penilaian kurang bagus terhadap museum.</p> <p>e. Hasil dari revitalisasi fisik dan koleksi sejauh ini cukup memuaskan dari pejabat eselon 1 dan 2 karena memberikan sebuah penyegaran terhadap museum yang belum pernah di revitalisasi semenjak museum berdiri.</p>
2.	25 Februari 2021	Wawancara dengan Ibu Herlyn selaku Kepala Bidang Perpustakaan dan Museum	Wawancara	<p>1. Implementasi Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 tentang revitalisasi Museum Kehutanan Ir.Djamaluddin Suryohadikusumo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terdiri dari:</p> <p>d. Komunikasi</p> <p>e. Sumber daya</p> <p>f. Disposisi</p> <p>a. Struktur Birokrasi</p>	<p>a. Penyampaian informasi terkait revitalisasi museum dilakukan oleh eselon 1 yaitu sekretaris jenderal kementerian berupa pemberitahuan dan rapat koordinasi peraturan pemerintah yang dilakukan. Dengan adanya pemberitahuan dan rapat koordinasi tersebut dirasa informasi terkait revitalisasi museum yang akan dilakukan telah cukup jelas dan telah dibuat rancangan awal implementasi peraturan pemerintah tersebut.</p> <p>b. Sumber daya manusia atau pengelola museum memang saat ini dirasa belum</p>



					<p>dibawah naungan biro umum yang mengurusi banyak urusan di kementerian. Akan tetapi, ada rencana di tahun ini atau di tahun depan pengelolaan museum akan di pindahkan ke bidang PPID ataupun Pusdatin agar memang lebih fokus dalam pengembangan museum agar lebih baik lagi.</p> <p>d. Dalam memberikan layanan kepada pengunjung didasari dengan SOP yang telah dibuat oleh pengelola museum dan ditanda-tangani oleh kepala biro umum.</p>	
				<p>2. Faktor pendukung dan faktor penghambat Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 tentang revitalisasi Museum Kehutanan Ir.Djamaluddin Suryohadikusumo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terdiri dari:</p> <p>a. Faktor pendukung internal</p> <p>b. Faktor pendukung eksternal</p> <p>c. Faktor penghambat internal</p> <p>d. Faktor penghambat eksternal</p> <p>e. Hasil Revitalisasi</p>	<p>a. Dari Kunjungan pejabat eselon 1 dan 2 pada saat pergantian jabatan di tahun 2015, kemuseum dan melihat mengenai kondisi museum yang belum mengalami revitalisasi sejak awal museum berdiri. Museum terkesan kuno, tidak bersih dan kurang dapat menarik minat kunjungan.</p> <p>b. Dikeluarkan nya peraturan pemerintah mengenai revitalisasi museum.</p> <p>c. Kurangnya alokasi anggaran dana dan Mungkin hal tersebut menyebabkan ide-ide dari pengelola museum belum dapat terwujud yang dapat menyebabkan motivasi pengelola museum menurun.</p> <p>d. Seringkali pihak eksternal kurang mau komunikatif dan terbuka terkait penilaian mereka terhadap pelayanan dan kualitas museum</p>	
3.	1 Maret 2021	Wawancara dengan Bapak Samidi selaku Kepala Biro Umum	Wawancara	1.	<p>Implementasi Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 tentang revitalisasi Museum Kehutanan Ir.Djamaluddin Suryohadikusumo Kementerian</p>	<p>a. Penyampaian informasi terkait revitalisasi museum dilakukan oleh eselon 1 yaitu sekretaris jenderal</p>



				<p>Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Komunikasi Sumber daya Disposisi Struktur Birokrasi 	<p>kementerian berupa pemberitahuan dan rapat koordinasi peraturan pemerintah yang dilakukan. Dengan adanya pemberitahuan dan rapat koordinasi tersebut dirasa informasi terkait revitalisasi museum yang akan dilakukan telah cukup jelas dan telah dibuat rancangan awal implementasi peraturan pemerintah tersebut.</p> <p>b. Sumber daya manusia atau pengelola museum memang saat ini dirasa belum memadai dan belum mencukupi sesuai dengan tugas, serta fasilitas sarana dan prasarana yang ada dan diperintahkan oleh pihak kementerian. Pengelola museum berulang kali ingin meminta penambahan sumberdaya manusia agar lebih meningkatkan lagi pelayanan yang ada. Namun hal tersebut belum dapat terakomodir dikarenakan kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kementerian ini sudah mencapai batas maksimal dan untuk penambahan sumberdaya manusia untuk pengelola museum dapat dilakukan dalam rentang waktu tahun ini 2021 hingga 2023 dikarenakan banyaknya pegawai kementerian yang memasuki masa pensiun.</p> <p>c. Dalam melayani pelayanan pengunjung museum disini kami menerapkan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki. Kami juga</p>
--	--	--	--	---	---



					<p>disini melakukan evaluasi selama 6 bulan sekali untuk melihat kekurangan yang perlu diperbaiki agar pelayanannya lebih baik lagi. Namun, mungkin hal tersebut masih dirasa oleh pengelola museum kursorng partisipatif untuk lebih memerhatikan. Selain itu terkait pemeliharaan dan perawatan koleksi memang sejauh ini tidak seintens Ketika di pegang Yayasan dikarenakan alokasi anggaran dana yang minim untuk museum yang berada dibawah naungan biro umum yang mengurus banyak urusan di kementerian. Akan tetapi, ada rencana di tahun ini atau di tahun depan pengelolaan museum akan di pindahkan ke bidang PPID ataupun Pusdatin agar memang lebih fokus dalam pengembangan museum agar lebih baik lagi.</p> <p>d. Dalam memberikan layanan kepada pengunjung didasari dengan SOP yang telah dibuat oleh pengelola museum dan ditanda-tangani oleh kepala biro umum.</p>
				<p>2. Faktor pendukung dan faktor penghambat Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 tentang revitalisasi Museum Kehutanan Ir.Djamaluddin Suryohadikusumo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terdiri dari:</p> <p>a. Faktor pendukung internal</p> <p>b. Faktor pendukung eksternal</p> <p>c. Faktor penghambat internal</p> <p>d. Faktor penghambat eksternal</p> <p>e. Hasil Revitalisasi</p>	<p>a. Dari Kunjungan pejabat eselon 1 dan 2 pada saat pergantian jabatan di tahun 2015 kemuseum dan melihat mengenai kondisi museum yang belum mengalami revitalisasi sejak awal museum berdiri. Museum terkesan kuno, tidak bersih dan kurang dapat menarik minat kunjungan.</p> <p>b. Dikeluarkan nya peraturan pemerintah mengenai revitalisasi museum.</p>

					<p>c. Kurangnya alokasi anggaran dana dan Mungkin hal tersebut menyebabkan ide-ide dari pengelola museum belum dapat terwujud yang dapat menyebabkan motivasi pengelola museum menurun.</p> <p>d. Tidak ada kalau dari luar</p> <p>e. Sejahter ini hasil revitalisasi memuaskan karena merubah wajah museum</p>
4.	2 Maret 2021	Wawancara dengan Bapak Bambang Hendroyono Selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Wawancara	<p>1. Implementasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Pengadilan Agama Purwakarta yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Komunikasi b. Sumber daya c. Disposisi d. Struktur Birokrasi 	<p>a. Informasi mengenai peraturan pemerintah tentang revitalisasi museum didapat langsung dari ibu menteri yang sebelumnya telah dipanggil oleh presiden dan kementerian lain yang terkait dengan museum milik pemerintah pusat. Dari penyampaian tersebut dirasa sudah jelas dan dapat dipahami isi peraturan pemerintah tersebut dan diminta untuk segera di implementasikan.</p> <p>b. Untuk sumberdaya memang untuk museum masih dirasa kurang untuk memaksimalkan pengelolaan museum karena sejaher ini untuk di KLHK kapasitas pegawai sudah mencapai batas maksimal.</p> <p>c. Dengan komitmen ingin berinovasi untuk pelayanan terhadap pengunjung, kami membuat SOP dan evaluasi rutin yang biasanya setiap 6 bulan akan dilaporkan kepada saya. Akan tetapi memang diakui bahwa sejaher ini dari pihak kementerian kurang partisipatif dengan pengelolaan museum dikarenakan bidang yang menaungi museum sudah mendapat</p>

			<p>banyak tanggungan. Oleh karena itu sedang di rencanakan dan di realisasikan untuk pemindahan bidang yang menaungi museum entah itu nanti ke PPID ataupun PUSDATIN.</p> <p>d. Dalam melayani kunjungan masyarakat pengelola museum melakukan berdasarkan SOP yang telah dibuat oleh pimpinan.</p>
		<p>2. Faktor pendukung dan faktor penghambat Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 tentang revitalisasi Museum Kehutanan Ir.Djamaluddin SuryohadikusumKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terdiri dari:</p> <p>a. Faktor pendukung internal</p> <p>b. Faktor pendukung eksternal</p> <p>c. Faktor penghambat internal</p> <p>d. Faktor penghambat eksternal</p> <p>e. Hasil Revitalisasi</p>	<p>a. Adanya arahan dari ibu Menteri dan sarana yang disediakan</p> <p>b. Adanya peraturan pemerintah tentang revitalisasi dan masukan dari pengunjung</p> <p>c. Kendala soal alokasi anggaran pada awal ingin merencanakan revitalisasi</p> <p>d. Sampai saat ini belum menemukan hambatan dari luar</p> <p>e. Sejauh ini hasil revitalisasi memuaskan karena merubah wajah museum</p>
Mengamati Koleksi dan Hasil dari revitalisasi Museum	Observasi	-	<p>Terdapat fasilitas penunjang yang berhubungan dengan keterbukaan informasi publik yaitu seperti meja informasi yang masuk dalam layanan PTSP dan papan pengumuman seperti daftar biaya perkara.</p>

LAMPIRAN 6

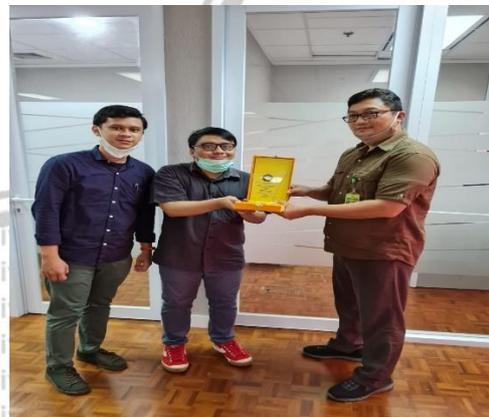
DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan Informan



Wawancara Penanggung Jawab Museum (Kiri) dan Pegawai Pengelola museum (Kanan)

Sumber : Hasil dokumentasi peneliti, (2021)



Wawancara Kepala Bidang Karya Cetak dan Kepustakaan (Kiri) dan Kepala Biro Umum (Kanan)

Sumber : Hasil dokumentasi peneliti, (2021)



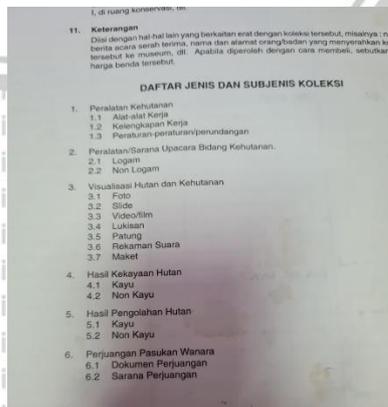
Sertifikat Standarisasi Museum Kehutanan Ir.Djamaludin Suryohadikusumo

Sumber : Hasil dokumentasi peneliti, (2021)



Teknologi QR Code yang dipakai pada vitrin koleksi museum

Sumber : Hasil dokumentasi peneliti, (2021)



Klasifikasi Penomoran katalog dan registrasi koleksi museum

Sumber : Hasil dokumentasi peneliti, (2021)



Jenis Koleksi Museum

Sumber : Hasil dokumentasi peneliti, (2021)



Fasilitas Koleksi Museum yang hidup di Arboretum dan fasilitas *café arborea*

Sumber : Hasil dokumentasi peneliti, (2021)



Koleksi Museum di Lantai 2

Sumber : Hasil dokumentasi peneliti, (2021)

